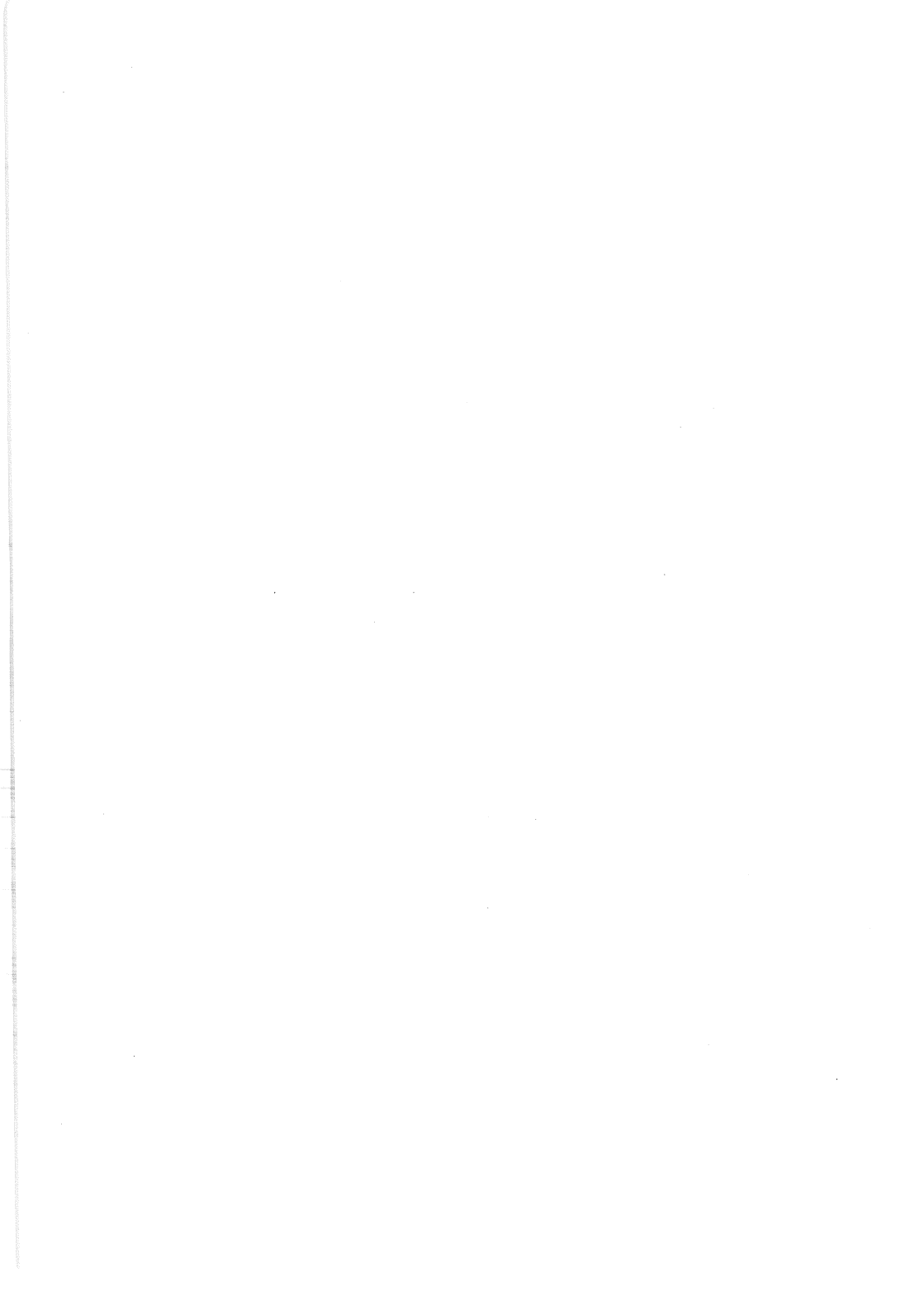

**KESIAPAN GENERASI
MUDA INDONESIA
MENYONGSONG PERUBAHAN
KEPEMIMPINAN DI TAHUN
2015 MENDATANG**



**KESIAPAN GENERASI
MUDA INDONESIA
MENYONGSONG PERUBAHAN
KEPEMIMPINAN DI TAHUN
2015 MENDATANG**

Editor : **Henny Warsilah**

Oleh :

Henny Warsilah

Dede Wardiat

Azis Suganda

Endang Turmudi

Katubi



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kesiapan Generasi Muda Indonesia Menyongsong Perubahan
Kepemimpinan di Tahun 2015 Mendatang/Henny Warsilah, Dede
Wardiat, Azis Suganda, Endang Turmudi, Katubi – Jakarta: LIPI Press,
2010.

viii hlm + 152 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-577-5

1. Kepemimpinan
2. Generasi Muda

303.34

Penerbit : **LIPI Press, Anggota Ika pi**



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

=====**KATA PENGANTAR**=====

Upaya Tim Peneliti untuk melakukan analisis dan pengkayaan kajian penelitian tentang “Kesiapan Generasi Muda Indonesia dalam Menyongsong Perubahan Kepemimpinan (Studi kasus kepemimpinan generasi muda dalam tubuh partai politik di Kota Manado, Sulawesi Utara, organisasi kepemudaan di kota DKI-Jakarta dan organisasi kepemudaan di Kota Palembang, Sumatera Selatan)” dan merangkumnya ke dalam sebuah buku utuh patut mendapat penghargaan. Karena hadirnya sebuah buku, tentu membutuhkan ketekunan, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Yang menarik dari buku ini adalah sebuah deskripsi utuh tentang proses alih kepemimpinan kepada generasi muda dalam tubuh partai politik dan organisasi massa kepemudaan berikut analisis kendala dan prospeknya.

Banyak pelajaran tentang bagaimana proses alih kepemimpinan generasi muda pada level nasional, regional dan lokal saling berkaitan dan dijadikan politik pembenaran keberlanjutan kepemimpinan generasi tua yang *status quo* dan terbangunnya politik dinasti keluarga. Melalui kehadiran buku ini kita dapat menarik pelajaran berharga bahwa sebuah proses alih generasi kepemimpinan generasi muda baik dalam tubuh partai politik maupun organisasi kepemudaan tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan. Banyak kendala yang menghadang, dari mulai keberlakuan politik Orde Baru, kuatnya sistem pewarisan sampai intervensi kekuatan modal yang berasal dari pihak luar non partai (swasta) dan non ormas (birokrat).

Ketekunan para penulis untuk memetakan dan melakukan analisis alih kepemimpinan generasi muda di tiga daerah (Jakarta, Manado dan Palembang) patut mendapat apresiasi karena tidak saja menghasilkan sketsa proses alih kepemimpinan secara utuh dan

berdasarkan fakta yang ada yang ditinjau dari sudut sosial, budaya dan politik. Tetapi juga, mengedepankan kedalaman analisis dari berbagai perspektif. Dan yang membuat ulasannya lebih menarik untuk di baca, adalah ulasan analisis sosial politik tentang hadirnya sebuah kekuatan negara yang mampu mengintervensi indenpedensi partai politik dan organisasi massa.

Kondisi ini, akan menjadi triger jika dikaitkan dengan proses berjalannya konsolidasi politik pada level nasional, regional dan lokal yang menunjukkan proses demokrasi masih dalam proses pematangan. Kehadiran buku ini tentunya atas keterlibatan banyak pihak, terutama narasumber di pelbagai daerah, narasumber daerah dan teman-teman mahasiswa dan LSM yang selalu menjadi mitra LIPI. Untuk itu kami sebagai Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI menghaturkan banyak terima kasih. Dan terimakasih pula kepada rekan-rekan kolega yang turut membantu terealisirnya buku ini secara tepat waktu. Tentunya, tidak ada buku yang sempurna, untuk itu kami tetap mengundang masukan berupa kritik yang membangun demi perbaikan buku ini selanjutnya.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB I PENDAHULUAN: PROBLEMATIKA GENERASI MUDA DALAM PERUBAHAN KEPEMIMPINAN	1
1.1 Pengantar.....	1
1.2 Permasalahan yang Dihadapi Generasi Muda.....	4
1.3 Konsep Pemuda dari Sisi Kepemimpinan Hingga Politik.....	5
1.3.1 Orang Muda, Generasi Muda dan Pemuda.....	5
1.3.2 Kepemimpinan	8
1.3.3 Sosialisasi Politik Pemuda.....	10
1.4 Metodologi.....	12
1.4.1 Pendekatan dan Pengumpulan Data	12
1.4.2 Analisa Data	13
1.4.3 Lokasi Penelitian	13
Daftar Pustaka	14
BAB II ALIH KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA PADA LEVEL NASIONAL.....	16
2.1 Pengantar.....	16
2.2 Menilik Kesempatan Kalangan Muda Memasuki Kepemimpinan Nasional.....	16
2.2.1 Pendahuluan	16
2.2.2 Orientasi Organisasi Kepemudaan	19
2.2.3 Pemuda dalam Kepemimpinan Nasional.....	23
2.2.4 Pengaruh Lingkungan Strategis.....	30
2.3 Penutup.....	37
Daftar Pustaka	41

BAB III	ALIH KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA DALAM TUBUH PARTAI POLITIK DI DAERAH.....	43
3.1	Pengantar.....	43
3.2	Alih Kepemimpinan Generasi Muda dalam Partai Politik Golkar dan PDI-P Kota Manado: Pertarungan Antara Kapitalisasi dan Ideologi.....	43
3.2.1	Pendahuluan	43
3.2.2	Pendekatan Teori.....	47
3.2.3	Konsep Generasi Muda	47
3.2.4	Peran Pemuda dan Pembangunan Politik	49
3.2.5	Kepemimpinan Generasi Muda	55
3.2.6	Orientasi Sosial Politik Generasi Muda.....	57
3.3	Kota Manado dalam Konstelasi Sejarah Sosial Politik ...	63
3.3.1	Sejarah Kota dan Penduduk.....	63
3.3.2	Latar Belakang Etnisitas di Kota Manado	71
3.3.3	Sejarah Perkembangan Agama	72
3.4	Alih Kepemimpinan dalam Dinamika Politik Lokal.....	74
3.5	Membangun Dinasti dan Oligarki Modal.....	75
3.6	Alih Kepemimpinan dalam Partai Politik.....	84
3.7	Penutup.....	90
	Daftar Pustaka	92
BAB IV	ALIH KEPEMIMPINAN DALAM TUBUH ORGANISASI KEPEMUDAAN DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN.....	94
4.1	Pengantar.....	94
4.2	Pemuda dan Kepemimpinan: Temuan dari Palembang.....	94
4.2.1	Pendahuluan	94
4.2.2	Masalah Penelitian	97
4.2.3	Menelusuri Konsep Pemuda.....	98
4.2.4	Pemuda dalam Angka.....	106
4.2.5	Organisasi Kepemudaan di Sumsel dan Pengaruhnya terhadap Kaderisasi Kepemimpinan	108
4.2.6	Pemuda Sumsel dalam Keanggotaan DPRD Periode 2009-2014	114

4.3 Peran KNPI dalam Mempersiapkan Regenerasi Kepemimpinan Daerah.....	125
4.3.1 KNPI Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Orde Baru	125
4.3.2 Aktivitas Organisasi KNPI	127
4.3.3 Sistem Rekrutmen Kepengurusan di Tubuh KNPI....	130
4.3.4 KNPI Sumatera Selatan Setelah Masa Reformasi	132
4.3.5 Penutup	145
Daftar Pustaka	149

DAFTAR ISTILAH

A

ABS	Asal Bapak Senang
AMI	Aliansi Mahasiswa Independen
AMK	Angkatan Muda Ka'bah

B

Bolmomp	Bolang Mongondow
BBM	Bugis Buton Makassar
Bansos	Bantuan Sosial

C

Civil Society	Masyarakat Sipil
Cultral Capital	Modal Budaya

D

Demokrat	Partai Demokrat
DGI	Dewan Gereja Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan perwakilan Rakyat Daerah

F

Floating Mass	Massa Mengambang
FPP	Forum Pemberdayaan Pemuda

G

Golkar	Partai Golongan Karya
Golput	Golongan Putih
GMIM	Gereja Minahasa
GAPURA	Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Daerah
GERINDRA	Partai Gerakan Indonesia Raya

H

HAM	Hak Asasi Manusia
-----	-------------------

K

KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KB	Program Keluarga Berencana
KGPM	Kerapatan Gereja Protestan Minahasa
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
KIMS	Komunitas Intelektual Muda Sriwijaya
Kesbangpol	Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
KBPPP	Keluarga Besar Putra-Putri Polri

L

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Layer	Tingkat atau Level
LINMAS	Perlindungan Masyarakat

N

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NZG	Lembaga Zending Zaman Belanda

O

Ormas	Organisasi Massa
Orba	Orde Baru
OKP	Organisasi Kepemudaan

P

Parpol	Partai Politik
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu-kada	Pemilihan Umum Kepala daerah
Pilpres	Pemilihan Presiden
Peak	Puncak Pertumbuhan
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PDRB	Pendapatan dan Rencana Belanja

Parkindo
PLN
Peradiah Indonesia

Partai Kristen Indonesia
Perusahaan Listrik Negara
Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

R

RI
RPJMD
RAS

Republik Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Ras, Agama dan Suku

S

SARA
Stakeholder
SDA
SDM
Social Capital
SMA
SMK
Sulut
S1

Suku, Agama, dan Ras
Pemangku Kepentingan
Sumber Daya Alam
Sumber Daya Manusia
Modal Sosial
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Kejuruan
Sulawesi Utara
Sarjana Strata Satu

T

TPS
TPAK
TPT
TNI
Timtim

Tempat Pemungutan Suara
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tentara Nasional Indonesia
Timor Timur

U

UU

Undang-Undang

V

VOC

Kantor /Kongsi dagang Pada Masa Kolonial Belanda

Y

YMCA

Young Men's Christian Association Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN: PROBLEMATIKA GENERASI MUDA DALAM PERUBAHAN KEPEMIMPINAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari empat sub bagian yaitu pengantar, permasalahan generasi muda, konsep pemuda, kepemimpinan dan sosialisasi politik pemuda, serta metodologi penelitian. Keseluruhan bahasan pada bagian ini ditulis oleh tim peneliti setelah melalui serangkaian diskusi yang panjang. Bagian ini akan mengantarkan kepada bahasan bab berikutnya.

1.1 Pengantar

Tonggak penting sejarah Indonesia ditancapkan oleh kaum muda, yakni pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan terakhir 1998. Dengan demikian, kaum muda memiliki legitimasi yang kuat dalam mengusung perubahan.

Menjelang peringatan Sumpah Pemuda ke-79 pada tanggal 28 Oktober 2007 dan peringatan ke 80 tahun pada tanggal 28 Oktober 2008, sudah mulai terdengar kembali tuntutan kebangkitan pemuda atau seruan agar kaum muda mulai mengambil alih kepemimpinan. Tuntutan dan seruan ini tampaknya relevan mengingat reformasi oleh sebagian kalangan dianggap tidak berjalan seperti yang digagas oleh kaum muda. Cara yang digagas adalah melakukan perubahan atau transformasi politik sebagai hal yang paling fundamental yang harus dikerjakan generasi muda (Hamengku Buwono X 2008).

Harapan tampilnya kaum muda dalam kancah politik Indonesia juga tampak pada hasil jajak pendapat penelitian dan pengembangan (Litbang) *Kompas* pada 830 responden di 10 kota besar di Indonesia. Mayoritas responden (61,8%) atau sebanyak 7 dari 10 responden berpendapat bahwa usia ideal seorang Presiden RI di

bawah 50 tahun (Syamsuddin, 2008). Menjelang pemilu 2009 ramai diperdebatkan di ruang publik tentang kepemimpinan kaum muda. Pemilu 2009 adalah momentum regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan melalui wacana itu adalah "berikan kesempatan kepada kaum muda untuk masuk ke dalam arena politik formal". Selain itu, kaum muda sendiri harus menyadari pentingnya tampil dalam arena politik formal (Hariyanto, 2009).

Keyakinan publik cukup besar kepada tokoh-tokoh muda yang sebenarnya dapat berkompetisi dengan para elite politik yang sudah mapan. Namun, kenyataan berkata lain. Pada pemilihan Presiden RI periode 2009–2014 masih muncul kandidat presiden yang masih berasal dari generasi tua yang telah mapan secara ekonomi dan politik. Namun demikian, kekecewaan publik itu agak sedikit terobati dengan munculnya pendatang baru dengan tampilan wajah baru di DPR RI. Meskipun belum ada penelitian apakah wajah baru kaum muda dari segi umur atau yang berpikir konservatif atau yang berpikir kritis untuk mengusung perubahan.

Menurut Anies Baswedan (2009), generasi baru perlu didorong untuk tampil dan memimpin partai. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama*, demokratisasi pada dasarnya adalah kerja jangka panjang. Perlu stamina lintas generasi untuk membuat demokrasi berhasil meraih cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keberadaan generasi baru berpotensi membawa terobosan baru dalam perpolitikan Indonesia. *Kedua*, generasi baru politik Indonesia sudah mulai memasuki usia maturitas. Meskipun tidak ada rumus universal tentang syarat usia dalam kematangan politik, setelah dua periode pemerintahan pascareformasi, para pegiat demokrasi yang selama ini aktif di partai politik sudah mumpuni untuk muncul dan memimpin.

Ketiga, partai politik harus melakukan modernisasi. organisasi, pendanaan, dan pengelolaan harus mulai menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutakhir. Negara besar seperti Indonesia membutuhkan partai politik yang bisa merajut aspirasi dari seluruh

Indonesia dan menerjemahkannya menjadi agenda politik. Partai harus memiliki ideologi dan ikatan emosional dengan pendukungnya serta memiliki manajemen partai yang modern. Generasi baru yang berada di partai politik lebih berpotensi untuk memiliki kesadaran itu. *Keempat*, partai politik harus menjadi wahana persemaian pemimpin baru Indonesia, sebuah tempat dibangunnya kedewasaan berpolitik, dirawatnya kedekatan dengan publik dan dijaganya idealisme. Partai politik bergerak di wilayah kekuasaan, tetapi berakar pada semangat kerakyatan.

Munculnya gelombang golongan putih (Golput), yang kebanyakan berasal dari kelompok muda dalam pilkada dan pilpres di pelbagai daerah, merupakan cermin dari penolakan generasi muda terhadap sistem kepartaian dan kepemimpinan yang ada sekarang ini.

Dari sisi ini, Frans Magnis Suseno mendeskripsikan beberapa varian orientasi politik di kalangan anak muda. *Pertama*, ada semacam *Jeunesse d'oree*; generasi muda emas dari kelas menengah atas, anak pejabat, dan sebagainya. Mereka mudah ditemukan di diskotik dan tempat hiburan, menikmati kelimpahan materi. Ada yang masuk struktur-struktur politik, ada yang memusatkan perhatiannya pada karier. Untuk mempersoalkan nasib bangsa, mereka tidak mempunyai waktu. *Kedua*, ada *anak-anak kampung*, yang penuh gairah dan kerja keras. Mereka bergulat keras memperebutkan tempat-tempat basah karena tidak ada pilihan lain kalau tidak ingin terlindas. Mereka siap berkelahi, suka tawuran, siap rusuh, siap preman-premanan. Dalam budaya politik, modus ini tidak berbeda dengan yang pertama di atas, yaitu mereka tidak mempunyai waktu untuk memikirkan nasib bangsanya. *Ketiga*, ada sebagian yang masih memperjuangkan suatu masa yang lebih manusiawi bagi bangsa. Mereka ditemukan di antara yang masuk berbagai ormas. (Mungkin) kesalahan mereka adalah memakai bahasa yang keras, yang meminjam dari kiri-kanan istilah dan paham-paham ideologi. Justru dalam modus inilah, Frans Magnis Suseno menyebut “suatu yang betul-betul tragis sedang berjalan.”

Paparan di atas menunjukkan adanya pembangunan politik ke dalam kesadaran politik menghadapi persoalan berdimensi sosiologis, yang beranjak dari realitas masyarakat secara horizontal maupun vertikal.

1.2 Permasalahan yang Dihadapi Generasi Muda

Reformasi yang bergulir pascalengsernya rezim Soeharto membuka peluang terjadinya alih kepemimpinan kepada generasi muda. Berbekal legitimasi sejarah dan jumlah penduduk golongan muda yang dominan dalam struktur kependudukan di Indonesia, idealnya kaum muda dengan sangat mudah masuk dalam arena politik untuk mengusung perubahan dan menjalankan agenda reformasi yang digagasnya pada 1998. Namun, sebagian kalangan ternyata tidak puas dengan kiprah generasi muda dalam berbagai persoalan bangsa. Ada kegalauan masyarakat atas lemahnya gaung tokoh-tokoh muda, baik di pentas nasional maupun daerah.

Itu berarti reformasi 1998 yang dimotori oleh kaum muda ternyata kurang berhasil melahirkan tokoh-tokoh muda sebagai pemimpin yang mampu membawa suara rakyat pada lembaga formal. Bahkan, sebagian masyarakat kembali mempertanyakan, ke mana tokoh-tokoh muda yang dulu aktif bersuara nyaring menuntut reformasi (Syamsuddin, 2008: 86). Hal itu memunculkan masalah regenerasi kepemimpinan yang jika tidak berjalan dengan mulus, hal itu dapat berakibat fatal bagi kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan disekitar alih kepemimpinan kepada generasi muda, terutama dalam tubuh organisasi politik dan organisasi massa, dirumuskanlah pertanyaan penelitian berikut.

- *Pertama*, bagaimanakah struktur sosial dan struktur politik di tingkat daerah yang berkaitan dengan kemungkinan kaum muda dapat tampil dalam arena politik formal, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif?

- *Kedua*, bagaimanakah berbagai partai politik dan organisasi kepemudaan *underbow* parpol mempersiapkan generasi kepemimpinan baru dalam partainya?

Sementara itu, penelitian alih kepemimpinan generasi muda dalam organisasi politik dan organisasi massa ini memiliki tujuan untuk memetakan struktur sosial dan politik di tingkat daerah yang berkaitan dengan kemungkinan kaum muda dapat tampil dalam arena politik formal, terutama dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dan untuk memahami strategi yang diterapkan partai dan organisasi kepemudaan di tingkat daerah dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dalam partainya.

1.3 Konsep Pemuda dari Sisi Kepemimpinan Hingga Politik

Sebelum masuk pada bahasan tentang kerangka teoritis yang digunakan sebagai pedoman perspektif penelitian, akan dikupas terlebih dahulu istilah yang biasa digunakan untuk saling menggantikan, yaitu orang muda, generasi muda, dan pemuda, serta kepemimpinan dan sosialisai politik pemuda.

1.3.1 Orang Muda, Generasi Muda, dan Pemuda

Umur adalah salah satu penanda klasifikasi dan stratifikasi sosial budaya. Menurut Barker (2000:364), deskriptor anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, dan sebagainya adalah kategori identitas yang memikul konotasi yang terkait dengan kemampuan dan tanggung jawab. Pemuda adalah klasifikasi budaya dan usia elastis yang telah dikodekan secara mendua oleh orang tua dalam bentuk indikasi "pembawa masalah" dan "senang-senang". Pemuda membawa harapan bagi orang dewasa pada masa depan, tetapi seringkali juga memunculkan rasa takut dan keprihatinan.

Pengkategorian pemuda seringkali hanya dikaitkan dengan usia. Menurut Talcott Parsons (dalam Barker, 2000: 334), pemuda bukan satu kategori universal biologi, melainkan satu konstruksi sosial yang tengah berubah dan muncul pada kurun waktu tertentu

dan pada kondisi definitif. Konsep pemuda tidak memiliki makna universal. Namun, "usia biologis" yang dikemukakan Parsons dengan sendirinya merupakan bagian dari sistem klasifikasi budaya dan bukan satu titik pasti tempat harapan-harapan sosial digantungkan.

Pemuda sebagai suatu kategori usia tidak memiliki karakteristik dan tahap peralihan yang jelas. Ini akan sangat kentara kalau kita bertanya: (1) Kapan pemuda mulai dan berakhir secara biologis?; (2) Apakah semua orang berusia 16 tahun sama secara biologis dan secara kultural?; (3) Apa kesamaan semua orang yang berusia 25 tahun?; (4) Mengapa orang-orang muda tampak berbeda di New York, Bombay, dan Rio de Janeiro atau Jakarta sekalipun?; (5) Bagaimana sampai terjadi sebagian penduduk dewasa di atas 40 tahun berjuang untuk menjadi muda?; (6) Bagaimana mungkin periode "pemuda" tampak lebih lama di negara-negara Barat?

Pemuda sama sekali bukan kategori biologis yang dibalut oleh berbagai konsekuensi sosial sebagai satu serangkaian perubahan klasifikasi budaya yang ditandai oleh perbedaan dan keragaman. Sebagai satu konstruksi budaya, makna pemuda bergeser menurut ruang dan waktu berdasar atas siapa disebut siapa. Pemuda adalah satu konstruksi diskursif. Dia dibentuk oleh cara teorganisasi dan terstruktur kita berbicara dan bagaimana mewujudkan pemuda sebagai kategori orang.

Oleh karena itu, bagaimana pun cara kita mendefinisikannya, pemuda tetap merupakan satu konsep *ambigu*. Namun demikian, bagi Grossberg dalam Barker (2000:336), yang menjadi persoalan adalah bagaimana kategori pemuda yang ambigu itu diartikulasikan dengan wacana lain, misalnya kekuasaan, tanggung jawab, harapan, masa depan, gaya, dan sebagainya. Pemuda adalah bagian dari konteks tempat mereka diorganisasikan oleh masyarakat.

Syamsuddin (2008) mendefinisikan pemuda di Indonesia sebagai generasi yang berusia 20 hingga 40 tahun. Namun demikian, ia juga menyebutkan bahwa konsep tentang pemuda itu bukanlah sebuah gugus gagasan yang hanya dibatasi oleh persoalan umur,

melainkan ada dimensi politisnya pula. Oleh karena itu, mengharapkan pemuda yang tampil dalam arena politik hanya mendasarkan pada segi usia muda adalah kesia-siaan.

Track record apa yang kemudian perlu diperhatikan untuk mengklasifikasikan pemuda atau kaum muda? Ada tiga hal yang penting dijadikan tolok ukur dalam memilih kaum muda yaitu, kaum muda yang memiliki keteladanan moral, intelektual, dan politik (Ari Sujito, 2008). *Pertama*, pemuda yang secara moral bersih: tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak korupsi, dan tidak pernah melakukan tindakan moral tercela lainnya. *Kedua*, memiliki visi yang secara intelektual bisa dipertanggungjawabkan dan berbasis pada kondisi sosial politik masyarakat Indonesia. Pemuda yang bisa menunjukkan arah sekaligus menjelaskan secara gamblang jalan keluar mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemuda yang bisa menginspirasi perubahan dan melakukan transformasi bagi masyarakat. *Ketiga*, pemuda yang mau berkeringat dan berdarah-darah bersama rakyat. Artinya, kehadirannya dalam politik bukan sesuatu yang instan, tetapi dilalui dengan proses panjang.

Menurut Saifudin (2009: 48), istilah *orang muda* dan *generasi muda* merujuk pada landasan biologis daripada *pemuda* yang merujuk pada sosial budaya. Orang muda biasanya diposisikan dalam suatu rentang usia biologis, yang di luar usia itu orang bersangkutan tidak lagi dapat disebut orang muda. Misalnya, orang yang berusia antara 18-40 tahun. Pembagian fase dalam siklus hidup biologis menentukan posisi sekarang. Generasi muda adalah suatu kategori rata-rata usia biologis sejumlah orang, misalnya rentang 18-40 tahun, yang dianggap mampu untuk meneruskan kelangsungan bangsa atau negara yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Peralihan generasi dalam konteks ini tampaknya analog dengan konsep transmisi kebudayaan dalam definisi kebudayaan klasik. Konsep pemuda tidak begitu terikat dengan persyaratan biologis di atas. Yang menjadi titik berat di sini adalah terpeliharanya semangat kolektif tertentu meskipun usia sudah menanjak jauh di atas batas

rentang biologis. Sebagai semangat yang menjauh dari kriteria biologis yang ketat itu, konsep pemuda dan kepemudaan lebih mendekati konteks sosial budaya, identitas, dan politik identitas. Konsep pemuda menjadi lebih longgar, fleksibel, dan kontekstual, bergantung pada kondisi-kondisi lokal, nasional, hingga global. Tampaknya yang menjadi tumpuan pembicaraan kita dalam konteks penelitian ini adalah konsep yang terakhir.

Berdasar paparan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan istilah generasi muda atau *pemuda* sebagai kategori sosial dan budaya sehingga tidak begitu terikat pada persyaratan biologis. Dengan demikian, pada penelitian nanti dapat diketahui bagaimana masyarakat dan politisi mendefinisikan istilah *pemuda* dalam dunia politik.

1.3.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu untuk menggerakkan, mengerahkan, dan mengarahkan orang-orang.¹ Oleh karena itu, kepemimpinan pada umumnya memiliki sifat universal dan merupakan gejala sosial karena kepemimpinan itu hanya akan tampak apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan usaha bersama dalam suatu kehidupan sosial.

Kunci utama dalam kata kepemimpinan adalah sekelompok orang dan gejala sosial. Hal itu ditekankan oleh Pfiffner dan Presthus (1960) yang menyebutkan bahwa kepemimpinan itu dapat dilihat fungsinya sebagai pemimpin karena kemampuannya untuk mengkoordinasikan sebuah kelompok, memiliki upaya melebihi seseorang yang merupakan bagian dari kelompok, dan menggunakan kekuasaan luar biasa untuk memberi pencerahan, mendominasi dan memanipulasi kelompoknya.²

¹ Louis A. Allen. 1966. *The Profession of Management*. Terjemahan JMA. Tuhuteru, Karya Management. Jakarta: Penerbit PT. Pembangunan.

² Pfiffner Jhon M. and Presthus Robert V., 1960. *Public Administration*, 4th edition. New York: The Ronald Press Company.

Kepemimpinan dalam konteks tersebut terkait dengan usaha kelompok dan karenanya merupakan gejala (sosial) dalam kelompok dimana dalam kelompok itu terdapat kehidupan sosial. Penting untuk diketahui bahwa kepemimpinan (*leadership*) berbeda dengan manajemen (*management*), namun kedua kata itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai macam teori berikut.³

- (a) Teori sifat (*traits theory*), yang mengklaim “*leadership are born and not made...*” bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk maka kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Teori ini sering disebut sebagai teori “orang besar”.⁴
- (b) Teori lingkungan (*environmental theory*), merupakan kebalikan dari teori sifat. Teori ini menerangkan bahwa munculnya pemimpin merupakan hasil daripada waktu, tempat dan keadaan atau situasi dan kondisi tertentu. Apabila seseorang “menguasai” situasi dan kondisi maka ia akan dapat menjadi pemimpin.
- (c) Teori pribadi dan situasi (*personal-situational theory*), kepemimpinan lahir sebagai akibat dari seperangkat kekuatan tunggal dan sebagai akibat adanya interaktif antara faktor pribadi dan situasi. Teori ini mengakui bahwa kepemimpinan merupakan produk dari tiga faktor sifat yaitu sifat pribadi dari pemimpin, kelompok dan sifat anggotanya dan serta kejadian yang dihadapi oleh kelompok.
- (d) Teori interaksi dan harapan (*interaction-expectation*), seorang pemimpin akan lahir jika dia mampu menggerakkan pengikutnya untuk berinteraksi dan memberi harapan bahwa ia akan berhasil,

³ Pamudji S., 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 145-152.

⁴ Bernard L.L., 1926. *An Introduction to Sosial Psychology*. New York: Holt.

mencapai tujuan organisasi, mendapatkan keuntungan dan penghargaan.

- (e) Teori humanistik (*humanistic theory*), seorang pemimpin harus sanggup memberi motivasi kepada pengikut sambil memenuhi harapan dan memuaskan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena manusia sifatnya adalah organisme yang dimotivasi.
- (f) Teori tukar menukar (*exchange theory*), teori ini menekankan adanya faktor “give” dan “take” antara pemimpin dan yang dipimpin dan sifatnya saling menguntungkan.

Sementara itu, dimensi kepemimpinan dapat diamati dan dianalisa terkait dengan status dan peranan, kekuasaan, pengaruh, otoritas, personalitas, fungsi, nilai sosio kultural, dan situasinya. Dengan demikian, kepemimpinan dalam konteks ilmu sosial tidak dapat diterangkan terlepas dari kolektivitas sosial dimana pemimpin itu berada dan bertindak.

Dalam kolektivitas sosial terjadi suatu proses interaksi antara pemimpin dan pengikut, yang pertama pemimpin dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi dan yang kedua dapat mengarahkan tindakan menuju kepada tujuan kolektif atau mempolakan kelakuan berdasarkan nilai tertentu. Pelbagai aspek kepemimpinan itu saling pengaruh mempengaruhi. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan perlu diterangkan dalam hubungannya dengan proses sistemik yang mencakup interaksi antara pemimpin dan konteks situasional.⁵

1.3.3 Sosialisasi Politik Pemuda

Sosialisasi politik adalah proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dalam pola tingkah lakunya. Proses ini dianggap sebagai sebuah perkembangan karena pada

⁵ Sartono Kartidirdjo, 1984. dalam pengantar untuk buku *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: Penerbit LP3ES, hlm v-xi.

hakikatnya tidak ada individu yang langsung menemukan orientasi politiknya.

Berhubungan dengan hal ini, Sherman dan Kolker (1989) mengatakan bahwa, ada tiga varian teori untuk menjelaskan hubungan sosialisasi dan orientasi politik atau tingkah laku politik. *Pertama*, pendekatan Freudian dan struktural fungsional. Menurut teori ini, kecenderungan kuat persepsi dan tingkah laku politik (pengetahuan, nilai, dan sikap) pada masa pasca anak-anak dan remaja merupakan refleksi belajar pada waktu anak-anak. Oleh sebab itu, melacak biografi masa pertumbuhan anak menjadi hal utama untuk menganalisis orientasi politik seseorang.

Kedua, pendekatan dari perspektif kekuasaan sebagai varian dari pendekatan konflik. Menurut teori ini, kesadaran seseorang tentang politik dibangun secara paralel bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran infrastruktural material. Posisi dalam struktur sosial membentuk nilai-nilai politik ketika secara otomatis dihadapkan pada infrastruktur material tadi.

Ketiga, pendekatan pengetahuan sosiologis, yang berinduk pada teori *interaksionisme simbolik* dari Herbert Mead. Akar dari teori interaksionisme simbolik ini berdasar pada sebuah anggapan bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sebagai wujud (*maujud*) yang statis-dogmatis. Oleh karena itu, manusia bukan sebagai *maujud jadi*, tetapi lebih sebagai *maujud yang akan jadi*. Berdasarkan anggapan itu, dalam pendekatan pengetahuan sosiologis, sosialisasi dibangun atas unsur-unsur pengalaman dan kekuatan eksternal serta aspek tafsir terhadap makna yang dibangun melalui interaksi intensional secara terus menerus.

Proses tersebut meliputi pemahaman mengenai apa yang diharapkan masyarakat (terhadap aktor sosialisasi) dalam hubungannya dengan berbagai peranan yang disandangnya. Untuk itu, ada dua harapan yang ditujukan kepada pemuda atau orang muda dalam bentuk harapan “diri sosial“ (*social self*) yang terbentuk dalam tanggapan yang ia lakukan terhadap harapan yang ditujukan

kepadanya oleh orang tua, teman, dan sekolah. Hal itu disebut *significant others*. Sementara harapan yang kedua berupa *generalized others* merupakan harapan masyarakat pada umumnya sebagian tidak lebih berupa paket harapan tentang bagaimana ia harus berperilaku.

Berdasar tiga varian teori itu, pemuda sebagai objek kajian sosialisasi politik akan dikaji berdasar pendekatan perspektif kekuasaan (politik) dan pendekatan pengetahuan sosiologis. Pendekatan perspektif kekuasaan akan dapat digunakan untuk memberikan penjelasan bahwa orientasi politik berada dalam pengaruh kuat struktur sosial (posisi aktor atau warga dalam struktur sosial).⁶ Sementara itu, pendekatan pengetahuan sosiologis akan sangat membantu menjelaskan struktur orientasi politik warga (dalam hal ini pemuda sebagai bagian dari warga) yang dibangun dalam kerangka intensitas interaksi dengan objek politik dalam bingkai struktur sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengabaikan pendekatan Freudian karena penelitian ini tidak akan meneliti dasar psikologis masa anak-anak pada pemuda yang menjadi objek penelitian.

1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *in-depth interview* (wawancara mendalam). Responden penelitian ini adalah pengurus partai politik dan organisasi pemuda *underbow* parpol, pengurus organisasi kepemudaan seperti komite nasional pemuda Indonesia (KNPI), pengurus organisasi mahasiswa ekstrakampus dan intrakampus, serta narasumber kunci yang berasal dari intelektual, jurnalis dan anggota LSM yang dianggap memahami maksud dan tujuan penelitian.

⁶ Struktur sosial yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi politik dibahas pada tahun pertama (2010) penelitian ini.

Penentuan responden dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, melalui posisi yang bersangkutan dalam suatu institusi partai politik (parpol) dan kemasyarakatan yang dikenal di daerah tersebut. *Kedua*, melihat latar belakang pendidikan dan aktivitas politik yang bersangkutan sebagaimana yang diberitakan oleh media massa maupun sebagaimana yang diinformasikan oleh para pimpinan institusi publik di atas. *Ketiga*, melihat jaringan sosial dan institusi yang bersangkutan dalam hal melakukan kontrol sosial politik terhadap negara.

1.4.2 Analisa Data

Data penelitian dianalisis dengan mengikuti prosedur analisis data kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992), yang terdiri atas tiga alur kegiatan, yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/verifikasi. Ketiganya memiliki keterkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis.” Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

1.4.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), Manado (Provinsi Sulawesi Utara) dan Provinsi DKI Jakarta. Ada dua alasan yang menyertai pemilihan lokasi penelitian ini. *Pertama*, kedua kota pertama memiliki konsentrasi orang muda yang sangat besar. *Kedua*, dalam beberapa tahun terakhir gerakan prodemokrasi yang mereka gagas sama pentingnya dengan kelompok muda di pusat (Jakarta), bahkan dalam beberapa kesempatan terlihat lebih keras dan meyarakan isu lokal yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat daerah. Sementara itu, DKI Jakarta penting dilihat sebagai barometer bagi kelompok muda yang terlibat dipelbagai organisasi profesi, sosial dan kelembagaan politik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 2004. "Negara, Bangsa, dan Masyarakat dalam Pendekatan Kebudayaan". Dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Nomor 1, Vol. vi.
- Abdullah, Taufik. 1974. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Allen Louis A.,1966. *The Profession of Management*, terjemahan JMA.Tuhuteru, Karya Management. Jakarta: PT. Pembangunan,
- Baswedan, Anies. 2009. "Regenerasi Pemimpin Partai Politik," <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/02/05204810/regenerasi.pemimpin.pa>
- Budiman, Arief. 1996. Litbang Kompas dan Pusat Informasi Kompas. Jakarta.
- Bernard, L.L.,1926. *An Introduction to Sosial Psychology*. New York: Holt.
- Hamengku Buwono X, Sri Sultan. 2008. "Kebangkitan Kembali Pemuda Indonesia 1908-2008." <http://www.gp-ansor.org>.
- Hariyanto, Titok. 2009. "Kaum Muda: Kepemimpinan Moral, Intelektual, dan Politik." <http://www.ireyogya.org>.
- Pfiffner Jhon M. and Robert V. Presthus. 1960. *Public Administration*, 4th edition, New York: The Ronald Press Company.
- Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: PT.Bina Aksara, hlm. 145-152.
- Karsono (Ed.). 2008. *Rekonstruksi Pemuda*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- Rush, Michael dan Philliph Althoff. 1993. *An Introduction to Political Sociology*. Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Press.

- Samsuddin, Aziz. 2008. *Kaum Muda Menatap Masa Depan Indonesia*. Jakarta: RM Books.
- Saifudin, Achmad Fedyani. 2009. "Menjaga Kesatuan dan Persatuan: Pemuda Kita dalam Dunia yang semakin Contested". Dalam Zulkifi Akbar, Karosno, Budiyanto (Eds.). *Dialog Pemuda dalam Membangun Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Sherman, Arnold K. dan Aliza Kolker. 1989. *The Social Bases of Politics*. California: Wardeoth.
- Suseno, Frans-Magnis. 1996. "Orang Muda: Kita Dapat Mengharap Apa?", Jakarta: *Harian Kompas*.
- Sartono Kartidirdjo, 1984. Dalam Pengantar untuk Buku *Kepemimpinan Dalam Dimensi sosial*, Jakarta: LP3ES.

BAB II

ALIH KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA PADA LEVEL NASIONAL

2.1 Pengantar

Bagian ini menguraikan terjadinya alih kepemimpinan kepada generasi muda pada level nasional dengan mengambil kasus organisasi kepemudaan yang ada di daerah DKI-Jakarta yang ditulis oleh Endang Turmudi.

2.2 Menilik Kesempatan Kalangan Muda Memasuki Kepemimpinan Nasional

2.2.1 Pendahuluan

Pergerakan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Belanda puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu bisa dikatakan sebagai perlawanan para pemuda hal ini disebabkan karena para penggeraknya dan yang terlibat di dalamnya adalah para pemuda, karena gelora semangat yang dipunyainya telah bisa mengalahkan penjajah tadi meskipun peralatan senjata yang mereka pakai tidak cukup memadai. Disamping itu, pergerakan kebangkitan bangsa ini juga didorong oleh semangat kalangan muda dan dimotori oleh mereka. Semua kegigihan mereka ini telah berkulminasi dalam “sumpah pemuda” pada tahun 1928 dan direalisasikan dalam proklamasi 17 Agustus 1945.

Sejarah pergerakan bangsa ini memang telah mencatat peran besar para pemudanya dalam membentuk negeri. Suatu gerakan monumental yang mendorong terbentuknya negara Indonesia telah dilakukan oleh para pemuda, yakni Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928. Dengan kenyataan ini memang tidak mengherankan kalau muncul wacana untuk memberi kesempatan kepada kalangan muda untuk masuk ke dalam kepemimpinan nasional setelah kiprah

kalangan tua tidak memperlihatkan dinamika yang mengesankan bagi perubahan dan percepatan pembangunan bangsa. Wacana tersebut menguat setelah hadirnya fakta bahwa banyak dari pemimpin negara besar di dunia sekarang ini berasal dari kalangan muda. Rusia, Australia, dan bahkan Amerika telah dipimpin kalangan muda dalam lima tahun belakangan ini sehingga wacana tentang pemuda dalam kepemimpinan nasional memang fenomena yang wajar-wajar saja. Selain itu, pemuda itu biasanya di samping dari sisi tenaga mereka masih kuat, mereka juga mempunyai pikiran-pikiran segar yang bisa dijadikan bahan untuk pembangunan bangsa.

Bisa dikatakan bahwa wacana tersebut muncul karena kurang mampunya kalangan tua dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang agresif, sedangkan kalangan muda saat ini, pada sisi lain, telah merasa siap dan lebih bisa diandalkan untuk membangun bangsa ini. Kondisi pemuda seperti ini terbentuk oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang mudah diakses sehingga jika dilihat dari perkembangannya kalangan muda sekarang lebih dulu dewasa dan diperlengkapi dengan pengetahuan dan Keterampilan.

Secara umum, bisa dikatakan bahwa kalangan muda dalam konteks kepemimpinan ini adalah mereka yang masih berada pada usia 40 tahunan, atau lebih tepatnya di bawah 50 tahun. Usia seperti ini memang usia yang cukup produktif karena pada usia itu para pemuda juga telah dibekali oleh ilmu pengetahuan.⁷ Oleh karenanya, sebagai sumber daya manusia (SDM) bangsa mereka juga sebenarnya telah siap untuk memasuki kepemimpinan nasional. Kenyataan lain juga memperlihatkan bahwa para anggota legislatif yang menduduki posisi penting banyak juga berasal dari kalangan muda.

⁷ Rata-rata orang Indonesia, misalnya, menyelesaikan program pendidikan doktornya pada usia 40 tahun. Bisa dikatakan jarang dari mereka menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi tersebut di bawah umur 40 tahunan. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka justru menyelesaikan program pendidikan tersebut dalam usia di atas 40 tahunan.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya wacana seperti itu masih sulit direalisasikan. Dalam hal ini kalangan muda lebih bisa masuk terekrut ke dalam posisi pimpinan lewat media politik. Sementara itu, pada jabatan-jabatan yang profesional mereka masih mengalami kesulitan memasukinya karena jabatan karir harus dimulai dari bawah dengan seperangkat persyaratan yang menyertainya. Dalam jabatan seperti itu, kalangan muda tentu saja tidak bisa dalam posisi memimpin.

Selain itu, fakta lain yang menghalangi terealisasinya wacana tersebut adalah kenyataan atau adanya semacam penilaian umum bahwa pemuda sekarang sering dipandang apatis, dan cenderung mengandalkan hal-hal yang instan, senang berfoya-foya, dan lain sebagainya. Kenyataan ini telah membuat kalangan tua ragu untuk merekrut mereka ke dalam posisi penting apalagi menyerahkan kepemimpinan nasional kepada mereka karena posisi tersebut akan menentukan nasib bangsa ke depan.

Akan datangnya masa memimpin bangsa ini memang telah disadari terutama oleh kalangan muda yang menjadi aktifis organisasi kepemudaan atau organisasi sosial dan politik pada umumnya. Mereka juga menyadari bahwa diperlukan seperangkat persyaratan agar mereka sukses dalam memimpin bangsa ke depan. Kalangan muda memang akan dengan sendirinya memimpin bangsa ini jika waktunya sudah tiba karena mereka adalah kader bangsa yang akan menggantikan kalangan tua dalam memimpin bangsa ini.

Bagian ini akan menelusuri apa saja yang dipikirkan oleh kalangan muda sebagai persiapan mereka memimpin bangsa ini. Seberapa besar perhatian mereka kalangan muda terhadap permasalahan bangsa sekarang ini, dan apa persiapan mereka sebagai calon pemimpin bangsa. Analisis dalam artikel ini lebih didasarkan pada hasil observasi umum, seperti bisa dilihat melalui pergerakan organisasi kepemudaan atau juga berita-berita di media massa yang berkaitan dengan kepemudaan. Selain itu, dasar analisis juga berasal dari berbagai macam tulisan baik dalam buku maupun artikel yang

ditulis di berbagai media. Apa yang cukup penting berkaitan dengan sumber bagi analisis ini adalah hasil wawancara dengan beberapa tokoh pemuda yang pernah memimpin organisasi kepemudaan.

2.2.2 Orientasi Organisasi Kepemudaan

Indonesia merupakan negara yang bertabur organisasi. Tidak seperti di negara lain, Indonesia memiliki organisasi kepemudaan yang sangat banyak, mulai dari organisasi yang bersifat kedaerahan sampai pada organisasi politik. Setiap organisasi kepemudaan mempunyai ideologi, pola pikir, desain pengkaderan, dan lain-lainnya sendiri-sendiri. Organisasi pemuda ini juga berjalan tanpa induk, atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kesatuan organisatoris yang jelas. Padahal, seandainya ada induk organisasi yang berbentuk konsorsium tentunya kegiatan kepemudaan akan lebih menghasilkan atau berbuah nyata. Induk organisasi seperti itu penting karena dengan demikian akan ada yang mengatur dan menjaga, agar pergerakan mereka terkoordinir dan teratur. Organisasi seperti itu sebenarnya sudah ada yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan tetapi organisasi ini seperti cacat bawaan karena sejak kelahirannya ia lebih didasarkan pada tujuan politik daripada membina kepemudaan. Oleh karena itu, KNPI terutama di zaman Orde Baru bukanlah tempat yang tepat bagi para pemuda dan mahasiswa yang idealis.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dibentuk pada zaman Orde Baru oleh Pemerintahan Soeharto. Organisasi ini sejak awal telah dianggap sebagai alat penguasa yang dimaksudkan untuk mengekang para mahasiswa dan pemuda pada umumnya dari melakukan kritik terhadap Presiden Soeharto. Akibatnya, organisasi ini tidak maksimal dalam menjaring kader bangsa yang dapat menjadi pemimpin nasional ke depan karena banyak dari kalangan muda yang alergi dengannya. Para pemuda yang terjaring dan masuk ke dalam organisasi ini sudah dipastikan menjadi pendukung rezim Orde Baru Soeharto sehingga dengan demikian KNPI ini layaknya seperti musuh

bagi para mahasiswa dan para pemuda yang kritis terhadap Soeharto dan anti Orde Baru.

Namun saat ini, organisasi zaman Orde Baru tersebut sudah kurang terdengar lagi gaungnya sejak Presiden Soeharto lengser ke prabon pada tahun 1998. Menurut Idy Muzayyad,⁸ salah seorang mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), KNPI dalam konteks hari ini sudah tidak lagi relevan. Faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi KNPI sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pemuda dan tuntutan zaman sekarang. Dari sisi jiwanya, para pemuda saat ini lebih didorong oleh semangat kebebasan dan bekerja untuk masyarakat dan mereka sangat kritis terhadap setiap penyimpangan yang ada. KNPI tidak lagi relevan dan akan mati kalau ia tetap berorientasi politik yang bahkan untuk kepentingan penguasa.

Oleh karena itu, menurut Idy, KNPI yang saat ini memang masih ada, sebaiknya lebih diarahkan atau dijadikan sebagai konsorsium yang mewadahi beragam organisasi kepemudaan Indonesia. Meskipun sejak awal berdirinya KNPI telah mengakomodir kelompok Cipayung, yakni organisasi ekstra kampus yang terdiri dari HMI, PMII, PMKRI dan GMNI, hal itu dianggap tidak cukup karena keterwakilan para tokoh organisasi kepemudaan tersebut dalam KNPI hanya sebagai individu, sementara organisasi mereka tetap berada di luar pagar.

Selain KNPI, saat ini terdapat ratusan organisasi kepemudaan di Indonesia dengan orientasi yang beragam dan ideologi yang berbeda-beda. Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa memiliki induk organisasi pemuda yang jelas. Ada beberapa yang menjadi *underbow* dari partai politik tertentu atau organisasi massa, dan ada pula yang berdiri sendiri. Dengan kondisi seperti itu, menurut Idy lebih lanjut, organisasi pemuda yang tidak memiliki ikatan dengan organisasi massa ataupun partai politik manapun, sebaiknya membentuk satu

⁸ Wawancara dengan Idy Muzayyad, tanggal 1 Juni 2010 di Jakarta.

organisasi induk yang mengarahkan dan mengatur segala kebijakan yang mereka keluarkan agar tertib dan terkontrol, serta tidak asal-asalan. Langkah-langkah seperti ini juga baik untuk kaderisasi internal organisasi kepemudaan yang ada maupun untuk kepentingan kaderisasi kepemimpinan nasional.

Dengan adanya konsorsium semacam ini, organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dapat berjalan lebih harmonis dan tertib, dan lebih dapat diandalkan untuk regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Selain itu, KNPI, sebagai organisasi yang berada dalam kendali pemerintah dapat memantau pergerakan pemuda dan para tokohnya yang pro-aktif secara langsung bagi persiapan regenerasi. Pola regenerasi seperti itu memang belum ada, namun bisa dilakukan dan dimulai sekarang.

Seperti disebutkan di atas, jumlah organisasi kepemudaan di Indonesia memang cukup banyak, tetapi yang cukup dikenal oleh masyarakat bisa dihitung jari. Tidak banyaknya jumlah ini karena memang tidak banyak yang berlevel nasional dengan mempunyai program nasional yang jelas. Di antara organisasi pemuda, yang bisa disebutkan di sini adalah IPNU, PMII, HMI, IMM, GMNI dan PMKRI. Kehadiran organisasi ini mempunyai signifikansi yang cukup besar dalam mendukung kemajuan bangsa karena organisasi mereka merupakan untuk mendewasakan para pemuda melalui pemberian pengetahuan dan mempersiapkan mereka sebagai kader pemimpin bangsa. Di sini pengetahuan para pemuda yang tergabung dalam organisasi tersebut juga cukup baik karena mereka memang para pelajar. Sementara itu, dari sisi kepemimpinan banyak dari mereka ini yang terampil, mengingat organisasi mereka selalu mengadakan latihan kepemimpinan sehingga mereka juga siap untuk menggantikan para orang tua mereka.

Dengan demikian, para pemuda juga bisa memiliki pemikiran yang tidak kalah hebat dengan pemikiran yang dicetuskan oleh kalangan tua. Dengan melihat fakta yang ada, para pemuda atau kalangan muda bukan hanya memiliki pikiran-pikiran seperti

kalangan tua tetapi juga memiliki kelebihan yang justru bisa mengalahkan kepemimpinan kalangan tua. Dalam beberapa hal, para pemudamempunyai tingkat mobilitas yang lebih tinggi. Ini akan membantu mereka untuk bekerja maksimal dan teratur. Di samping itu, idealisme kalangan muda juga masih cukup besar, sehingga upaya pemberantasan segala macam korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan lebih berhasil ketika kepemimpinan diserahkan kepada mereka. Setidaknya mereka diberi sedikit porsi untuk ambil bagian dalam pemberantasan korupsi tadi. Dengan demikian, harapan terhadap kalangan muda mungkin masih cukup besar.

Organisasi kepemudaan dan atau mahasiswa yang ada di Indonesia sendiri memang mempunyai visi beragam. Beberapa organisasi bahkan ada yang memiliki perbedaan ideologi mendasar, mengingat banyak dari mereka berafiliasi dengan organisasi yang mempunyai paham tertentu atau bahkan berafiliasi kepada partai politik tertentu. Meskipun demikian, organisasi ini memiliki satu kesamaan, yaitu ingin memajukan bangsa. Mereka berkehendak dengan kuat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya. Disamping itu, mereka juga ingin memberantas kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan pendidikan mereka.

Dari sekian banyak kegiatan, salah satu yang rutin mereka kerjakan adalah latihan kekaderan. Latihan semacam ini memang merupakan bagian penting bagi keberlanjutan dan kemajuan organisasi mereka di masa depan. Melalui pengkaderan organisasi kepemudaan ini bukan hanya membekali kadernya dengan pengetahuan tetapi juga memberikan keterampilan dan bahkan memperkuat kohesivitas dan emosi kekelompokan mereka. Dengan demikian, organisasi mereka akan makin kuat dan berkembang.

Program pendidikan dan pengkaderan biasanya memang menjadi program unggulan dan utama organisasi kepemudaan. Bahkan untuk mendapatkan kader yang bagus dan kuat, para tokoh pemuda ini melakukan rekrutmen anggota baru secara ketat. Mereka

menyeleksi para anggota baru dengan menjalani beberapa tes. Setelah diterima pun, para anggota baru harus melewati beberapa proses seleksi, yang umumnya sudah dibakukan oleh organisasi, jika mereka ingin menjadi pengurus. Dengan pola seperti ini, para kader organisasi kepemudaan akan lebih siap memimpin.

Pembinaan seperti ini bukan hanya baku tetapi juga berkualitas. Bagi organisasi kecil dan belum memiliki pola yang baku, pengkaderannya dapat disatukan oleh satu konsorsium, seperti KNPI tadi, dan mereka kemudian mendapatkan pola pengkaderan baku bersama. Pola seperti ini akan berguna bagi semua pihak organisasi kepemudaan dan pada pihak lain. Sementara itu, masyarakat juga akan mengambil manfaatnya bagi regenerasi kepemimpinan nasional secara menyeluruh.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa organisasi pemuda sendiri tidak secara khusus diarahkan secara langsung untuk mencetak pemimpin nasional. Mereka semata-mata melakukan proses pengkaderan internal organisasi demi kepentingan organisasi itu sendiri agar mereka tetap berjalan dengan tetap memiliki kader-kader potensial yang dapat melanjutkan perjuangan organisasi. Namun demikian, dari sana-lah organisasi kepemudaan itu akan memberi sumbangsuhnya bagi penyiapan calon-calon pemimpin nasional yang kompeten, yang akan meneruskan perjuangan kalangan tua. Program pengkaderan inilah yang dapat menjadi landasan pacu organisasi untuk terus mencetak pemimpin bangsa. Dari sini pula-lah berangkat asumsi bahwa kaum pemuda pun bisa dan bahkan dapat menjadi lebih baik dari para pemimpin yang sudah ada.

2.2.3 Pemuda dalam Kepemimpinan Nasional

Di antara faktor yang menyebabkan masih jaranginya pemuda dilibatkan dalam kepemimpinan nasional adalah masih belum matangnya mereka baik dari sisi pikiran maupun kejiwaan. Selain itu, pengetahuan mereka pasti belum cukup dan sisi emosi mereka juga masih labil. Jadi, kalau ada pemuda yang berhasil masuk ke dalam

kepemimpinan nasional maka hal itu adalah karena ajakan personal berdasarkan *channeling* atau sistem kedekatan yang dimiliki oleh masing-masing pemuda secara perseorangan. Sistem ini dasarnya adalah kelincahan masing-masing pemuda sehingga rekrutmen ke dalam kepemimpinan kurang membuka peluang bagi pemuda yang lain, yang tidak memiliki kedekatan dengan seniornya yang telah menduduki jabatan tertentu.

Dengan makin banyaknya pemuda yang potensial, pemerintah harus memikirkan cara terbaik untuk merekrut mereka ke dalam kepemimpinan nasional. Komunikasi dengan organisasi kepemudaan harus terus ditingkatkan, setidaknya untuk memberi jalan *channeling* bagi mereka yang berprestasi. Hal inilah yang harus dibenahi oleh Pemerintah yang ada saat ini. Kesempatan bagi para pemuda untuk tampil dalam kepemimpinan nasional harus lebih besar dan jelas serta terbuka. Dengan demikian, pemuda-pemuda yang memiliki potensi pun dapat mengambil kesempatan tersebut. Hal ini penting karena beberapa hal.⁹

- (1) Potensi kepemimpinan mereka akan terlihat ketika mereka telah aktif secara langsung dalam praktik kepemimpinan nasional. Dengan berada pada posisi memimpin, mereka akan terdorong untuk mengaplikasikan langsung ide-ide segar yang mereka bawa.
- (2) Kepemimpinan nasional itu akan membutuhkan suatu regenerasi secara terus menerus sehingga dengan jalan yang terbuka lebar bagi pemuda ini regenerasi yang agak kurang berjalan baik selama ini akan diperbaiki.
- (3) Pemuda cenderung memiliki mobilitas yang lebih baik daripada golongan tua. Stamina yang mereka punyai akan membantu mereka melaksanakan pekerjaan secara lebih baik dan teratur. Diharapkan dari kondisi seperti ini akan lahir pikiran-pikiran segar.

⁹ Wawancara dengan Idy Muzayyad, tanggal 1 Juni 2010 di Jakarta.

- (4) Lebih dari itu, kepemimpinan nasional di Indonesia membutuhkan regenerasi secara menyeluruh, untuk menghilangkan sisa-sisa Orde Baru yang masih menempati posisi penting dalam kepemimpinan nasional. Pemuda-pemuda dapat mengisi posisi ini.

Untuk mengimplementasikan pikiran-pikiran ini, berbagai langkah bisa ditempuh agar keluar suatu kebijakan yang bisa dan tentu saja harus disetujui oleh berbagai pihak. Berkaitan dengan keanggotaan di parlemen, misalnya, perlu diberikan kesempatan adanya kuota persentase kursi yang tidak boleh diisi oleh golongan selain golongan pemuda. Dengan demikian, posisi untuk para pemuda yang berkeinginan mengisi tempat tersebut jelas tersedia, dan tidak diberikan hanya kepada mereka yang sudah memiliki ikatan dengan orang-orang yang berada di sana. Sekedar untuk membandingkan, pemberian persentase kursi untuk perempuan di parlemen ternyata bisa dilakukan.

Keinginan seperti itu memang agak sulit terlaksana, karena kalangan tua masih beranggapan bahwa pemuda tidak mampu, atau belum siap untuk menduduki posisi memimpin. Anggapan ini memang terasa klasik, setidaknya begitulah alasan kalangan tua, sehingga terasa agak dicari-cari. Meskipun demikian, kalau melihat kenyataan yang ada, lebih-lebih sekarang ini sudah banyak kalangan muda yang potensial maka kalangan tua yang menjadi para pemimpin tidak usah pesimis apalagi khawatir. Dengan kata lain, para pemuda sebenarnya juga sudah siap untuk ikut memimpin jika mereka diberi tempat dan kesempatan. Bahkan dengan memasuki kesempatan itu, menurut Idy Muzayyad,¹⁰ kemampuan mereka akan maksimal. Segala kemampuan akan mereka curahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tanpa kesempatan itu, tidak akan ada tempat untuk membuktikan kemampuan mereka.

Dengan kemungkinan seperti itu memang masuk akal kalau muncul aspirasi kalangan muda yang meminta pemerintah untuk

¹⁰ Wawancara tanggal 1 Juni 2010 di Jakarta.

memberikan kesempatan kepada mereka masuk ke dalam kepemimpinan nasional. Sebagian dari tokoh pemuda yang ada – meskipun terasa agak GR (gede rumongso) – meminta kepada pemerintah untuk memberikan semacam quota yang jelas bagi rekrutmen mereka ke dalam kepemimpinan nasional. Kelihatannya permintaan itu juga harus dipertimbangkan, karena dengan demikian akan memberi spirit kalangan muda untuk mempersiapkan diri. Kalau telah ada pikiran untuk memberi kuota kepada perempuan untuk duduk di parlemen, yang bahkan keputusan tersebut telah diperkuat melalui undang-undang maka kuota seperti itu bisa juga diberikan kepada kalangan pemuda, termasuk untuk memainkan peran sebagai anggota legislatif.

Kalau melihat tujuannya, maka hal yang utama berkaitan dengan didirikannya organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, adalah dimaksudkan untuk memberi pengalaman bermasyarakat kepada kalangan pemuda. Dengan pengalaman ini diharapkan para pemuda mempunyai pengetahuan dan bahkan Keterampilan yang bisa digunakan ketika mereka menjadi pemimpin dalam masyarakat. Kecenderungan seperti ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa banyak organisasi besar mempunyai organisasi kepemudaannya. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya, mempunyai beberapa organisasi kepemudaan dengan mempunyai bidang garapan yang berbeda-beda. Di lingkungan NU ada Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) dan yang lainnya. Demikian pula Muhammadiyah mempunyai Ikatan Pemuda Muhammadiyah dan yang lainnya.

Sejak awal, tujuan pembentukan organisasi kepemudaan di antaranya adalah untuk ikut memantau kebijakan Pemerintah dan berperan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik yang berasal dari golongan mayoritas maupun golongan minoritas yang kepentingannya sering dipinggirkan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, tidak seluruh organisasi tersebut terlibat dalam suatu ikatan dengan partai politik yang ada. Tidak adanya ikatan antara mereka ini bisa disebabkan karena tidak adanya partai politik yang memang mau

terikat dengan organisasi pemuda tersebut, atau bisa juga karena adanya kebijakan organisasi kepemudaan yang tidak memperbolehkan hubungan emosional langsung dengan organisasi yang terlibat langsung dalam politik praktis.

Dengan tidak adanya hubungan tersebut, beberapa organisasi yang memang tidak ada ikatan apapun dengan partai politik, terus membangun komunikasi nonformal kultural karena mereka merasa harus tetap menjalin hubungan dengan partai politik untuk kepentingan mereka. Artinya di sana tidak ada ikatan resmi antara keduanya, sehingga hubungannya hanya sebatas hubungan kultural atau silaturahmi. Meskipun demikian, pola ini tetap saja dapat membantu misi organisasi kepemudaan dalam kaitannya dengan “ikut mengontrol” kebijakan Pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditelorkan organisasi pemuda akan membutuhkan media dan kendaraan politik langsung yang dapat menyampaikannya kepada Pemerintah. Kedekatan mereka dengan partai politik bisa memberi mereka jalan yang dimaksud, dan dari hubungan-hubungan dengan partai politik inilah kepentingan kelompok pemuda yang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin bisa terlihat dan lebih jauh teraktualisasikan.

Dengan demikian, memang terlihat bahwa para pemuda membutuhkan mitra kerja, yakni partai politik. Pada umumnya, organisasi pemuda akan mendekati partai politik yang memiliki ideologi dan pemahaman yang sama. Hubungan dengan partai semacam ini akan terjalin secara lebih intim, sedangkan hubungan partai di luarnya hanya akan terjadi secara nonformal dan bersifat silaturahmi. Hubungan antara ikatan pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa dan juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang notabene berbasis NU kelihatan lebih dekat dan kuat karena kader IPNU memerlukan PKB sebagai saluran politik. Dengan hubungan ini, IPNU dapat “menitipkan” ide mereka, yang telah diambil bersama untuk kemudian diaplikasikan langsung dalam Pemerintahan yang sedang berjalan. Politik bukanlah area yang bisa dijangkau terlalu jauh oleh

organisasi pemuda sehingga harus ada perantara, mengingat para pemuda masih berada di luar pagar dan bahkan jauh dari aroma kekuasaan.

Keinginan para pemuda untuk masuk ke dalam kekuasaan memang cukup besar karena dengan masuk ke dalam jaringan itu bukan saja mereka bisa ikut mengatur negara tetapi juga karena hal itu bisa menguntungkan bagi karir mereka di masa mendatang. Partai politik adalah media untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, sehingga dengan demikian para pemuda tadi mencoba untuk mendirikan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Pada sisi lain, partai mempunyai kepentingan untuk menggalang kekuatan kalangan muda mereka, baik sebagai pendukung maupun sebagai tenaga pembantu dalam menggerakkan organisasi. Selain itu, partai politik tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi pemuda.¹¹ Dengan demikian, memang ada situasi saling membutuhkan antara kalangan muda dengan kalangan parpol karena bagi para pemuda berafiliasi dengan partai politik tersebut akan lebih memperjelas posisinya, setidaknya untuk masa depan mereka karena dengan demikian mereka seolah mempunyai kekuatan politik juga.

Meskipun demikian, menurut Fikri, apa yang harus diperhatikan oleh partai politik ketika membuat organisasi semacam ini adalah bahwa mereka tidak boleh menutup akses dari organisasi pemuda lainnya yang bukan berasal dari mereka.¹² Artinya, ketika ada sebuah organisasi pemuda yang membutuhkan mereka untuk bergerak, maka partai politik sebaiknya tidak menutup diri. Hal ini juga berhubungan dengan hal-hal lain seperti *recruitment* pada kepemimpinan nasional, atau kepemimpinan partai. Dalam hal ini partai politik seharusnya tidak hanya memberikan posisi strategis semacam itu kepada para pemuda yang berasal dari organisasi yang

¹¹ Sebagai contoh adalah PPP yang mempunyai organisasi pemuda bernama Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK).

¹² Fikri seorang pemuda yang sedang mengambil program S1 di Osmania University India (wawancara pada tanggal 10 Juni 2010).

secara ideologi sama dengan mereka, agar organisasi kepemudaan lain juga tetap dapat berjalan dengan sehat.

Untuk ini, partai politik harus melakukan perubahan paradigma berkaitan dengan kepemimpinannya. Partai politik harus melihat bahwa semua pergerakan kepemudaan dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan organisasi pemuda semata, apalagi untuk kepentingan pribadi. Meskipun demikian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pergerakan di dalam dunia politik bisa “menghalalkan” kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sehingga harus ada kebijakan *progressive* radikal untuk mengubah paradigma tersebut. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuka golongan luar (pemuda di luar organisasi *underbow*) untuk masuk, karena, dengan masuknya pihak luar dapat menjadi kritik buat internal partai dan bahkan dapat memperkaya baik tardisi dalam partai bersangkutan maupun pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara para tokohnya.

Langkah kedua adalah perlu adanya kerjasama antar ormas kepemudaan dengan dikoordinir oleh organisasi induk yang dibentuk bersama, seperti KNPI, sehingga dengan demikian kemampuan para kader bukan saja bisa diketahui bersama tetapi juga kader-kader yang bagus bisa dikirim ke instansi pemerintah yang membutuhkan. Ini dimaksudkan agar pendelegasian kepada kader untuk masuk ke dalam kepemimpinan nasional tidak dilihat dari mana kader tersebut berasal.

Kalau para pemuda punya perspektif dan harapan seperti itu maka yang harus mereka lakukan adalah mempersiapkan diri. Persiapan ini terutama berkaitan dengan memperkuat pengetahuan melalui kuliah di Perguruan Tinggi. Selain itu kesempatan ikut aktif dalam organisasi ekstra kampus juga harus digunakan sebagai media latihan tadi. Menurut Idy, mantan Ketum PB IPNU, “hal pertama yang harus dilakukan untuk berkontribusi terhadap bangsa adalah mereka harus bisa mengurus dirinya sendiri terlebih dahulu. Mereka jangan justru menjadi agen penghambat. Mereka bahkan harus menjadi agen perubahan. Mereka harus menghindari sifat-sifat

menunda-nunda pekerjaan dan bermalas-malasan, di samping juga membina diri dan karakter, seperti menjauhi maksiat, narkoba dan lain-lain. Setelah mereka bisa mengurus diri sendiri itulah, mereka bisa berkontribusi lebih banyak terhadap Negara”.

Diakui bahwa saat ini pemuda memang masih belum seluruhnya tercerahkan. Pemuda Indonesia lekat dengan sikap hedonisme, matrealistis dan konsumtif, dan tidak mencerminkan aktor atau agen perubahan. Alasan inilah yang lantas menjadi kekhawatiran golongan tua untuk mempercayakan kepemimpinan nasional, yang notabene adalah sebuah amanah dan tanggung jawab besar dari rakyat Indonesia, kepada pemuda. Dalam hal ini, pemuda cenderung masih labil dan emosional, seperti banyak terlihat dalam kenyataan di lapangan. Bahkan dengan makin sulitnya kehidupan, kelabilan para pemuda juga makin bertambah.

Untuk keperluan pembangunan, pemerintah yang punya otoritas dan peran penting dalam pembangunan haruslah merubah karakter kecenderungan pemuda Indonesia yang seperti ini. Upaya ke sana akan menyangkut berbagai hal, mulai dari menciptakan kegiatan sampai pada menata kembali apa yang sudah ada. Sebagai contoh, sebagian tayangan-tayangan di televisi merupakan salah satu pembentuk karakter pemuda yang kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam mengabulkan ijin tayang kepada televisi-televisi swasta nasional karena memang harus diakui, tayangan yang ada di televisi Indonesia sangat tidak mendidik. Maka untuk membentuk karakter pemuda yang baik, hal-hal tersebut harus dibantu oleh kinerja Pemerintah Indonesia secara langsung. Dengan terbentuknya Pemuda yang memiliki karakter yang kuat, pemerintah atau bangsa ini mempunyai modal utama bagi regenerasi untuk Indonesia yang lebih baik.

2.2.4 Pengaruh Lingkungan Strategis

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei, diperkirakan bahwa tahun-tahun ini sampai dengan

tahun 2015 merupakan “tahunnya pemuda”. Maksudnya adalah bahwa pada tahun tersebut angka pemuda mencapai angka yang cukup besar dari segi kuantitas, sehingga akan merupakan masalah jika pemuda Indonesia tidak siap dengan pengetahuan dan keterampilan, di samping tentu saja merupakan potensi nasional bagi pembangunan jika banyak pemuda yang bisa dimaksimalkan potensinya, termasuk untuk menjadi pemimpin nasional.

Namun menurut Idy,¹³ hal yang terpenting dari pemuda adalah bukan dari bagaimana jumlah mereka tetapi bagaimana mereka terlebih dahulu bisa mengurus diri sendiri. Jumlah pemuda yang besar, ketika mereka tidak bisa mengatur diri sendiri, justru akan menjadi beban bagi Pemerintah. Kemampuan mereka untuk menjauhi narkoba, mengenyam pendidikan yang cukup, dan lain-lain adalah aplikasi dari mengurus diri sendiri, sehingga harus ada sebuah keinginan dari pemuda agar mereka dapat menjadi generasi yang berguna.

Generasi saat ini adalah generasi yang sangat berkembang pesat, mengingat kemajuan iptek yang ada akan mendorong perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi, kemajuan di dunia teknologi juga bisa menjadikan masyarakat Indonesia menjadi pemalas dengan kehidupan mereka, di mana mereka lebih memilih hal-hal yang instant, yang kemudian menjadi karakter mereka. Watak seperti itu tentu saja tidak baik karena dalam realitas kehidupan tidak semua hal dapat didapat secara instant. Oleh karenanya, pemuda yang diperkirakan akan meningkat kuantitasnya ini seharusnya bisa menghindari hal-hal negatif semacam itu, sebagai langkah awal mereka dalam membantu kinerja Pemerintah.

Contoh lain yang bisa dikemukakan adalah masalah narkoba yang penggunaannya terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan pemuda, yang sangat potensial merusak mental pemuda Indonesia. Kinerja Pemerintah tentu saja sangat dibutuhkan untuk

¹³ Wawancara dengan Idy Muzayyad, tanggal 1 Juni 2010 di Jakarta

memberantas mafia narkoba di Indonesia. Apa yang pasti adalah bahwa semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan ini, dan anggapan tentang keterlibatan pihak berwajib dalam peredaran narkoba harus dihilangkan dengan bukti konkret. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah pemuda secara kuantitas ini harus diimbangi oleh kualitas yang memadai, sebab meningkatnya pemuda yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas justru akan menjadi beban yang besar bagi Pemerintah, dan terutama masyarakat Indonesia secara umum.

Pemuda saat ini sebenarnya cenderung apatis jika dilihat dari segi kontrolnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak menafikan sama sekali tentang masih adanya yang aktif baik dalam kehidupan politik kampus maupun politik pada umumnya mengingat di antara mereka ada juga yang magang dalam partai politik. Hanya saja, menurut Idy, dari perkembangan para aktifis pemuda yang ada terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan. Idy menegaskan bahwa “mereka kelihatannya begitu terpesona dengan demokrasi sebagai sistem yang perlu diterapkan di Indonesia. Efeknya adalah bahwa mereka sering membenarkan gerakan dan tingkahlaku mereka atas nama kebebasan”. Memang hal ini tidak menimpa pemuda secara keseluruhan, namun ini bisa menjadi isu jika dikaitkan dengan peran mereka ketika dibutuhkan oleh negara ini nanti. Paham kebebasan dalam berdemokrasi ini memang sering disalahartikan oleh sebagian besar pemuda dan masyarakat. Menurut Idy, “Saat ini, bukan hanya pemuda tetapi masyarakat pada umumnya cenderung liberal dan bebas yang bablas yang “semau gue” dan bergerak atas nama kebebasan tersebut. Artinya, masyarakat Indonesia masih banyak yang menelan mentah-mentah konsep kebebasan ini. Sebenarnya pada dasarnya, kebebasan ini juga terbentur atau dibatasi oleh aturan yang berlaku, terbentur tanggung jawab sosial yang melekat dan terbentur juga oleh hak-hak orang lain, sehingga sebenarnya kebebasan itu mempunyai keterbatasan”.

Jadi, “untuk hal ini, kita hanya bisa berharap pada kesadaran diri masing-masing. Pemerintah dapat membantu proses ini dengan

menjelaskan kembali konsep kebebasan yang sebenarnya, dan tidak justru ikut salah dalam mengartikannya. Kondisi saat ini berbeda sekali dengan zaman dahulu, ketika kebebasan ini tidak begitu massive dan meluas. Untuk menjaga nasib bangsa, Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah hal ini terus meluas karena dengan melihat kondisi Indonesia yang begitu plural, hal ini jika tidak ditangani akan mengancam moralitas dan pada sisi lain akan mengancam kesatuan bangsa sendiri”.¹⁴

Masalah praktik demokrasi yang kebablasan memang sedang mewarnai politik Indonesia, sehingga politik yang ada jauh dari etika dan bahkan menabrak batas-batas moralitas. Meskipun hal ini merupakan masalah umum, paham kebebasan yang tak terbatas ini lebih menonjol di kalangan pemuda. Idy dan Fikri, dua tokoh muda yang diwawancarai, mengakui kecenderungan ini, dan mereka bahkan menegaskan hal itu sebagai akibat dari pengaruh kejahatan globalisme. Kalangan muda menelan konsep kebebasan ini mentah-mentah, dan bertindak tidak sesuai dengan budaya atau “ala Indonesia” sehingga hal ini menjadi sorotan dan dijadikan alasan oleh kalangan tua sebagai bagian dari kelemahan pemuda untuk memimpin. Meskipun demikian, disadari oleh Idy bahwa ini adalah sebuah generalisasi karena pada dasarnya tidak semua pemuda bisa dikatakan seperti itu, dan mereka yang peduli dan jauh dari sikap-sikap seperti itu juga banyak. Apa yang harus dilakukan, oleh karenanya, adalah adanya tindakan dari Pemerintah agar paham demokrasi yang bablas tadi tidak melanda dan mencekoki kalangan muda.

Di luar kepemimpinan pemuda pada ormas kepemudaan, patut dicatat bahwa kondisi kepemimpinan nasional sekarang ini agak kurang kondusif bagi mempersiapkan pemuda sebagai calon pemimpin. Dengan kata lain, lingkungan strategis yang mengelilingi kehidupan pemuda tidak baik bagi perkembangan kepribadian mereka. Seperti diketahui, berbagai hal negatif sedang melanda

¹⁴ Wawancara dengan Fikri, 10 Juni 2010.

kepemimpinan nasional, mulai dari maraknya korupsi sampai pada hilangnya etika. Dalam hal ini oknum dalam kepemimpinan nasional, mulai dari aparatur pemerintah sampai pada para elit partai, seperti terlalu terlena dengan kebebasan yang diberikan oleh proses demokratisasi. Korupsi yang di zaman Orde Baru hanya terjadi pada kalangan tertentu birokrasi dan terbatas terjadi di kota besar seperti Jakarta, kini telah meluas sampai ke berbagai kabupaten. Selain itu, korupsi ini juga telah melibatkan kalangan lain, seperti anggota DPR atau DPRD, padahal dulu hal tersebut hanya dilakukan oleh kalangan birokrasi.

Selain itu, apa yang paling nampak dalam kepemimpinan nasional saat ini adalah hilangnya etika pada sebagian elit dan tokoh politik. Meskipun dalam teori selalu dikatakan bahwa politik memang tidak bisa bergandengan dengan etika, perkembangan perilaku politik yang jauh dari etika akan merusak masa depan kepemimpinan nasional sendiri, sebab etika itu mengatur masalah kepatutan yang semestinya dilakukan oleh para pemimpin dan bangsa yang beradab. Hilangnya etika ini bisa dibuktikan dengan beberapa contoh yang akan disebutkan di bawah ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik Indonesia banyak diwarnai oleh uang. Makanya, uang ini telah menjadi faktor dominan baik dalam memenangkan kepentingan politik maupun dalam melawan serangan atau ancaman-ancaman politik bagi para politisi dan banyak pemimpin bangsa ini. Merupakan pengetahuan umum bahwa baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah telah diwarnai oleh permainan politik uang dan bahkan cara-cara yang kotor. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa kepemimpinan dalam sebuah kabupaten atau provinsi tidak melahirkan produk atau program yang bermanfaat bagi rakyat. Dengan kata lain, terpilihnya para pemimpin baru di provinsi atau kabupaten tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran masih terus berkembang dan masyarakat pada umumnya masih tetap tidak berdaya.

Kemandekan seperti itu, kedengarannya wajar-wajar saja dan masuk akal dengan hadirnya politik kotor yang mewarnai daerah-daerah Indonesia. Para pemimpin dengan tangan kotor seperti itu tentu saja tidak akan bisa membersihkan masyarakat dan memberdayakan mereka karena para pemimpin tidak bisa membersihkan dirinya. Langkah pertama kepemimpinan mereka di kabupaten atau kota setelah mereka terpilih bukan bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin ini justru lebih berpikir untuk mengembalikan uang yang dia belanjakan selama pemilukada yang dia ikuti. Dengan pikiran-pikiran seperti itu mulai lah dia merancang proyek-proyek besar yang bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya.

Dengan situasi yang seperti itu, tidak mengherankan kalau banyak bupati dan gubernur yang terlibat korupsi dan masuk penjara. Situasi korupsi seperti ini cukup masif dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, untuk daerah Jawa Tengah saja pihak pengadilan menerima lebih dari seratus kasus gugatan dugaan korupsi selama dua semester pertama pada tahun 2010. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa masifnya perilaku korupsi dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini.

Situasi ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan, terutama birokrasi pemerintahan tidak kondusif bagi pembangunan bangsa ini karena tidak dilakukan “good governance” sehingga berbagai kebocoran terjadi di mana-mana. Dengan kondisi seperti itu, sebenarnya tidak mengherankan kalau Indonesia sering disebut sebagai negara terkorup. Akhir-akhir ini, masalah korupsi bukannya berkurang tetapi justru sebaliknya. Korupsi makin merajalela dan dilakukan oleh orang dari berbagai lembaga negara dan pemerintahan. Karena perkembangan semacam ini, tuduhan bahwa Indonesia adalah negara korup cukup masuk akal. Sebuah lembaga bernama Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong telah menegaskan tentang buruknya birokrasi Indonesia yang belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan dengan keadaan di tahun 1999. Penilaian ini didasarkan pada pandangan dan

pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), yang berpengalaman bekerja di Indonesia.¹⁵

Meskipun reformasi ikut mewarnai dan memperbaiki birokrasi, namun perbaikannya belum berhasil secara signifikan. Kesulitan ini di samping berpangkal pada mentalitas para birokrat sendiri yang jauh dari berubah, juga karena mereka kurang memanfaatkan sistem yang dirancang untuk mengatur pelaksanaan pembangunan. Sistem Manajemen Nasional, sebenarnya telah memberikan arahan manajerial untuk melaksanakan pembangunan melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Di zaman Orde Baru, kuatnya pemerintahan Suharto telah menyebabkan birokrasi menjadi tidak berdaya karena rasionalitas birokrasi menjadi tidak jalan. Akibat yang ditanggung dari masuknya birokrasi menjadi mesin politik yang artinya juga bermain politik sangat jelas. Seperti dikemukakan oleh beberapa pengamat, birokrasi seperti ini akan terjerembab ke dalam korupsi karena yang menjadi penjaga birokrasi bukan lagi pengawasan atau monitoring oleh lembaga yang kompeten tetapi politik kekuasaan yang dijalankan oleh Golkar saat itu. Kebocoran akhirnya terjadi di mana-mana dengan tanpa dikatakan itu sebagai kebocoran karena pemeriksaan tidak dilakukan dalam situasi yang wajar. Para inspektorat, misalnya, tidak berani menyatakan adanya kebocoran ketika hal itu dilakukan oleh para pejabat di departemen bersangkutan.

Melihat kenyataan di atas, orang patut pesimis dengan kepemimpinan di masa mendatang. Kalangan muda yang diharapkan akan menggantikan kalangan tua bisa jadi ikut tergoda dan meniru gaya yang dilakukan para kalangan tua. Apa yang pasti adalah bahwa lingkungan strategis yang saat ini mengelilingi kehidupan kalangan muda sebagai calon pemimpin nasional tidak kondusif atau tidak cukup baik karena berbagai kepemimpinan nasional mulai dari kepemimpinan dalam birokrasi sampai pada kepemimpinan di

¹⁵ Lihat Safuwani, *Model Reformasi Birokrasi Indonesia*.

lembaga legislatif dan partai politik telah ditandai oleh jauhnya moralitas dan etika dalam diri para pemimpin tersebut.

2.3 Penutup

Kalau sejarah perjuangan bangsa Indonesia ditandai oleh kiprah besar para pemudanya, maka pembangunan bangsa Indonesia yang merdeka seharusnya pula ditopang oleh kiprah para pemudanya. Kiprah pemuda dalam pembangunan bangsa ini memang merupakan keharusan, akan tetapi masalahnya adalah bahwa para pemuda masih mempunyai keterbatasan gerak karena yang leluasa melakukan pembangunan tersebut adalah kalangan tua yang selama ini menjadi pemimpin bangsa ini. Kiprah pemuda dalam hal ini terbatas pada partisipasi, yang meskipun sepertinya kurang berarti tetapi mempunyai makna besar sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap bangsa Indonesia.

Memang disadari bahwa untuk bisa berkiprah maksimal dalam pembangunan bangsa, para pemuda harus ikut terlibat dalam kepemimpinan nasional, mulai dari merancang program sampai pada melaksanakannya. Sebenarnya tidak ada masalah berkaitan dengan hal ini karena kalangan pemuda juga siap baik dari sisi pengetahuan maupun Keterampilan yang diperlukan. Setidaknya, dengan melihat kualitas kalangan muda sekarang memang tidak diragukan bahwa mereka siap untuk ikut ambil bagian dalam kepemimpinan bangsa ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah kurangnya inisiatif atau bahkan kerelaan kalangan tua yang sedang memimpin untuk memberikan kesempatan kepada kalangan muda untuk ikut ambil bagian dalam kepemimpinan nasional.

Keengganan kalangan tua mengikut sertakan kalangan muda dalam kepemimpinan nasional juga bisa diterima akal, mengingat dari sisi kejiwaan para pemuda masih labil dan emosional. Sementara itu, kepemimpinan nasional memerlukan bukan saja pengetahuan dan Keterampilan melainkan juga kearifan dan kematangan jiwa, karena hal itu menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Meskipun

demikian, dan lepas dari bisa dipahaminya alasan kalangan tua, kematangan jiwa sebagian kalangan muda dalam kesiapan mereka untuk ikut ambil bagian dalam kepemimpinan nasional sebenarnya juga bisa dibuktikan. Para pemuda ini, di samping dari sisi pengetahuan cukup memadai, mereka juga cukup terlatih menangani masalah-masalah kepemimpinan dan manajerial, setidaknya mereka mempunyai pengalaman berorganisasi.

Cukupnya pengetahuan pemuda ini bisa dilihat dari kemajuan pendidikan Indonesia yang telah menghasilkan kalangan terpelajar yang berketerampilan. Banyak dari mereka yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi bahkan sampai jenjang strata tiga. Dalam soal kepemimpinan, mereka terlatih karena masalah-masalah seperti itu merupakan kerja mereka dalam membangun organisasi kepemudaan dan pembinaan para kadernya. Oleh karenanya, sebenarnya bisa saja dicoba mengikutsertakan mereka dalam kepemimpinan dengan cara merekrut mereka yang berprestasi dan berketerampilan serta berwawasan kebangsaan yang luas.

Dengan kenyataan atau kecenderungan seperti itu, mempercayakan kepemimpinan nasional kepada para pemuda adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Keraguan yang selama ini tertanam pada *mindset* masyarakat, terutama golongan tua, bahwasanya pemuda masih kurang mampu menjalankan roda kepemimpinan mungkin tidak beralasan. Terlebih, dalam kehidupan praktis bermasyarakat tidak ada kesempatan yang jelas yang selama ini diberikan kepada para pemuda. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan adalah memberikan kesempatan tersebut kepada para pemuda yang potensial. Namun untuk itu semua, pemuda sendiri secara umum harus bisa memperbaiki citra mereka. Gambaran pemuda yang berkarakter atau kecenderungan bermental instant dan konsumtif adalah satu kelemahan yang menjadikan mereka kurang dipercaya oleh masyarakat tentang kemampuannya.

Lepas dari perlu diikutkannya kalangan muda dalam kepemimpinan nasional atau tidak, keberadaan para pemuda sebagai

bagian dari bangsa sebenarnya telah mendudukannya sebagai kader yang suatu saat pasti memimpin. Mereka pasti akan menggantikan kalangan tua untuk meneruskan kepemimpinan nasional dengan membawa bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Masalahnya adalah hanya soal waktu saja, sementara soal kesempatannya adalah pasti. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan kalangan muda adalah mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan pengetahuan yang diperlukan serta mengasah Keterampilan berorganisasi dan yang lainnya.

Persiapan pembekalan kalangan muda untuk memimpin ini memang keharusan, lebih-lebih tantangan yang mereka hadapi di masa depan cukup besar. Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap akan menandai masa depan bangsa, setidaknya hal tersebut tidak akan terhapuskan dalam waktu sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Selain itu, tantangan yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih besar dan bahkan rumit karena ancaman yang muncul bukan hanya berupa serangan fisik oleh bangsa lain atau kurang sejahteranya masyarakat tetapi juga oleh hadirnya terorisme dan ancaman meluturnya moralitas pada umumnya. Hal ini diakui sendiri oleh pemerintah bahwa tantangan atau ancaman di masa depan bukan hanya berupa ancaman konvensional seperti invasi dari negara lain tetapi juga ancaman dalam bidang moralitas, yang secara pelan tapi pasti bisa menghancurkan bangsa.

Selain hal-hal di atas apa yang juga cukup penting bagi kepemimpinan para pemuda (sekarang ini) di masa mendatang adalah realitas politik nasional sendiri, di mana demokratisasi telah memunculkan efek yang tidak diharapkan. Ini artinya bahwa mereka harus siap untuk merubah kondisi ini ketika mereka memimpin nanti. Dikhawatirkan bahwa mereka tidak akan sanggup menanggulangi masalah ini, karena bukan saja masalahnya akan menjadi tambah ruwet tetapi pada masa sekarang saja mereka sendiri, seperti dikemukakan oleh Idy dan Fikri di atas, bahkan ikut terjerumus ke dalam praktik demokratisasi yang kebablasan. Seperti disadari hiruk pikuk politik Indonesia dalam perjalanan reformasi selama sepuluh

tahun telah menimbulkan rasa khawatir pada sebagian orang, karena perkembangan politik tidak sejalan dengan semangat reformasi yang di arahkan untuk memperbaiki segala yang buruk pada masa sebelumnya. Berbagai perubahan struktural sebagai bagian dari reformasi memang telah dilakukan dan terjadi secara signifikan. Akan tetapi, perubahan dalam bidang kultural bukan saja lambat terjadinya tetapi juga bahkan seperti mengarah kepada arah yang salah. Mindset para politisi Indonesia tidak atau belum lagi berubah menjadi reformis. Mereka justru berlaku dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan semangat pembangunan.

Beberapa contoh tentang tidak kondusifnya demokratisasi yang kebablasan adalah berkembangnya politik uang dalam setiap kegiatan politik penting. Pemilu legislatif dan pemilukada adalah dua medan yang biasanya uang beredar begitu besar. Dalam hal ini terjadi dua pihak yang saling membutuhkan. Pada satu pihak adalah para politisi yang memberikan uang, dan pada pihak lain adalah masyarakat yang menerima uang tersebut. Selain politik uang, apa yang marak dalam demokratisasi adalah endemiknya korupsi. Dulu korupsi hanya dilakukan oleh segelintir elit di Jakarta, sekarang ini korupsi sudah endemik di mana-mana, yang mana hal itu terjadi di semua kabupaten dan kota. Apa yang nampak dari contoh kasus ini adalah bahwa di sana terdapat tindakan-tindakan yang melanggar etika dan moralitas bangsa. Dengan kata lain, di sana sedang terjadi apa yang biasa disebut sebagai demoralisasi yang juga melanda sebagian masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan politik di Indonesia melalui demokratisasi kelihatannya tidak bisa dibiarkan apa adanya. Demokratisasi yang pada dasarnya membuka tabir kebebasan bagi rakyat untuk menggunakan hak-haknya ternyata memerlukan persyaratan lain agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Demokrasi sebagai mesin memerlukan sarana jalan yang sesuai agar dia bisa berjalan atau bahkan berlari dengan cepat dan mencapai sasaran. Untuk di Indonesia, sarana untuk itu nampaknya masih belum terpenuhi, sehingga proses jalannya demokrasi ini atau bahkan

arahnya seperti menjali melenceng. Kasus politik uang adalah yang paling nyata dan kentara. Hal ini bukan saja menunjukkan tingkat moralitas para politisi atau calon politisi dan pemimpin bangsa pada umumnya tetapi juga terjadi demoralisasi di kalangan masyarakat.

Demoralisasi semacam ini memang berongkos besar. Di antara yang paling nyata adalah menonjolnya kepentingan pribadi para politisi atau kepentingan golongannya. Dalam hal ini kepentingan bangsa menjadi dinomor duakan. Tujuan pembangunan nasional juga akhirnya kurang diperhatikansehingga hal itu telah memunculkan tindakan saling berebut untuk menguntungkan pribadi daripada untuk kepentingan bangsa. Di sana pula konflik akhirnya tidak terhindarkan, karena masing-masing individu benar-benar mencari keuntungan bagi dirinya dan berusaha mendapatkannya dengan memakai beragam cara.

Dengan kenyataan seperti ini, harus diakui bahwa agenda kerja para pemuda ketika mereka memimpin akan cukup besar dan berat. Meskipun demikian, kerja keras dan motivasi yang kuat untuk membangun bangsa akan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, lebih-lebih para pemuda sekarang ini diperlengkapi dengan pengetahuan dan Keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri dengan pengetahuan serta memperkuat niat dan spirit untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Daftar Pustaka

- Antara News. 2009. *Pengamat: Indonesia Minim Pemuda yang Jadi Pemimpin*. 29 Oktober.
- Anshori, Mahfud. *Peran Pemuda dalam Kepemimpinan Masyarakat Sipil*. www.scribd.com/doc
- Bachtiar, Asep Purnama. 2002. "Kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah." *Suara Merdeka*. 9 Juli.

- Baswedan, Anis. *Kepemimpinan Pemuda Abad 21 Memerlukan Kompetensi Tinggi*. <http://ppsdms.org/kepemimpinanpemuda/abad21>
- Berten, K., 1999. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beauchamp dan Norman E, Bowie. 1997. *Ethical Theory and Bussiness*, New Jersey: Prentice Hall.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lemhannas RI, 2010. *Bidang Studi/Materi Pokok: Bidang Studi Kepemimpinan Nasional, sub BS Kepemimpinan Kontemporer*.
- Pennock, J. Rolland. 1979. *Democratic Political Theory*. New Jersey: Princeton University Press.
- Soebhan Syafuan Rozi, *Model Reformasi Birokrasi Indonesia*, PPW-LIPI Jakarta
- Sudarsono, Juwono, *Refleksi Satu Abad Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Ketahanan Nasional*.
- Saidi, Anas (Ed.) 2006. *Pemberantasan Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih*. Jakarta: LIPI Press.
- Thompson, Dennis F. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Turmudi, Endang. 2001. "Etika, Etos dan Budaya Kerja." Dalam Muhammad Hisyam (Ed.) *Indonesia Menapak Abad 21 dalam Kajian Sosial dan Budaya*. Jakarta: Peradaban.
- , 2002. "The Challenge of Democratization in Indonesia's Multicultural Society." Dalam Chaiders Bamualim (Eds.) *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Conrad Adenauer Stiftung.

BAB III

ALIH KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA DALAM TUBUH PARTAI POLITIK DI DAERAH

3.1 Pengantar

Bab ini akan menguraikan terjadinya proses alih kepemimpinan kepada generasi muda dalam tubuh partai politik di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bagian pertama akan mengurai temuan penelitian alih generasi di tubuh partai politik Golkar dan bagian kedua mengupas alih generasi kepemimpinan di tubuh partai politik partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) Kota Manado, Sulut. Bagian ini ditulis oleh Henny Warsilah dan Dede Wardiat.

3.2 Alih Kepempinan Generasi Muda dalam Partai Politik Golkar dan PDI-P Kota Manado: Pertarungan Antara Kapitalisasi dan Ideologi

3.2.1 Pendahuluan

Baru saja kita melalui pemilihan umum (Pemilu) Legislatif republik Indonesia (RI) pada 9 April 2009 dengan cukup sukses. Ratusan wakil generasi muda tampak mencalonkan diri menjadi kandidat calon legislatif, walau secara jumlah masih didominasi oleh calon dari generasi tua. Keengganan generasi muda untuk muncul dikancah politik praktis dipersonifikasikan melalui fenomena golongan putih, “golput”, atau warga yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak berpartisipasi dalam pemilu. Padahal pada tahun 2015, negara Indonesia akan memasuki era baru yang ditandai dengan *konsolidasi demokrasi*. Selain itu, para ahli kependudukan memprediksi bahwa di tahun 2015 mendatang, penduduk golongan muda akan mencapai puncak pertumbuhan (*peak*). Kondisi ini tentu

memberikan dampak positif dimana puncak pertumbuhan generasi muda potensial menyumbang terhadap pembentukan masyarakat sipil, *civil society*, yang akan tampil menggantikan generasi sebelumnya memimpin negara.

Fenomena golongan putih (golput), tampaknya perlu mendapat perhatian khusus karena golput dipengaruhi juga oleh kesadaran memilih hingga skeptisme atau ketidakpedulian warga. “Memilih dan tak memilih itu oleh masyarakat dianggap sama, dahulu ada kesan kalau tidak memilih takut seolah olah ada sanksi sekarang sama saja. Akibatnya mereka kurang peduli dan cenderung tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saat ini, golput seolah-olah adalah hak. Wacana golput setidaknya menjadi sebuah momok politik karena mereka merasa punya hak, tidak datang atau datang itu urusan mereka”.¹⁶

Munculnya gelombang golput, yang kebanyakan berasal dari kelompok muda dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) di pelbagai daerah, merupakan cermin dari penolakan generasi muda terhadap sistem kepartaian dan kepemimpinan yang ada. Dipihak lain, gelombang globalisasi dunia yang menjadikan dunia seolah tanpa batas telah menempatkan penduduk golongan muda berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka mampu mengembangkan kapasitas diri lebih dari kondisi awal, dan berinteraksi secara tidak terbatas melalui berbagai teknologi informasi yang canggih. Tetapi, pengaruh globalisasi juga membawa dampak ikutan, seperti budaya konsumtif, budaya menerabas, *easy going* (menggampangkan cara), anarkisme dan radikalisme.

Kondisi golput atau ketidakpedulian generasi muda ini berimplikasi terhadap ketidaksiapan mereka untuk mengambil alih roda kepemimpinan. Selain itu, generasi muda menghadapi beberapa kendala struktural dan kultural. Kendala struktural yang berkaitan dengan generasi muda berupa rendahnya pendidikan dan

¹⁶ Wisnumurti, websitebalipemilu.com

produktivitas, tingginya angka pengangguran, usia kawin muda dan perceraian serta dominasi parpol (dan negara) yang terlalu kuat dan rendahnya akses terhadap sumberdaya sosial politik. Sementara kendala budaya yang melekat pada generasi muda dan menjadi penghalang untuk mengembangkan kapasitas dan identitas untuk menjadi seorang pemimpin, keberlakuan budaya apatis, anarkis, radikal, konsumtif, koruptif, budaya menerabas, dan budaya menggampangkan cara.

Kendala struktural yang berasal dari luar generasi muda berupa hambatan politik dalam proses rekrutmen kepemimpinan muda dan kuatnya kebijakan parpol yang kurang mengapresiasi kaum muda. Sementara itu, hambatan budaya yang berasal dari luar diri generasi muda menjadi penghalang untuk mengembangkan kapasitas dan identitas penduduk golongan muda. Warisan negatif dari politik Orde Baru (Orba), seperti politik uang (*money politics*) dan generasi penurut (*yes man*) dan asal bapak senang (ABS), politik authoritarianisme, dan oligarki kekuasaan di mana kekuasaan hanya berpusat pada segelintir elite parpol yang memiliki hubungan keluarga atau didasarkan pada kedekatan personal atau pada kekuatan kapital uang. Kondisi ini berimplikasi terhadap terjadinya resistensi terhadap perubahan atau tetap mengangungkan *statusquo*. Munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap model kepemimpinan yang berjalan saat ini, dan munculnya sikap apatis ditunjukkan oleh keengganan generasi muda untuk ikut terlibat dalam politik praktis seperti berpartisipasi dalam kepengurusan parpol atau mengajukan diri sebagai calon ketua.

Padahal, kebebasan untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat terbuka luas dan diakomodir oleh pemerintah pusat dan daerah. Melalui keterlibatannya dalam berbagai macam partai politik, partisipasinya dalam pemilihan umum, baik untuk anggota parlemen, pemilihan presiden langsung dan proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), masyarakat Manado tampak mulai mempunyai akses pada negara (pemerintah). Namun demikian, tetap saja peluang

generasi muda dalam tubuh parpol untuk naik ke jenjang kepemimpinan tidak semudah menaiki tangga pada umumnya.

Jumlah penduduk golongan muda di Kota Manado akan mencapai puncak pertumbuhan (*peak*) pada tahun 2015 mendatang dan jumlahnya diperkirakan dapat mencapai 40% lebih. Jumlah yang besar ini, selain merupakan aset bagi Kota Manado khususnya, dan Provinsi Sulut umumnya, juga akan membawa persoalan yang cukup rumit. Kondisi ini, berdampak positif yakni akan terjadi puncak pertumbuhan generasi muda potensial yang menyumbang terhadap pembentukan masyarakat sipil (*civil society*). Diperkirakan penduduk golongan muda, atau kita sebut saja generasi muda, pada tahun 2015 mendatang akan tampil mengambil alih kepemimpinan generasi sebelumnya di semua sektor kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Generasi muda merupakan salah satu komponen *stakeholders* yang perlu dilibatkan dalam pembangunan tingkat nasional dan regional serta lokal karena mereka memiliki sumber daya berupa modal sosial (*social capital*) dan modal budaya (*cultural capital*) yang potensial untuk mendukung keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan dalam dunia politik. Oleh karena itu, ketika wacana presiden dari kaum muda mulai merebak dalam Pemilu Presiden tahun 2009 lalu, "pertarungan" politik antara generasi muda dan tua mulai dapat dilihat dalam Pemilu Presiden (Pilpres) maupun pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serta pemilu legislatif.

Indonesia pada saat ini sangat memerlukan pemimpin muda dalam pengertian yang substansial. Mereka yang berpikir "muda" dan tidak alergi terhadap perubahan serta memiliki komitmen dan visi yang tangguh membawa bangsa keluar dari keterpurukan akibat kemiskinan dan korupsi yang membelit bangsa ini. Mereka yang mampu berkata "*say no for corruption*" dan "... *go to hell with your aid*" terhadap setiap pola komunikasi yang melahirkan keterpurukan ekonomi dan ketergantungan bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di dunia.

Pemimpin dari kalangan muda memang sedang menjadi tren. Mereka berasal dari generasi baru dan dianggap memiliki visi perubahan yang bisa diandalkan. Presiden Barack Obama yang fenomenal di Amerika Serikat yang baru saja berkunjung ke Indonesia bisa menjadi cermin kepemimpinan kaum muda yang kapasitasnya tidak diragukan lagi. Namun bagaimana halnya dengan kepemimpinan generasi muda di tubuh partai politik Indonesia, apakah peralihan kepemimpinan di tubuh parpol dari generasi tua ke generasi muda dapat terjadi?-Hambatan apa yang menyebabkan regenerasi kepemimpinan di tubuh parpol itu tidak terjadi dan upaya apa yang dilakukan generasi muda untuk mencapai kedudukan pada *layer* pertama dalam tubuh parpol? Dan ciri-ciri serta kualitas kepemimpinan seperti apa yang ditampilkan generasi muda di dalam parpol? menjadi permasalahan penting untuk diteliti. Penelitian atas partai politik Golkar dan PDI-P di Kota Manado berupaya menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian diatas.

3.2.2 Pendekatan Teori

Alih kepemimpinan dalam penelitian ini akan dilihat dalam perspektif politik dan sosiologi. Perspektif politik (kekuasaan) digunakan untuk memberikan penjelasan bahwa alih kepemimpinan dan orientasi politik berada dalam pengaruh kuat struktur sosial (posisi aktor atau warga dalam struktur sosial/partai politik).¹⁷ Sementara itu, perspektif sosiologis digunakan untuk menjelaskan struktur sosial dari generasi muda (konsep generasi muda secara sosial) dan partai politik yang diteliti serta peran dan orientasi politik warga dalam bingkai demokrasi dan desentralisasi.

3.2.3 Konsep Generasi Muda

Generasi muda adalah kata yang mempunyai banyak pengertian, namun mengarah pada satu maksud yaitu kumpulan

¹⁷ Struktur sosial yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi politis dibahas pada tahun pertama (2010) penelitian ini.

orang-orang yang masih mempunyai jiwa, semangat, dan ide yang masih segar/muda dan dapat menjadikan negara ini lebih baik, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang visioner. Bahkan revolusi suatu bangsa itu biasanya didobrak oleh generasi mudanya. Terlepas dari apakah pemuda itu perlu digolongkan berdasarkan umur atau tidak.

Secara konseptual, definisi mengenai generasi muda dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dari aspek biologi, aspek budaya, aspek hukum, dan politik, serta aspek psikologis. Pada dasarnya, generasi muda adalah manusia yang berusia antara lima belas hingga empat puluh tahun. Demikian pula dalam hal semangat dan idealisme, generasi muda dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kreativitas dan gagasan baru dalam memandang suatu permasalahan.¹⁸ Dilihat dari sudut ideologi, generasi muda adalah golongan pengganti penerus generasi terdahulu, dalam hal ini berumur antara 18-30 tahun dan kadang-kadang hingga usia 40 tahun.¹⁹

Dari aspek agama, generasi muda yang agamis ditandai dengan laku dan tindak dari pemuda yang dilandasi oleh moral normatif agama. Generasi muda yang agamis menurut Azyumardi Azra dapat dilihat dari tiga kategori, *pertama*, generasi muda yang memiliki visi, yakni generasi muda yang mau membangun tradisi intelektual dan wacana pemikiran melalui *intellectual enlightenment* (pencerahan intelektual) dan *intellectual enrichment* (pengkayaan intelektual). Strategi pendekatan yang digunakan ialah melalui pemaksimalan potensi kesadaran dan penyadaran individu yang memungkinkan terciptanya komunitas ilmiah. *Kedua*, generasi muda yang memiliki nilai, yaitu berupa usaha untuk mempertajam hati nurani melalui penanaman nilai-nilai moral agama sehingga terbangun pemikiran dan konseptual yang mendapatkan pembenaran dari Al-Qur'an dan kitab suci lainnya. *Ketiga*, generasi muda yang

¹⁸ Azra, Azyumardi, 2000.

¹⁹ N. Daljoeni, 1976. *Konsep Generasi Muda*, hlm. 76.

memiliki keberanian dalam melakukan aktualisasi program, misalnya dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan masyarakat dan keberpihakan dalam pemberdayaan umat.²⁰

Potensi generasi muda seringkali belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan pelibatan generasi muda pun cenderung dimobilisasi untuk kepentingan elite atau parpol tertentu. Padahal, dari segi kuantitas, generasi muda sebenarnya merupakan satu representasi dari kekuatan politik tersendiri yang mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dilihat dari segi kebutuhan, generasi muda adalah sumber daya manusia bagi masa yang akan datang. Sebagai potensi daerah dan bangsa, generasi muda perlu dipersiapkan agar berpartisipasi aktif dan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam berbagai proses pembangunan daerah atau nasional. Generasi muda seharusnya tidak hanya dijadikan obyek, tetapi juga ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan.

3.2.4 Peran Pemuda dan Pembangunan Politik

Globalisasi yang turut membawa konsep baru dalam pola hubungan negara (*state*) dan masyarakat (*society*) menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi terjadinya demokratisasi di sejumlah negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Negara, kini tidak lagi dipandang sebagai organisasi yang harus mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Pandangan terhadap negara mulai bergeser dengan menempatkan negara menjadi suatu otoritas yang berperan sebagai fasilitator bagi berbagai kepentingan di masyarakat. Konsep ini menempatkan masyarakat dalam posisi yang sejajar dalam konteks hubungan negara dan masyarakat.²¹

Pergeseran konsep *government* menjadi *governance* seolah mendapatkan bukti empirik dengan gagalnya konsep pembangunan yang sentralistis dengan pendekatan *top-down planning*. Sebagai

²⁰ Idem, Azra, Azyumardi, 2000.

²¹ Lihat Anthony Giddens

antitesis, berkembanglah kajian-kajian mengenai desentralisasi yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan partisipatif dan *bottom-up planning* dalam pelaksanaan pembangunan. Demokratisasi dalam level lokal inilah yang dalam perkembangannya kemudian mendorong perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi lebih desentralistik. Pembangunan (perkembangan dan perubahan) dalam tubuh parpol seharusnya mengacu kepada nilai desentralisasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, bukan selalu sentralistik sesuai yang digariskan parpol di tingkat pusat.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan dalam kerangka *governance* mensyaratkan adanya partisipasi seluruh *stakeholders* dalam proses pembangunan daerah. Melalui pembangunan daerah yang partisipatif, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi masyarakat sehingga hasil perencanaan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlibat pada saat pelaksanaan suatu program, tetapi sejak tahap awal perumusan dan perencanaan program. Demikian halnya dengan dunia politik, khususnya partai politik.

Secara umum, peran nyata para generasi muda Indonesia dalam pembangunan dan perkembangan ideologi dan demokrasi mencakup lima (5) gelombang nasionalisme di Indonesia, yang dapat dikatakan berulang hampir 20 tahun sekali dan dapat kita lihat melalui perjalanan sejarah nasional bangsa Indonesia. Dimulai, sejak kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, kemerdekaan 1945, bangkitnya Orde Baru 1966, dan bangkitnya Orde Reformasi 1998. Sejak akhir dekade 1990-an, telah terjadi berbagai fenomena yang mendorong perubahan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam bernegara, termasuk tata pemerintahan.

Generasi muda atau pemuda adalah penentu perjalanan bangsa di masa berikutnya. Generasi muda mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah, selain semangat mudanya, sifat kritisnya,

kematangan logikanya dan ‘kebersihan’-nya dari noda orde masanya. Generasi muda tidak jarang, dianggap sebagai motor penggerak utama perubahan sosial. Generasi muda diakui perannya sebagai kekuatan pendobrak kebekuan dan kejemuan masyarakat.

Peran generasi muda dalam Nasionalisme Gelombang Kelima melahirkan Orde Reformasi 1998 dengan cara menumbangkan Rezim Orde Baru (Orba) yang telah berkuasa selama 32 tahun. Berakhirnya kekuasaan Orba terutama diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kondisi krisis ini, kemudian ditindaklanjuti oleh gerakan mahasiswa untuk melengserkan kekuasaan otoriter Orba. Para generasi muda dan utamanya adalah mahasiswa berhasil menjatuhkan mantan presiden Soeharto dari kursinya pemerintahannya.

Walau telah sukses melengserkan pemerintahan Orba, tidak berarti generasi muda berhenti melakukan gerakan sosial karena dalam orde reformasi sekarang ini, para generasi muda dan mahasiswa perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam membangkitkan kembali nasionalisme gelombang berikutnya. Nasionalisme yang perlu diwujudkan pada gelombang berikutnya adalah nasionalisme yang humanis, anti korupsi, dan menjadikan hukum, dan hak asasi manusia (HAM) sebagai panglima.

Peran generasi muda dalam pembangunan sering terkendala oleh berbagai permasalahan dan tantangan, misalnya dengan munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan generasi muda seperti masalah terorisme, anarkisme, radikalisme, korupsi, dan konflik/tawuran di antara mereka yang masih sering terjadi. Jika permasalahan tersebut tidak memperoleh perhatian atau penanganan yang sesuai dengan konsepsinya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang luas dan mengganggu kesinambungan dan kestabilan dalam proses pembangunan.

Peran generasi muda dalam menorehkan sejarah penting bagi negeri sudah diakui, seperti telah di urai di atas. Sebagai contoh gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia yang pernah terjadi sejak pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi mampu menumbangkan rezim besar seperti Soekarno dan Soeharto, semua itu diawali dari ide segar dan semangat juang dari kaum muda yaitu mahasiswa.

Namun demikian, permasalahan lainnya terkait dengan generasi muda adalah ketahanan budaya dan kepribadian di kalangan generasi muda yang sering distigmakan sudah semakin luntur, yang disebabkan cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi diberbagai aspek kehidupan yang sangat mempengaruhi daya saing generasi muda. Akibatnya, generasi muda baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mempunyai Keterampilan, baik bersifat keterampilan praktis maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing dengan generasi muda yang berasal dari belahan dunia lain.

Menurut Samuel Huntington (1971) peran generasi muda itu akan fungsional jika saja pembangunan politik atau modernisasi politik terjadi, terutama di dalam organisasi partai politik. Untuk sebagian ilmuwan, konsep pembangunan politik lebih memberi fungsi legitimasi di masyarakat ketimbang memberi fungsi analitis.²² James Coleman (1968), menerangkan bahwa pembangunan politik menunjuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan; dengan tujuan akhir pada penguatan kapasitas sistem politik. *Pertama*, diferensiasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan dominan sejarah perkembangan sistem politik modern. *Kedua*, prinsip

²² Samuel Huntington, 1971. "The Change to Change: Modernization, Development and Politics", Comparative Politics, No. 3.

kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern. Baginya, modernisasi politik, tidak lain diartikan sebagai usaha untuk merealisasikan prinsip keadilan distribusi khususnya dalam bidang ekonomi. *Ketiga*, usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Menurut pandangan ini modernisasi harus dilihat sebagai usaha progresif penguatan kapasitas sistem politik.²³

Di tempat lain, berdasarkan analisis Lucian Pye (1966) pembangunan politik merupakan aspek modernisasi, pembangunan politik menjadi sebuah gagasan maupun proses yang luas dan kompleks sehingga muncul keyakinan awal bahwa pembangunan politik harus dimaknai dan diukur dengan banyak kriteria (bervariasi). Untuk itu, Pye membuat sepuluh kriteria untuk mendefinisikan pembangunan politik, yakni sebagai berikut.²⁴

- (1) Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
- (2) Sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri.
- (3) Sebagai modernisasi politik.
- (4) Sebagai operasi negara-bangsa.
- (5) Sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
- (6) Sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
- (7) Sebagai pembinaan demokrasi.
- (8) Sebagai stabilitas dan perubahan yang teratur.
- (9) Sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
- (10) Sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multi-dimensional.

Selain sepuluh kriteria di atas, Pye (1966) juga mengedepankan tiga dasar yang harus ada dalam pembangunan politik, yaitu: (1) Peningkatan persamaan (*equality*) yang menyangkut

²³ James S. Coleman, 1968. "Modernization: Political Aspect". Dalam David L. Shills (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 10. New York: The Macmillan Co., and the Free Press, 1968.

²⁴ Lucian Pye, 1966. *Aspects of Political Development*. Boston: Little Boston.

masalah partisipasi, (2) Demokratisasi, mobilisasi, keadilan hukum, dan rekrutmen didasarkan hasil yang dicapai; (3) Kapasitas (*capacity*) yang berkaitan dengan prestasi aparat birokrasi, efektivitas, dan efisiensi implementasi kebijakan publik, reformasi dan rasionalisasi administrasi; serta diferensiasi dan spesialisasi yang berhubungan dengan desentralisasi, spesialisasi fungsi, dan integrasi elite.²⁵

Sementara, Almond dan Powell (1966) menyederhanakan prasyarat pembangunan politik dengan hanya mengajukan tiga kriteria yang harus ada dalam pembangunan politik, yaitu: (1) Diferensiasi struktural, (2) Otonomi subsistem dan (3) Sekularisasi budaya.²⁶ Begitupun Claude Welch (1998), mengemukakan bahwa modernisasi politik umumnya punya tiga ciri khas: *Pertama*, peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara; yang dibarengi dengan melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional; *Kedua*, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik; *Ketiga*, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik dan kesediaan individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan sistem politik sebagai suatu keseluruhan.²⁷

Jika mengacu kepada model pembangunan politik di atas, seharusnya generasi muda di Indonesia lebih memiliki peran dalam partai politik, terutama mengacu kepada Lucian Pye yang mensyaratkan pembangunan dan atau modernisasi politik harus mencakup antara lain peningkatan persamaan (*equality*) yang menyangkut masalah partisipasi, demokratisasi, mobilisasi, keadilan hukum, dan rekrutmen didasarkan hasil yang dicapai; dan kapasitas (*capacity*) yang berkaitan dengan prestasi. Akan tetapi, hal itu

²⁵ Ibid, Lucian Pye, 1966:47.

²⁶ Almond Gabriel dan Powell Bingham, 1966. *Comparative Politics: Developmental Approach*. Boston: Little Brown.

²⁷ Welch Claude E., 1998. "Studi Perbandingan Modernisasi Politik". Dalam Yahya Muhaimin and Colin MacAndrews (Eds.), *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 34.

tergantung kepada tradisi politik yang dibangun oleh partai politik, terutama Golkar dan PDI-P di Kota Manado.

3.2.5 Kepemimpinan Generasi Muda

Kepemimpinan pada hakekatnya meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga kemampuan pimpinan itu menciptakan motivasi dalam diri setiap bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri.²⁸ Berarti, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang atau kelompok yang dipimpin.

Bagaimana halnya dengan kepemimpinan generasi muda dalam tubuh partai politik, apakah berhasil mempengaruhi orang atau kelompok parpolnya?-jawaban itu yang hendak di gali dalam penelitian ini. Berbagai bacaan teoritik dan fakta empiris, memperlihatkan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan terdiri dari beberapa faktor. Faktor itu berasal dari (a) Dalam diri sendiri/diri pemimpin, (b) Pandangan pemimpin terhadap manusia, (c) Keadaan kelompok dan situasi waktu kepemimpinan di laksanakan. Faktor yang berasal dari diri pemimpin sendiri yang mempengaruhi kepemimpinan adalah berupa (1) Pengertian diri tentang kepemimpinan, (2) Nilai atau hal utama yang dikejar dalam kepemimpinan, (3) Cara menduduki tingkat kepemimpinan dan (4) Pengalaman yang dimiliki dalam bidang kepemimpinan. Orang yang memandang kepemimpinan sebagai status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, barang dan jasa, jelas akan menunjukkan praktik kepemimpinan yang tidak sama dengan orang

²⁸ Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

yang mengartikan kepemimpinan untuk memberikan kesejahteraan bagi orang yang dipimpinya.²⁹

Sementara itu, gaya kepemimpinan yang dikembangkan secara teoritik memiliki beberapa model, yakni sebagai berikut.³⁰

(1) *Otokratis*

Kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Jadi, kekuasaanlah yang sangat dominan diterapkan.

(2) *Demokrasi*

Gaya ini ditandai adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis cenderung bermoral tinggi, dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

(3) *Simbolik*

Gaya kepemimpinan simbolik biasanya mempunyai ciri bawahan mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, pemimpin hanya memberi pendapat kalau diminta dan tidak ada usaha untuk memuji atau mengkritik bawahan.

(4) *Kharismatis*

Gaya kepemimpinan kharismatis mempunyai ciri seorang pemimpin mempunyai visi yang kuat, bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya serta mempunyai arah, sasaran, keuletan dan kepercayaan kepada bawahannya.

(5) *Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas*

Pemimpin memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif.

Generasi muda pada umumnya sesuai dengan perkembangan demokrasi, akan memilih gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini ditandai adanya suatu struktur yang

²⁹ Charles J. Keating, *Kepemimpinan, Teori dan Pengembangannya*. Jakarta: Penerbit Kanisius.

³⁰ Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah gaya kepemimpinan demokratis cenderung akan melahirkan moralitas tinggi dan dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Namun pada kenyataannya, kepemimpinan generasi muda di dalam tubuh parpol cenderung hanya menempati *layer* kedua dalam struktur sosial kepemimpinan parpol yang dalam beberapa hal masih meneruskan pola dan gaya kepemimpinan generasi tua.

Meniru atau meneruskan pola dan gaya kepemimpinan lama itu sebetulnya syah-syah saja karena seorang pemimpin maupun calon pemimpin harus memiliki kematangan dan kedewasaan berpikir dalam setiap keputusan yang akan diambil. Di samping itu, mereka harus arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Seorang pemimpin ataupun calon pemimpin juga harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tetapi jika yang diteruskan adalah hal-hal yang bernuansa negatif, seperti praktik “ABS”, asal bapak senang dan praktik nepotisme, primordialisme dan korupsi tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari, selain akan mencederai ideologi parpol itu sendiri dan akan melahirkan pemimpin muda yang cacat moral.

3.2.6 Orientasi Sosial Politik Generasi Muda

Dalam perspektif politik, orientasi politik generasi muda dipengaruhi oleh berbagai ideologi, terutama ideologi nasionalisme. Nasionalisme sebagai ideologi dapat dilihat sebagai sebuah kesadaran nasional. Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Namun, secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu. Nasionalisme tidak seperti bangunan statis, tetapi selalu dialektis dan interpretatif, sebab nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya.

Bagi Antonio Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya, ideologi ‘mengatur’ manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi, dan perjuangan mereka dan sebagainya.³¹ Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengonsolidasikan, dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana generasi muda memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk menyikapi persoalan tersebut. Istilah ideologi adalah istilah yang seringkali dipergunakan terutama dalam ilmu sosial, akan tetapi juga istilah yang sangat tidak jelas. Banyak para ahli yang melihat ketidakjelasan ini berawal dari rumitnya konsep ideologi itu sendiri.

Menurut Frans Magnis Suseno (1991), ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Ideologi dalam pengertian yang paling umum dan paling dangkal biasanya diartikan sebagai istilah mengenai sistem nilai, ide, moralitas, interpretasi dunia dan lainnya.³²

Secara sederhana, Franz Magnis Suseno mengemukakan tiga kategorisasi ideologi. *Pertama*, ideologi dalam arti penuh atau disebut juga ideologi tertutup. Ideologi dalam arti penuh berisi teori tentang hakekat realitas seluruhnya, yaitu merupakan sebuah teori metafisika. Kemudian selanjutnya berisi teori tentang makna sejarah yang memuat tujuan dan norma politik sosial tentang bagaimana suatu masyarakat harus ditata. Ideologi dalam arti penuh melegitimasi monopoli elite penguasa di atas masyarakat, isinya tidak boleh dipertanyakan lagi,

³¹ Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Jakarta: PT. Gramedia.

³² Suseno, Franz Magnis. 1991. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

bersifat dogmatis dan apriori dalam arti ideologi itu tidak dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman. Salah satu ciri khas ideologi semacam ini adalah klaim atas kebenaran yang tidak boleh diragukan dengan hak menuntut adanya ketaatan mutlak tanpa mempertanyakan kembali ideologi tersebut. Dalam kaitan ini Franz Magnis-Suseno mencontohkan ideologi Marxisme-Leninisme.³³

Kedua, ideologi dalam arti terbuka. Artinya ideologi yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan cita-cita masyarakat. Operasionalisasi dalam praktik kehidupan masyarakat tidak dapat ditentukan secara apriori melainkan harus disepakati secara demokratis sebagai bentuk cita-cita bersama. Dengan demikian, ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.

Ketiga, Ideologi dalam arti implisit atau tersirat. Ideologi semacam ini ditemukan dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional tentang hakekat realitas dan bagaimana manusia harus hidup didalamnya. Meskipun keyakinan itu hanya implisit saja, tidak dirumuskan dan tidak diajarkan namun cita-cita dan keyakinan itu sering berdimensi ideologis. Hal ini disebabkan karena ideologi mendukung tatanan sosial yang ada dan melegitimasi struktur non demokratis tertentu seperti kekuasaan suatu kelas sosial terhadap kelas sosial yang lain.

Dari beberapa fungsi ideologi seperti dikemukakan Gramsci dan Magnis Suseno tersebut, terlihat bahwa pengaruh ideologi terhadap sikap dan nasionalisme generasi muda sangat berkaitan erat. Memahami format sosial politik suatu generasi muda akan sulit dilakukan tanpa lebih dahulu memahami ideologi yang ada dalam generasi muda tersebut. Dari sinilah terlihat betapa ideologi

³³ Idem, Suseno, Franz Magnis. 1991.

merupakan perangkat mendasar dan merupakan salah satu unsur yang akan mewarnai aktivitas sosial dan politik setiap generasi muda.

Tantangan generasi muda saat ini berbeda dengan era tahun pada gelombang momentum kepemudaan sebelumnya. Jika dulu nasionalisme generasi muda diarahkan untuk melawan penjajahan, kini nasionalisme diposisikan secara proporsional dalam menyikapi kepentingan pasar yang diusung kepentingan global, dan nasionalisme yang diusung untuk kepentingan negara.³⁴ Melihat persoalan tersebut, perlu adanya redefinisi atas pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme dalam diri generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda dituntut mencermati kondisi kekinian yang harus bisa mensikapi kepentingan pasar, namun tidak antipati terhadap pasar. Selain itu, generasi muda tetap dituntut untuk bersikap nasionalis demi kepentingan bangsa. Generasi muda di semua daerah dituntut agar tidak mengedepankan kepentingan yang bersifat kedaerahan agar begitu kesejahteraan dapat diciptakan secara bersama-sama.

Sejumlah pakar menilai prinsip nasionalisme dalam diri generasi muda Indonesia umumnya telah mengalami degradasi lantaran terus menerus tergerus oleh nilai-nilai dari luar (globalisasi). Jika kondisi dilematis itu tetap dibiarkan, bukan tidak mustahil degradasi nasionalisme akan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Degradasi nasionalisme dalam diri generasi muda Indonesia muncul karena kegagalan dalam merevitalisasi dan mendefinisikan pemahaman nasionalisme itu sendiri karena mereka umumnya belum sadar akan ancaman arus global yang terus menerus menggerogoti identitas bangsa.

Dari analisis hasil penelitian memperlihatkan, runtuhnya ideologi nasionalis dalam tubuh parpol lebih dikarenakan desakan untuk cepat meraih kekuasaan dan iming-iming modal kapital yang terlalu kuat yang melampaui jauh kepentingan ideologi nasionalisme

³⁴ Idem, Suseno, 1991.

itu sendiri. Pada perkembangannya, ada indikasi bahwa generasi muda berlomba untuk menjadi anggota parpol didasarkan pada hitungan “untung-rugi”, jika menjadi anggota parpol tertentu akan memiliki kesempatan untuk menaikan status kedudukan ekonomi dan gengsi sosial menjadi pemimpin birokrat atau anggota legislatif, terlebih jika memiliki dana berkelebihan akan memuluskan jalan ke arah itu.

Menurut Azyumardi Azra dalam berbagai forum pertemuan dan seminar nasional, “Hari-hari seputar peringatan 81 tahun Sumpah Pemuda, banyak kalangan generasi lebih senior gelisah. Kegelisahan itu tercermin dari berbagai pernyataan narasumber yang berbicara tentang sisi gelap kehidupan generasi muda sekarang. Mulai dari pendidikan yang mereka pandang masih jauh tertinggal daripada negara-negara lain; atau karena generasi mudanya sendiri mereka pandang cenderung malas yang membuat mereka kalah bersaing dengan generasi muda bangsa-bangsa lain; sampai pada anak-anak muda yang menurut mereka lebih tertarik pada budaya global daripada budaya lokal dan nasional mereka sendiri.”³⁵

Kecemasan dan kekhawatiran tersebut, dalam segi-segi tertentu mencerminkan tidak hanya adanya kesenjangan nilai di antara generasi lebih tua dengan generasi muda, tetapi sekaligus juga perbedaan persepsi masing-masing tentang realitas masa kini dan masa mendatang. Generasi lebih tua terbentuk lewat pengalaman yang berbeda, sesuai realitas yang ada pada masanya; sementara generasi muda kita sekarang ini hidup dalam lingkungan lokal, nasional dan internasional yang sangat berbeda. Oleh karena itu, wajarlah jika generasi tua yang telah mapan dengan pengalaman dan nilainya sendiri memiliki kecemasan kepada generasi muda yang mempunyai nilainya dan persepsinya sendiri--yang tentu saja terbentuk di tengah dunia yang sudah dan terus dengan cepat berubah. Menurut Azyumardi, di tengah kecemasan generasi tua yang lebih

³⁵ Tulisan ini pernah dimuat di *Republika*, 29 Oktober 2009, Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

cenderung melihat "sisi gelap" (*dark sides*) generasi muda itu, padahal banyak sisi positif generasi muda yang perlu mendapat apresiasi generasi lebih tua. Meski kita masih mengeluh tentang mutu pendidikan kita yang belum juga sesuai harapan, masa sekarang ini adalah masa di mana anak muda kita semakin terdidik berkat pendidikan yang semakin tersedia merata.³⁶

Optimisme kepada anak muda atau pemuda juga ditemukan dalam tulisan Harian *Kompas* (26 Oktober 2009) dalam jajak pendapatnya dalam rangka peringatan 81 tahun Sumpah Pemuda. Jajak pendapat yang dilaksanakan di 10 kota besar Indonesia menemukan bahwa generasi muda Indonesia sekarang ini sangat optimistis menyongsong dan sekaligus menghadapi tantangan masa depan mereka. Sekitar dua per tiga anak-anak muda berusia antara 16 dan 30 tahun berani memastikan bahwa kehidupan mereka nanti jauh lebih baik secara sosial ekonomi dibandingkan generasi muda 20 tahunan silam. Mereka memandang memiliki kesempatan lebih baik mendapatkan pendidikan yang juga lebih baik untuk kemudian mendapat penghasilan lebih besar, mencapai kehidupan lebih menyenangkan, menikmati kemudahan memperoleh hal esensial dalam kehidupan serta turut serta dalam mendorong perubahan sosial.

Salah satu sumber optimisme itu adalah semakin terbukanya berbagai akses bagi mereka untuk meningkatkan kualitas diri--tidak hanya melalui pendidikan formal yang mereka peroleh dari sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga sumber belajar lainnya.³⁷ Generasi muda sekarang bahkan mendapatkan ilmu dan informasi dari beragam sumber yang tersedia dalam jaringan dunia maya. Berkat kesempatan lebih besar mengakses sumber ilmu dan informasi, generasi muda sekarang cenderung semakin kosmopolitan dalam pandangan, persepsi, dan tingkah lakunya. Namun demikian, pada saat yang sama mereka seolah kian tercerabut dari akar lokal dan nasionalnya menempatkan diri pada konteks global. Masih banyak di antara

³⁶ Idem, Azyumardi Azra

³⁷ Idem, Azyumardi Azra.

mereka tidak lagi dapat menyebut kelima Pancasila secara benar. Oleh karena itu, kian besar kesempatan bagi mereka mendapatkan akses ilmu dan informasi untuk meningkatkan kualitas diri, kian baik pulalah sesungguhnya peluang mereka dalam menyongsong dan menghadapi tantangan hari ini dan masa depan.

3.3 Kota Manado dalam Konstelasi Sejarah Sosial Politik

3.3.1 Sejarah Kota dan Penduduk

Pada masa kolonial pembangunan Kota Manado diawali dengan pendirian benteng, kemudian lokasi benteng ini berkembang menjadi pusat pemerintahan, perniagaan, dan jasa. Di pusat pemerintahan ada rumah-rumah kayu (rumah adat minahasa, red.), kantor penjara, kantor pos, biara Katolik, gereja dan perkampungan-perkampungan berdasarkan rasial, terutama kota di dominasi oleh perkampungan Belanda dan Cina. Untuk permukiman, pemerintah kolonial membuat kawasan hunian berdasarkan segregasi etnis yang diatur dalam format hunian “*virkant te pallen*” (segi empat) yakni kawasan hunian untuk ras Eropah, Cina, Arab, dan penduduk pribumi (Minahasa). Sebagian besar penduduk Eropah dan pribumi memeluk agama Kristen, orang Cina beragama Hindu-Budha dan Kong Hucu, sedang orang Arab dan Ternate beragama Islam.³⁸

Penduduk Kota Manado pada tahun 1930 berjumlah 27.544 jiwa, terdiri atas orang Eropah 1.392 jiwa, Cina 5.519 jiwa, Timur Asing (Arab) 586 jiwa, dan penduduk pribumi berjumlah 20.047 jiwa. Pada tahun 1955 angka ini melonjak drastis, total populasi ada 80.510 jiwa, terkecuali penduduk Eropah justru mengalami penurunan drastis tinggal 137 jiwa saja. Peningkatan jumlah penduduk terbesar berasal dari orang Cina mencapai 7.099 jiwa, Timur Asing lain 586 jiwa dan penduduk pribumi 72.369 jiwa.³⁹ Perekonomian Kota Manado

³⁸ Fientje Thomas, 2006. *Kajian Sejarah Kehidupan Keagamaan dan Perkembangan Tempat-tempat Peribadatan di Kota Manado (1945-2005)*, Fak. Sastra Unsrat dan Diknas.

³⁹ volsktelling 1930, Parengkuan, 1986.

dikuasai oleh etnik Cina, sementara politik dikuasai oleh kelompok etnik Minahasa.

Sementara itu, penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2004 ada sebesar 2.088,9 ribu orang dan akan menjadi 2.227,97 ribu orang pada tahun 2010, dengan pertumbuhan per tahun sebesar 1,08%. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai lebih dari 10% berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok dalam Agenda Pembangunan Sejahtera yang dijabarkan ke dalam berbagai prioritas pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi untuk pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara antara lain:⁴⁰

- (a) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
- (b) Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.
- (c) Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya.
- (d) Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membantu sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Secara nasional, penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan telah dimulai sejak tahun 1960-an, namun hingga saat ini sistem tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau bahkan banyak juga yang memiliki KTP ganda.
- (e) Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir. Penganggur terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan

⁴⁰ RPJMD Provinsi Sulut tahun 2005-2010.

sedang mencari pekerjaan, terutama pada penduduk muda. Sementara tingkat pengangguran terbuka adalah proporsi dalam% dari penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 1999, pengangguran terbuka hanya 7,75%, pada tahun 2000 mencapai 7,57%, tahun 2001 mencapai 11,51%, tahun 2002 mencapai 11,35% dan terus meningkat menjadi 10,36% pada tahun 2003 dan tahun 2004 menjadi 10,91.

- (f) Perbedaan upah yang semakin lebar atau senjang antara pekerja formal dan informal. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, upah pekerja informal mengikuti pola upah pekerja formal. Peningkatan upah pekerja di sektor non pertanian besar tanpa memper-timbangkan produktivitas akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi serta tekanan bagi upah pekerja informal.
- (g) Diperkirakan terjadi peningkatan penganggur terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun) yang mengakibatkan pendatang baru angkatan kerja baru, meningkat dalam kurun waktu relatif lama. Tingkat pengangguran usia muda terus meningkat dari 22% pada tahun 2000, menjadi 30% pada tahun 2003. Meningkatnya tingkat pengangguran usia muda memerlukan perhatian khusus mengingat mereka ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu, rendahnya tingkat elastisitas kesempatan kerja hanya 0,3 tahun 2004 mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja di Sulawesi Utara.
- (h) Sekitar 40% lulusan sekolah menengah atas (SMA) setiap tahun yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi cenderung menganggur. Demikian juga, 2/3 (dua pertiga) dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) setiap tahun yang tidak mendapatkan pekerjaan atau belum terserap oleh dunia usaha dan industri secara formal, juga karena belum mampu atau kurang kreatif dalam menciptakan pekerjaan sendiri yang produktif.
- (i) Di tingkat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), setiap tahun sekitar 3000-4000 lulusan sarjana strata satu (S1) dan program diploma dari berbagai program studi menunggu pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. Daya serap

oleh dunia usaha dan industri terhadap lulusan PTN dan PTS masih sangat lamban. Lulusan PTN dan PTS tidak mencapai 50% yang diserap oleh dunia usaha dan industri.

- (j) Berbagai data indeks kejahatan dan perilaku kekerasan sosial di Sulawesi Utara secara signifikan meningkat dari tahun ke tahun. Perilaku kejahatan dan kekerasan dilakukan oleh generasi muda dalam usia sekolah (16-24 tahun) atau usia kerja produktif 20-40 tahun.

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan

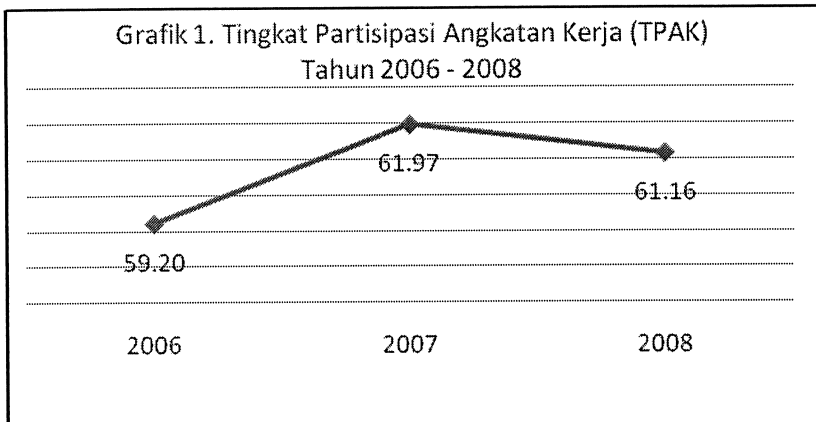
Komponen	Tahun Ajaran					
	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Proyeksi Penduduk Usia sekolah*)						
0- 6 Tahun	270.933	271.675	272.431	273.203	273.991	274.794
7- 12 Tahun	195.314	191.963	188.683	185.473	182.330	179.254
13-15 Tahun	7.877	5.369	2.934	0.569	8.273	6.043
16-18 Tahun	100.471	8.736	7.035	5.367	3.732	2.129
19-24 Tahun	229.285	229.644	229.644	229.644	229.805	229.985
Total Jumlah Penduduk	883.879	877.126	870.587	864.257	858.132	852.207
Proyeksi Peserta Didik**)						
PADU/TK	16%	18%	20%	22%	24%	26%
SD/MI sederajat	91%	92%	93%	94%	95%	96%
SMP/MTs	67%	68%	69%	70%	72%	75%
SMA/MA/SMK	45%	46%	46,5%	47,5%	48%	50%
PT/PTA/PTIK	11%	11,5%	12%	12,5%	13%	14%

*) Proyeksi menurut data BPS Sulawesi Utara (2005).

**) Proyeksi Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok usia dalam jenjang pendidikan

Berdasarkan buku indikator Kesra Provinsi Sulut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Utara pada

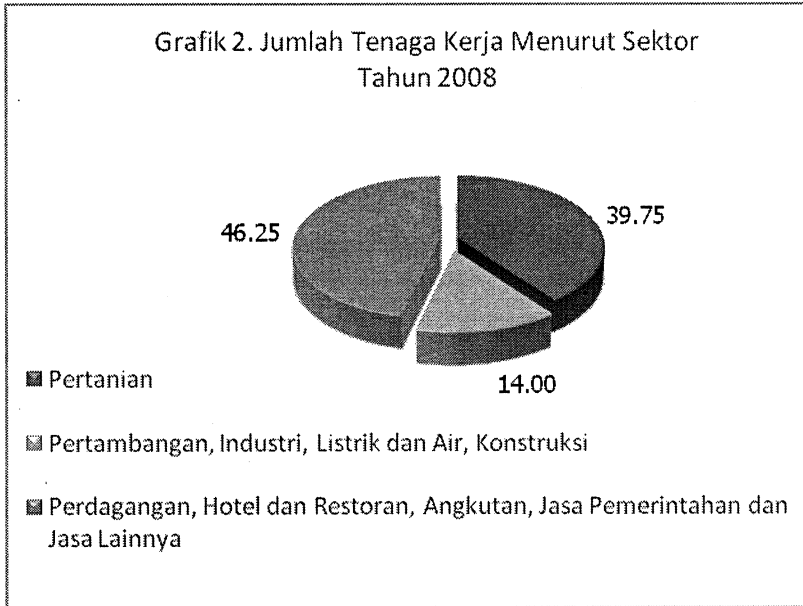
tahun 2005 adalah 59,20% meningkat pada tahun 2006 menjadi 61,97% dan mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 61,16%.



Sumber: Manado Dalam Angka, 2009.

Jumlah tenaga kerja yang banyak ditekuni oleh penduduk Provinsi Sulawesi Utara, mencakup 3 (tiga) sektor lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja, yakni sektor pertanian 39,75%, diikuti perdagangan, hotel, restoran, angkutan, jasa pemerintahan, dan sektor jasa lainnya 46,25%, sedangkan 14% bekerja pada sektor pertambangan, industri, listrik, dan air serta konstruksi.

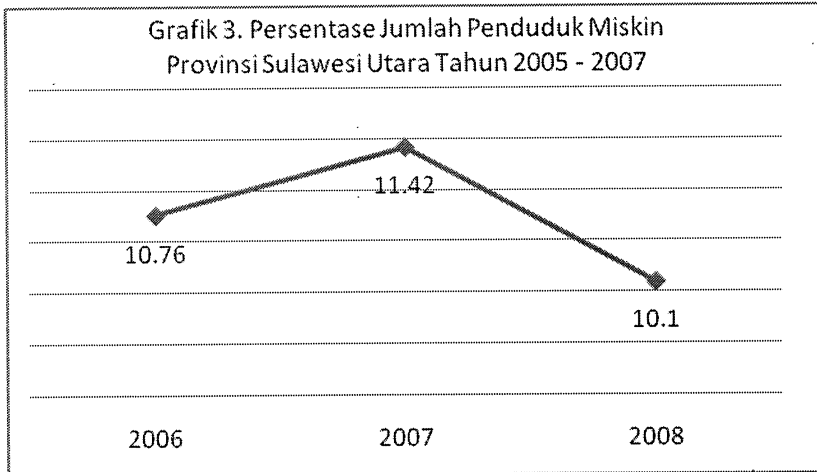
Grafik 2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Tahun 2008



Sumber: Manado Dalam Angka, 2009.

Perbandingan antara penduduk yang mencari pekerjaan termasuk yang mempersiapkan usaha, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan terhadap total angkatan kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan dari 14,62% di tahun 2006 menjadi 12,35% di tahun 2007 dan turun menjadi 10,65% di tahun 2008.

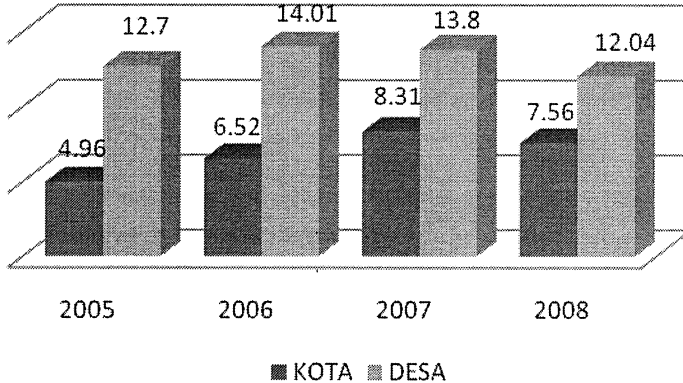
Sementara itu, Jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Sulawesi Utara terjadi fluktuasi pada periode 2005-2007. Dari tahun 2005 sampai dengan 2007 terus terjadi peningkatan persentase penduduk miskin, dari 9,34% menjadi 11,42% pada tahun 2007. Namun dari tahun 2007 ke 2008 terjadi penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,10%.



Sumber: Manado Dalam Angka, 2009.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara jika dilihat menurut daerah pemukiman berfluktuasi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan selang periode 2005–2008. Gambar grafik 4 di bawah memperlihatkan jumlah penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan dari pada perkotaan, namun jumlahnya setiap tahun cenderung menurun.

Grafik 4. Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Perkotaan Dan Pedesaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2008



Sumber: Manado Dalam Angka, 2009.

Secara singkat permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Sulawesi Utara dapat dirinci sebagai berikut.

- (a) Pendapatan dan rencana belanja (PDRB) per kapita relatif rendah secara nasional.
- (b) PDRB per kapita tinggi terkonsentrasi di dua daerah kota yaitu Kota Bitung dan Kota Manado.
- (c) Tingkat pengangguran dan setengah menganggur yang relatif tinggi.
- (d) Lebih dari 50% penduduk bekerja di sektor pertanian (ketergantungan di sektor pertanian cukup tinggi).
- (e) Jumlah penduduk miskin yang relatif besar.
- (f) Semakin meningkatnya jumlah petani gurem (kecil).
- (g) Semakin meningkatnya jumlah buruh tani.
- (h) Produktivitas sektor pertanian yang relatif rendah.
- (i) Rendahnya harga-harga komoditi pertanian.
- (j) Struktur ekonomi yang tidak seimbang.

- (k) Tidak seimbang komposisi konsumsi pangan masyarakat (RPJMD Sulut 2005-2010).

3.3.2 Latar Belakang Etnisitas di Kota Manado

Minahasa sebetulnya bukanlah nama kelompok etnik, Minahasa sendiri arti harfiahnya adalah “menjadi Satu”, yakni merupakan kesatuan dari tujuh (7) kelompok sub etnik yang tersebar di Sulut. Ketujuh kelompok etnik itu adalah: (1) Tonsea, (2) *Tonsawang*, (3) *Tondano*, (4) *Tombuluk*, (5) *Kawangkoan*, (6) *Panosakang* dan (7) *Bantik*. Ketujuh kelompok ini mengikrarkan diri untuk membentuk satu kesatuan atau menjadi satu yang dalam bahasa setempat di sebut *minahasa*.⁴¹

Pada perkembangan selanjutnya, mereka disebut sebagai kelompok etnik minahasa dan mendiami satu daerah yang sama yang disebut juga daerah Minahasa (Kabupaten Minahasa Induk). Setelah terjadi pemekaran daerah Minahasa menjadi kabupaten/kota justru terjadi pemisahan kembali dari etnik minahasa yang terpecah kembali ke dalam tujuh kelompok subetnik asal. Masing-masing kelompok subetnik bermukim di daerah kabupaten/kota yang dimekarkan, yakni sebagai berikut.

- (1) Subetnik Tonsea bermukim di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Subetnik Tondano bermukim di Kabupaten Tondano (Minahasa Induk).
- (3) Subetnik Tombuluk bermukim di Kabupaten Tomohon.

⁴¹ Prof. Isaac Takudung. Prof. Isaac memiliki kedudukan sebagai Dewan Penasehat Soksi, mantan anggota DPR periode tahun 1999-2004, mantan anggota DPRD Sulut selama 16 tahun lebih dan anggota pengganti dewan antar waktu periode 1977-71. Juga mantan konsultan Otoda Sulut dan fasilitator Otoda sampai dengan tahun 2009. Selain itu sebagai dosen fakultas hukum, mengajar hukum pemerintahan, Otoda dan globalisasi, hubungan internasional dan pengantar ilmu politik. Ketua Dewan riset Sulut dan Ketua Pelestarian SDA dan lingkungan. Meraih gelar profesor tahun 1994. Saat ini berusia 67 tahun lebih dan berasal dari etnis Jatun (Jawa dan Tondano), keturunan pengikut Pangeran Diponegoro.

- (4) Subetnik Tonsawang bermukim di Kabupaten Minahasa Tengah.
- (5) Subetnik Panosakang bermukim di Kabupaten Minahasa Tengah
- (6) Subetnik Kawangkoan bermukim di Kabupaten Minahasa Selatan.
- (7) Subetnik Bantik bermukim di Kabupaten Malalayang dan Kota Manado.

Kota Manado selain dihuni oleh subetnik bantik (Minahasa) juga didominasi oleh sub etnik Sangir dan Gorontalo. Sedangkan kelompok etnik lain seperti etnik Jawa, Bolmong (Bolang Mongondow), Sumatera dan Sulawesi Selatan/Makassar merupakan kelompok etnik yang secara kuantitatif kurang dominan di Kota Manado.

3.3.3 Sejarah Perkembangan Agama

Agama Katolik adalah agama pertama yang masuk ke Minahasa. Pada tahun 1563 ada sebuah kapal yang dikirim Gubernur Portugis dari Ternate disertai *Paderi Diogo de Magelhaens* yang berhasil mengkatolikan dan membaptis 1500 orang penduduk pribumi termasuk raja Manado di pulau Manado Tua dan ratu Siau. Selama kurun waktu itu berlangsung misi agama Katolik, baru tahun 1580 posisi Portugis dalam penyebaran agama digantikan oleh Spanyol.⁴² Pada tahun 1644 kegiatan misi Katolik di Minahasa berakhir akibat terjadinya perang antara Spanyol dan Tombulu. Kekuasaan Spanyol berakhir pada tahun 1657.

Sementara itu, perkembangan sejarah masuknya agama Protestan yang bersamaan dengan masuknya VOC ke Indonesia tahun 1663 dilanjutkan dengan ditematkannya seorang pendeta Belanda di Manado pada tahun 1677. Misi protestan kemudian diteruskan oleh NZG sebuah lembaga zending yang didirikan oleh *Th van der Kemp* pada tahun 1797 di negeri Belanda.⁴³ Pada tahun 1876 kebijakan

⁴² Bert Supit, 1986:81, dalam tulisan Fientje, hlm. 10, tahun 2006.

⁴³ Lintang, 2004:5, seperti dikutip oleh Fientje, hlm.10, tahun 2006

pemerintah kolonial belanda mewajibkan pekerjaan misi kepada Gereja Protestan Hindia Belanda (Indonesia) atau sejak saat itu gereja berada di bawah kontrol Gereja Nusantara atau *Indische Kerk*.

Sejak tahun 1933, di Minahasa mulai dibentuk organisasi Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM). Selanjutnya, secara administratif terjadi pemisahan antara gereja dengan negara pada tahun 1935 yang diumumkan oleh Presiden Soekarno. Pada tahun yang sama dibentuk Dewan Gereja Indonesia (DGI) sebuah wadah untuk menampung lembaga gereja di tanah air (Ukur, 1979:484). Di Manado pada tahun 1951 dibuat peraturan gereja baru yang mengatur posisi gereja, administratif, pembiayaan dan pelayanan mandiri. KGPM beralih nama menjadi GMIM.⁴⁴

Agama Islam masuk ke Manado bersamaan dengan kedatangan agama Kristen di wilayah ini. Namun upaya pengislaman yang dilakukan Sultan Ternate dihambat oleh pemerintah kolonial yang sedang gencarnya melakukan upaya kristenisasi. Orang islam yang ada di Manado pada saat itu adalah para pedagang dari berbagai daerah dan berasal dari nelayan Ternate. Orang Islam pertama yang tiba di Manado diperkirakan tahun 1685 yang dapat dilihat dari peninggalan kuburan Islam dari *Al Said Zen Bin Alwi Zaenaldus* (Tientje, 2006:11). Beberapa peristiwa penting yang membuat eksistensi Islam makin kuat di Sulawesi Utara adalah peristiwa dibuangnya Sultan Badaruddin II dari Palembang pada tahun 1821 ke kampung Islam di Manado. Kedua akibat dari perang Diponegoro dimana beberapa pengikut pangeran Diponegoro dibuang ke Sulut, di antaranya Kyai Mojo tahun 1830. Kemudian dilanjutkan dengan akibat terjadinya perang Paderi, dimana Imam Bonjol dibuang ke daerah Pineleng dekat Manado (Ilham, 2005 dalam Tientje, hlm. 11). Jejak para penyiar Islam di tanah Sulut sangat jelas dan agama Islam disyiarkan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam hal agama.

⁴⁴ Idem, Tientje, hlm. 10, tahun 2006.

Pada saat ini, komposisi agama penduduk di Kota Manado, sekitar 60% adalah penduduk beragama Kristen dan 40%nya lagi penduduk beragama Islam dan agama lainnya. Sementara komposisi agama di Sulawesi Utara secara keseluruhan sekitar 80% adalah penduduk beragama Kristen dan 20% beragama Islam dan lainnya.

3.4 Alih Kepemimpinan dalam Dinamika Politik Lokal

Alih kepemimpinan dalam pembahasan ini akan difokuskan pada kasus alih kepemimpinan dipartai politik lokal, khususnya Kota Manado. Namun demikian dinamika serta peta kekuatan politik di tingkat Kota/Kabupaten tidak pernah terlepas dari dinamika politik di tingkat Provinsi, karena bukan saja secara hierarkhis partai politik di daerah merupakan bagian dari provinsi, tetapi juga secara kultural masyarakat Manado merupakan bagian dari etnis minahasa. Oleh karena itu, pembahasan tentang alih kepemimpinan di Kota Manado akan dilihat kontelasinya dengan Sulawesi Utara secara keseluruhan.

Menurut salah seorang narasumber dari Universitas Samratulangi, sekalipun secara umum setelah lengsernya rezim Orde Baru dimana Partai Golkar mengalami guncangan yang hebat, namun saat ini partai tersebut merupakan partai politik yang paling solid dan memegang kendali kekuasaan di Sulawesi Utara. Diseluruh Sulawesi Utara, Partai Golkar memiliki 119 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), 11 Ketua DPRD dan 9 Kepala Daerah dari 14 kabupaten/kota yang ada. Sementara, di tingkat DPRD Provinsi, Golkar memperoleh sebanyak 13 kursi. Dan di Kota Manado, partai ini menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif dan memperoleh 8 kursi di DPRD.

Selain Partai Golkar, partai yang relatif kuat di Sulawesi Utara adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Masyarakat Sulawesi Utara memiliki ikatan historis yang kuat dengan partai ini, sebab dahulu wilayah Sulawesi Utara merupakan salah satu basis dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang kemudian berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada masa rezim Orde Baru.

Sekalipun tidak sebanyak Partai Golkar, di seluruh Sulawesi Utara ada 2 orang Kepala Daerah yang berasal dari PDI-P. Pada pemilu legislatif yang lalu, partai ini di tingkat DPRD Provinsi mendapat 9 kursi, sedangkan di DPRD Kota Manado mendapat 5 kursi. Atas dasar fakta sosial ini, maka Partai Golkar dan PDI-P dipilih sebagai sample dalam penelitian tentang alih kepemimpinan pada partai politik di Manado.

3.5 Membangun Dinasti dan Oligarki Modal

Secara sosiologis primodialisme sangat kental di lingkungan masyarakat Manado, bahkan masyarakat Minahasa pada umumnya. Sejak dahulu telah dibentuk kerukunan berdasarkan keluarga, baik yang berskala kecil maupun besar yang didasarkan pada latar belakang etnisitas, agama serta kedaerahan dan semuanya terhimpun dalam suatu masyarakat. Terlepas dari nilai positif yang terkandung didalamnya, namun dalam faktanya pada proses demokratisasi internal partai politik, primodialisme ini cenderung menumbuhkan nepotisme. Anak, istri, dan kerabat dekat akan menjadi prioritas utama dalam pengisian jabatan baik pada partai politik maupun jabatan politik lainnya, seperti Kepala Daerah atau Anggota Legislatif pada berbagai tingkatan.

Nepotisme ini terjadi baik di tubuh Partai Golkar maupun PDI-P, sebagai contoh kasus misalnya di Partai Golkar. *Stevanus Vreekee*, saat ini menjabat Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Utara merangkap sebagai bupati di Kabupaten Minahasa, anaknya menjadi Ketua Golkar Kabupaten Minahasa merangkap sebagai anggota DPRD daerah tersebut. Praktik nepotisme seperti ini tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota juga terjadi, bahkan cenderung lebih marak. Sebagai contoh, misalnya kasus di Minahasa Selatan. *Paruntu*, mantan Rektor Universitas Samratulangi menjabat sebagai Ketua Golkar di Kabupaten Minahasa Selatan dan merangkap sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan istrinya menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Dia pernah mencalonkan Bupati Minahasa Selatan

untuk periode 2004-2009, namun tidak terpilih. Sementara itu, saat ini anaknya, Tetty Paruntu yang berprofesi sebagai pengusaha mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dari Partai Golkar.

Hal yang sama juga terjadi di daerah Kabupaten Talaud, dimana dr. *Elly Lasut*, seorang Dokter Puskesmas terpilih menjadi Anggota DPRD dari Partai Golkar, dalam perkembangan lebih lanjut kemudian menjadi bupati di Talaud. Sedangkan istrinya, *Telly Tjangkudung* yang berprofesi sebagai pengusaha menjadi bupati di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam kasus di Kota Manado, dunia politik selain sarat dengan nepotisme, juga menunjukkan pola patronase serta politik balas jasa dari *client* terhadap *patronnya*. Misal, ketua Partai Golkar Kota Manado, Danny Sondakh adalah anak dari AJ. Sondakh, seorang tokoh Golkar di Sulawesi Utara yang pernah menjabat Gubernur Sulut. Menurut beberapa orang nara sumber dari kalangan pengurus Golkar di Manado, Danny Sondakh terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Kota Manado karena adanya politik balas budi dari Ketua Golkar Provinsi Sulut (*Stevanus Vreekee*) terhadap bapaknya Danny Sondakh (AJ. Sondakh) yang secara politis telah membesarkan dirinya (*Stefanus Vreekee*).

Selain Danny Sondakh, anak AJ. Sondakh yang terjun ke dunia politik adalah anak perempuannya yang bernama *Inggrid Sondakh*. Inggrid Sondakh adalah mantan anggota DPRD dari fraksi Golkar pada periode 2004–2009 lalu, sekarang dia menjabat ketua Golkar Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini, Inggrid Sondakh mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Minahasa Utara berpasangan dengan *Netty Agnes Pantauw* yang merupakan kader dari parpol Demokrat dan anggota DPRD periode sekarang dari fraksi Demokrat. Namun, Netty tidak mendapat dukungan dari Demokrat, Partai Demokrat justru memberikan dukungannya kepada calon *incumbent* dari Golkar yang berada dalam satu kubu dengan Gerbong Sarundayang.

Sementara itu, nepotisme dalam tubuh PDI-P juga menunjukkan pola yang sama dengan yang terjadi di Partai Golkar. *Fredy Sualan* yang saat ini menjabat sebagai Ketua PDI-P Provinsi Sulawesi Utara, istrinya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan salah seorang menantu perempuannya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, sementara itu anak sulungnya menjadi Ketua PDI-P Kota Manado.

Deskripsi di atas menggambarkan secara gamblang nepotisme yang terjadi dalam tubuh partai politik, khususnya Golkar dan PDI-P di Kota Manado serta Sulawesi Utara pada umumnya. Sekalipun praktik nepotisme merupakan refleksi dari pencaturan politik di tingkat nasional, namun di Kota Manado serta Sulawesi Utara secara keseluruhan, nepotisme tampaknya bertumpu pada kultur lokal yang telah terbentuk sejak dahulu sehingga memungkinkan nepotisme tumbuh subur yang pada akhirnya cenderung bersikap permisif terhadap *spoil system* dalam pengisian jabatan baik pada partai politik maupun jabatan politik lainnya seperti Kepala Daerah atau Anggota Legislatif pada berbagai tingkatan. Kecenderungan itu menciptakan suatu bentuk politik dinasti atau yang sering disebut sebagai “politik keluarga”. Kondisi demikian, cenderung terjadi hampir di setiap daerah di Sulawesi Utara, bila seseorang memegang pujuk pimpinan dalam Partai Politik, maka anak, istri, menantu dan kerabat dekat mendapat prioritas utama dalam pengisian jabatan, baik pada partai politik maupun jabatan politik lainnya seperti Kepala Daerah atau Anggota Legislatif pada berbagai tingkatan.

Praktik “politik keluarga” berjalan mulus sehingga setiap elit politik cenderung membentuk dinasti masing-masing. Menurut nara sumber dari kalangan Partai Golkar di Manado, Politik Keluarga tersebut dapat berjalan mulus karena dalam perkembangan dewasa ini pemilihan ketua dalam berbagai tingkatan di tubuh parpol dilakukan dengan cara aklamasi, misal di Golkar. Hal ini terjadi, karena sebelum pemilihan setiap perwakilan daerah diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan dukungan, kemudian pernyataan dukungan tersebut

dibacakan dalam pemandangan umum, dengan demikian dalam pemilihan kemudian seluruh peserta memilih secara aklamasi sesuai surat pernyataan dukungan yang telah ditandatangani. Lebih jauh, nara sumber tersebut menyatakan bahwa untuk memperoleh tanda tangan sebagai bukti dukungan tersebut, biasanya peserta diberi imbalan sejumlah uang dengan alibi sebagai uang saku. Cara seperti ini sebenarnya meniru cara yang dilakukan oleh Pusat dengan aktor intelektualnya *Akbar Tandjung*. Di lingkungan Partai Golkar, saat ini sudah 9 kabupaten/kota memilih Ketuaanya dengan cara aklamasi.

Dilihat dalam prespektif yang lebih luas, secara teoritis dalam ikatan primodial yang kuat, selain nepotisme juga membawa dampak ikutan berupa paternalistik. Dalam konteks kepemimpinan, secara konseptual paternalistik atau paternalisme merupakan sebuah sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan, pola relasi antara pimpinan dengan yang dipimpin bersifat hierarkis. Mengingat pada saat penelitian ini dilakukan bertepatan dengan pilkada yang akan dilangsungkan, baik di tingkat provinsi maupun di beberapa kabupaten/kota, khususnya Kota Manado, maka kajian tentang patronase pada bagian ini akan dikaitkan dengan pilkada tersebut. Jejak rekam tentang kandidat yang muncul beserta isu yang melingkupinya akan memberikan gambaran tentang pola patronase yang terjadi.

Menurut Riset Sanger, *Icad*,⁴⁵ salah seorang kader muda Golkar, isu sosial politik yang menonjol menjelang Pemilu untuk gubernur maupun bupati/wali kota adalah isu rasial, agama dan suku (RAS), yakni “*Orang nomor satu Sulut musti putra daerah, beragama Kristen dan berasal dari etnik Minahasa*”. Isu ini merefleksikan nilai budaya etnisisme kesukuan yang kuat di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dengan adanya isu ini, kecuali di daerah tertentu, di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara secara politis warga muslim ditempatkan sebagai warga negara kedua, tidak

⁴⁵ Riset Sanger, Redaksi Media Sulut dan Pimpinan termuda Partai Golkar dan kader muda parpol Golkar, panggilan akrab “*Icad*”.

mungkin akan menjadi orang nomor satu di Sulut karena faktanya jumlah penduduk muslim hanya sekitar 20% kurang.

Hal yang menonjol pada proses pemilukada di Sulut, adalah munculnya perseteruan politik di sekitar pemilukada gubernur. Gubernur Sulut saat ini, periode 2005–2010, dijabat oleh *Sarundayang* seorang tokoh birokrat yang pernah menjadi pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berasal dari kader Golkar. Ketika terpilih menjadi gubernur, Sarundayang naik menggunakan kendaraan politik PDI-P bukan menggunakan kendaraan politik Golkar, karena pada saat itu Golkar mengusung AJ. Sondakh sebagai calon gubernur. Sekarang ini, Sarundayang mencalonkan lagi sebagai Gubernur Sulut, *incumbent* dengan berganti kendaraan politik, bila pada periode pertama menggunakan kendaraan politik PDI-P, saat ini menggunakan kendaraan politik partai Demokrat. Dalam perkembangan lebih lanjut Dia memenangkan pemilukada gubernur untuk periode 2010–2015.

Ketokohan Sarundayang sebagai birokrat sangat kuat karena dalam berbagai kebijakannya selalu menentang korupsi. Namun demikian, keberadaannya juga banyak “tidak disukai” secara politik oleh lawan politiknya. Misal oleh Elly Lasut yang menjabat bupati di Kepulauan Talaud dan istrinya yang menjabat sebagai bupati di Minahasa Tengah. Elly Lasut dibesarkan oleh AJ. Sondakh, saat ini mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulut periode 2010–2015, Dia merupakan lawan politik cukup kuat untuk Sarundayang. Oleh karena itu, isu yang berkembang pada proses pemilukada, Elly Lasut diisukan berseteru dengan Sarundayang.

Orang yang berani menantang pencalonan gubernur *incumbent* dan yang paling vokal adalah *Jimmy Rumbero* (51 tahun) yang menjabat sebagai Wali Kota Manado. Saat ini, Jimmy Rumbero sedang dipenjara karena kasus korupsi dana APBD tahun 2008. Sementara itu, wakil Wali Kota Manado yang dijabat oleh *Abdi Buchari* (dari Partai Islam) juga terkena kasus korupsi dana bantuan

sosial (bansos) sehingga dipenjara selama 1 tahun. Dengan demikian, saat ini kepemimpinan birokrasi di Kota Manado kosong.

Isu yang berkembang pada proses pemilukada gubernur Sulut, Jimmy dipenjara karena permainan orang nomor satu Sulut (Sarundayang), karena memang sebelumnya sudah berkembang konflik di antara mereka, yakni konflik tentang tanah sengketa di daerah Mapanget dekat bandara. Gubernur ingin tanah tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit sehingga bisa menampung para pekerja, sementara Wali Kota Jimmy mengalokasikannya untuk pacuan kuda yang nuansa bisnisnya lebih besar.

Latar belakang perjalanan karier politik Jimmy memang sangat kontroversial. Dia adalah mantan preman di tempat parkir di Kota Manado. Dipelihara dan dibesarkan secara politik oleh gubernur AJ. Sondakh yang saat itu diyakini meniru “gaya pusat” saat Jendral Prabowo Subianto memelihara dan membesarkan Hercules, preman pasar Tanah Abang (awalnya adalah intel/informan muda Tentara Nasional Indonesia (TNI) di saat Timor Timur (Timtim) berkonflik dengan negara Indonesia). Namun bila Jimmy kemudian memasuki dunia politik, sementara Hercules terus hingga saat ini terus berkiprah di dunia premanisme.

AJ. Sondakh adalah figur elite politik yang disenangi masyarakat karena dapat diterima kalangan rakyat bawah hingga kalangan atas. Selain “membesarkan” Jimmy, AJ. Sondakh juga membesarkan *Syahrial Damopoligi* mantan preman koperasi di daerah Bolang Mongondow yang akhirnya berhasil mencapai karier politiknya menjadi Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian menjadi Ketua DPRD Provinsi periode tahun 2004–2009. Di samping itu, AJ. Sondakh juga membesarkan *Stevanus Vreekee Runtu*, mantan preman pengadaan proyek Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam perkembangan lebih lanjut Stevanus Vreekee Runtu kemudian menjadi Bupati Minahasa dan ketua Golkar Minahasa. Saat ini dia mencalonkan diri menjadi gubernur Sulut.

Sementara anak AJ. Sondakh sendiri, Danny Sondakh saat ini menjabat sebagai ketua Golkar Kota Manado dan merangkap sebagai Ketua DPRD di daerah tersebut. Sebagaimana telah disinggung di atas, menurut beberapa orang nara sumber dari kalangan pengurus Golkar di Manado, Danny Sondakh terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Kota Manado karena politik balas budi Ketua Golkar Provinsi Sulut (Stevanus Vreekee) terhadap AJ. Sondakh yang secara politis telah membesarkan dirinya. Selain Danny Sondakh, anak AJ. Sondakh yang terjun ke dunia politik adalah anak perempuannya yang bernama Inggrid Sondakh. Dinasti politik AJ. Sondakh yang dibangun dari nepotisme dan sistem pewarisan kekuasaan melalui kekerabatan dan pertemanan, tidak berhenti disitu. Masih ada *Harry Kere* yang awalnya adalah ajudan dari Gubernur AJ. Sondakh, naik menjadi anggota DPRD periode 2004–2009. Saat ini mencalonkan diri menjadi Wakil Wali Kota Manado berpasangan dengan *Burhanuddin* (calon Wali Kota Manado) yang berasal dari kalangan independen dan beragama islam.

Bila melihat jejak rekam para kandidat yang muncul baik pada pemilukada gubernur, maupun pemilukada di daerah menunjukkan pola patronase yang kuat dalam percaturan politik di wilayah Sulawesi Utara. Terpilihnya Danny Sondakh sebagai Ketua Golkar Kota Manado menggambarkan secara gamblang pola patronase yang terjadi. Bila dicermati lebih jauh, perseteruan yang terjadi dalam Pemilukada Gubernur saat ini pada dasarnya merupakan perpanjangan perseteruan antara dua elit politik yang telah menjadi patron, yakni AJ. Sondakh dengan SH. Sarundayang. Bila kedua elit politik tersebut dibandingkan, sekalipun keduanya cenderung melanggengkan politik keluarga hingga membentuk dinasti politik masing-masing, namun pola permainan yang dikembangkan tampaknya relatif berbeda. AJ. Sondakh, cenderung membentuk dinasti serta menerapkan pola patronase pada kubu partai yang sama, yakni Golkar. Dalam perkembangan selanjutnya kemudian muncul kandidat-kandidat calon gubernur, sekalipun terpisah dalam masing-masing fraksi namun tetap berada dalam tubuh fraksi partai yang

sama. Sedangkan SH. Sarundayang, cenderung berpindah-pindah partai politik. Sebagaimana telah disinggung di atas, sekalipun Dia kader Partai Golkar, namun pada pencalonan gubernur periode pertama menggunakan kendaraan PDI-P, kemudian sekarang menggunakan kendaraan politik Partai Demokrat.

Saat ini, istri Sarundayang menjadi anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sementara anaknya, seorang menjadi Anggota DPR RI dari PDI-P, sedangkan yang satu lagi menjadi pengurus Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara. Keadaan ini menggambarkan bahwa dinasti politik yang dibangun SH. Sarundayang tersebar dalam berbagai partai politik yang ada. Dengan demikian, tampaknya partai politik hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan semata, bukan sebagai alat perjuangan ideologi yang diyakininya. Dewasa ini, instrumentalisasi partai politik seperti itu sangat dimungkinkan karena hampir semua partai politik yang ada tidak memiliki *flat form* yang jelas, sehingga kesatuan dalam partai politik tidak lagi diikat oleh ideologi yang sama melainkan diikat oleh kepentingan yang sama semata. Kondisi seperti ini oleh para pengamat politik sering disebut sebagai krisis ideologi yang melanda partai politik pada umumnya disetiap tingkatan.

Di tengah krisis ideologi yang melanda partai politik, massa mengambang (*floating mass*) yang ditumbuh-kembangkan sejak masa rezim Orde Baru dalam perkembangan lebih lanjut menumbuhkan budaya politik yang pragmatis dan keanggotaan yang permisif. Dalam lingkup budaya politik seperti ini, *money politics* mendapat tempat yang kondusif, oleh karenanya setiap prosesi politik, baik yang bersentuhan langsung dengan konstituen seperti pilkada, maupun pemilihan pengurus internal partai memerlukan biaya yang besar. Salah seorang nara sumber menyatakan secara terbuka bahwa ongkos untuk menjadi caleg DPRD di tingkat kabupaten mencapai besaran 200 juta rupiah, ongkos politik caleg untuk tingkat provinsi umumnya dipatok 500 juta rupiah dan untuk tingkat nasional untuk calon bupati/Wali Kota dana yang mesti disediakan berkisar antara 20 sampai 40 milyar rupiah, sedang untuk jabatan gubernur berkisar

anatar 75 sampai 100 milyar rupiah. Dengan kondisi seperti ini kalkulasi materil sulit dihindari, jika si “Abun” misalnya mencalonkan diri menjadi caleg di tingkat kabupaten, ongkos politik yang dikeluarkannya sebesar dua ratus juta akan tergantikan ketika dia telah ditetapkan menjadi anggota legislatif selama 5 tahun. Karena dengan gaji sebesar dua belas juta rupiah per bulannya, untuk kurun waktu 5 tahun, dia akan mengumpulkan uang sebesar 720 juta rupiah, jadi menurut kalkulasi ada keuntungan sebesar 520 juta rupiah. Belum lagi honor yang akan diterima pada setiap kali dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) bersidang.

Sementara itu, dalam tubuh partai politik sendiri, sebagaimana telah disinggung di atas, dalam sistem yang dibangun dewasa ini, sejak awal pemilihan ketua telah memerlukan biaya yang relatif besar, kemudian dalam beberapa kondisi tertentu partai politik memang membutuhkan dana besar untuk menjalankan roda organisasi partainya, mulai dari kaderisasi di tingkat nasional, musyawarah nasional, musyawarah di tingkat daerah, menjalankan agenda partai yang bersinggungan langsung dengan konstituen, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini yang kemudian menggiring partai politik mengundang masuk para pemilik modal, sekalipun mereka bukan kader partai. Isu Kapitalisasi di tubuh partai politik (parpol) menjadi fenomena umum yang terjadi di seluruh Indonesia, kasus yang terjadi di daerah sebenarnya bukan kasus lokal yang berdiri sendiri, melainkan refleksi dari kasus yang terjadi di tingkat nasional.

Jika parpol di tingkat pusat mengeluarkan kebijakan rekrutmen pengurus parpol dari kalangan pengusaha untuk membiayai organisasi maka parpol di tingkat daerah pun mengambil kebijakan yang sama dengan alasan yang sama pula. Maka dari itu, pergantian kepengurusan dua parpol besar, seperti Golkar dan PDI-P secara terbuka menerima kepengurusan nonanggota yang berasal dari kalangan pengusaha sukses.⁴⁶ Unsur kapital memang

⁴⁶ Demokrat, PKS, PAN dan PPP belum sempat diteliti pada tahun ini mengingat kendala biaya dan waktu yang demikian kecil dan sempit.

menjadi pertimbangan utama, sehingga partai sebesar Golkar dan PDI-P mengambil keputusan itu sekalipun resikonya tidak populer di kalangan anggota atau kader partai setianya. Jika demikian keadaannya, maka oligarki modal tidak dapat dihindarkan di dalam percaturan politik, baik lokal maupun nasional. Tumbuhnya oligarki modal, terjadinya pola patronase serta nepotisme dalam dinamika politik di Kota Manado, bahkan wilayah Sulawesi Utara pada umumnya menjadi infrastruktur bagi berlangsungnya alih kepemimpinan kepada generasi muda dalam partai politik setempat, khususnya Partai Golkar dan PDI-P.

3.6 Alih Kepemimpinan dalam Partai Politik

Sebagaimana telah disinggung di atas, alih kepemimpinan dalam partai politik pada pembahasan ini akan difokuskan pada alih kepemimpinan dalam Partai Golkar dan PDI-P di Kota Manado, sementara korelasinya dengan wilayah Sulawesi Utara pada umumnya hanya untuk memperjelas pembahasan semata. Dalam konteks ini kajian akan dimulai dari konfigurasi kepengurusan berdasarkan umur pengurus, hal ini dilakukan karena kategori pemuda menjadi salah satu indikator penting di dalam regenerasi yang terjadi.

Menurut salah seorang nara sumber dari kalangan pengurus Partai Golkar Kota Manado, dari keseluruhan pengurus Partai Golkar di Kota Manado saat ini hanya sekitar 6 orang yang berumur 23 tahun. Mereka menempati posisi Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan beberapa Ketua Bidang, sedangkan Bendahara berumur sekitar 33 tahun. Pengurus termuda adalah *Andre Gerungan*, berumur 18 tahun menempati posisi Wakil Ketua III. Andre Gerungan ini adalah seorang Mahasiswa yang merangkap menjadi pengusaha, Dia anak pengusaha (kontraktor) terkaya di Kota Manado. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peralihan kepemimpinan kepada generasi muda di tubuh Partai Golkar di Kota Manado hanya berlangsung pada *layer* ke dua bukan pada puncak pimpinan yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan. Generasi muda direkrut

jadi pengurus karena elite politik lokal takut kehilangan suara dari generasi muda yang jumlahnya relatif banyak. Sementara itu, dalam pemilihan pimpinan puncak sangat seras dengan nepotisme dan patronase, Pemilihan Ketua Golkar Kota Manado sebagaimana telah dideskripsikan di atas menunjukkan hal itu.

Di atas telah diuraikan bahwa karena dorongan budaya politik yang pragmatis dan keanggotaan yang permisif dan merefleksikan kebijakan Pengurus Pusat yang merekrut pengurus parpol dari kalangan pengusaha untuk membiayai organisasi, di Kota Manado juga terjadi hal yang sama. Menurut salah seorang responden saat ini rekrutmen pengurus di Partai Golkar relatif longgar, banyak pengurus partai dari kalangan pengusaha, padahal mereka bukan kader partai. Sering terjadi, dimana partai mengusung calon yang bukan kader partai untuk menjadi Kepala Daerah, bahkan di Kota Manado pernah terjadi dimana dua orang anggota parpol PDI-P yang juga merupakan anggota DPRD dari fraksi PDI-P, sebelum masa jabatannya habis di DPRD, kedua orang ini dicalonkan oleh Golkar untuk menjadi anggota DPRD Kota Manado pada periode selanjutnya. Hal ini terjadi karena pertimbangan kepemilikan modal, sekalipun untuk itu tidak mempertimbangkan etika partai.

Seorang aktivis partai yang merintis karier dari bawah akan tetapi tidak memiliki modal dan tidak memiliki darah biru dari suatu dinasti politik yang ada maka harus siap mengantri di belakang barisan para pangeran dari dinasti politik serta para pemilik modal yang masuk belakangan. Menanggapi keadaan ini, salah seorang kader muda Golkar di Manado menyatakan bahwa ada tiga jalur untuk menjadi anggota Golkar saat ini. *Jalur pertama*, menjadi anggota Golkar melalui sayap-sayapnya, baik ormas pendiri Golkar maupun ormas yang didirikan kemudian. Sayap-sayap utama Partai Golkar itu antara lain Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) serta Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Sementara itu, ormas pendiri Golkar antara lain Soksi, Kosgoro, dan MKGR, sedangkan ormas yang didirikan kemudian antara lain, Gakari, AMPI, Baitul Muslim. *Jalur kedua*, menjadi kaya dulu hingga memiliki modal yang banyak

atau memiliki posisi penting dalam pemerintahan baru kemudian masuk Partai Golkar. *Jalur ketiga*, menjadi anggota Golkar melalui pendekatan dengan pengurus partai yang memegang jabatan strategis. Jalur ketiga ini relatif lebih cepat dan irit biayanya, para preman biasanya menggunakan jalur ini untuk menjadi anggota atau pengurus Partai Golkar. Jalur pertama merupakan jalur formal yang secara prosedural harus dilalui untuk menjadi anggota atau pengurus Partai Golkar, namun demikian realitasnya banyak yang menjadi anggota atau pengurus partai, bahkan anggota DPRD dari Partai Golkar melalui jalur kedua dan ketiga. Akibat keadaan ini regenerasi menjadi rusak, dalam perkembangan lebih lanjut Partai Golkar akan dikuasai para pemilik modal, lambat laun partai akan kehilangan pendukung yang militan.

Alih kepemimpinan dalam tubuh PDI-P tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada Partai Golkar, namun demikian upaya untuk mempertahankan *status quo* dalam tubuh PDI-P tampak relatif menonjol. Sebagai contoh kasus misalnya, dalam kepengurusan PDI-P di Provinsi Sulawesi Utara, yang menjabat Ketua umum sekarang berumur sekitar 60 tahun, Dia sudah menjabat sebanyak tiga periode. Yang menjabat Sekretaris sekarang berumur sekitar 45 tahun, Dia sudah menjabat dua periode. Bendahara dijabat oleh salah seorang saudara Ketua Umum, Dia berumur sekitar 50 tahun. Bila dicermati lebih jauh, upaya untuk mempertahankan *status quo* yang terjadi di daerah sebenarnya merupakan refleksi dari kepengurusan partai di Pusat, secara tegas salah seorang kader muda di PDI-P Manado menyatakan bahwa dalam tubuh PDI-P, kondisi lokal berbanding lurus dengan kondisi nasional, bila dalam kepengurusan pusat terbangun *koncoisme*, maka di daerah pun terjadi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih jauh nara sumber tersebut menyatakan bahwa, di lingkungan Dewan Pengurus Daerah (DPD), umur pengurus termuda berkisar antara 35 sampai 40 tahun, itupun jumlah hanya sekitar 15% dari keseluruhan pengurus yang ada dan berada pada posisi *layer* dua yang tidak memiliki kompetensi dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, PDI-P di Kota Manado, Jabatan Ketua Umum diduduki oleh anak dari Ketua Umum PDI-P Provinsi, Dia berumur 35 tahun. Bila regenerasi kepemimpinan hanya dilihat dari faktor umur maka upaya Ketua Umum PDI-P Provinsi yang mendorong anaknya untuk menjadi Ketua di tingkat Dewan Pimpinan Cabang bisa dianggap sebagai proses regenerasi, namun regenerasi yang berkonotasi nepotisme.

Menyikapi kondisi perpolitikan lokal, salah seorang nara sumber dari Universitas Samratulangi memberi keterangan, bahwa regenerasi yang berkonotasi nepotisme inilah yang banyak terjadi di Sulawesi Utara. Bila melihat konfigurasi kepengurusan berdasarkan umur para pengurusnya, di lingkungan PDI-P Kota Manado sekalipun jumlahnya relatif sedikit, namun pada *layer* kedua tampaknya ada pengurus yang berusia berkisar antara 35 sampai dengan 40 tahun, seperti misalnya Sekretaris dan Bendahara. Keadaan ini menunjukkan bahwa, peralihan kepemimpinan kepada generasi muda di tubuh PDI-P Kota Manado hanya berlangsung pada *layer* ke dua, bukan pada puncak pimpinan yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan, hal ini menunjukkan kesamaan dengan peralihan kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar sebagaimana telah dideskripsikan di atas.

Kuatnya oligarki modal tampaknya tidak hanya melanda Partai Golkar, tetapi juga melanda PDI-P, menurut salah seorang pengurusnya, sering pengurus partai dipilih dari kalangan non kader karena mempertimbangkan kepemilikan modal semata. Sebagai contoh kasus misalnya, Ketua Banteng Muda Kota Manado saat ini, Dia bukan kader PDI-P, malahan dahulu Dia pernah aktif di Partai Golkar. Dalam beberapa kasus pemilihan Kepala Daerah, PDI-P mengusung calon yang bukan berasal dari kader partai, calon tersebut diusung karena dianggap memiliki modal yang kuat, bahkan dalam pemilihan Kepala Daerah PDI-P selalu membuka pendaftaran untuk calon dari luar partai. Menurut salah seorang nara sumber, pendaftaran calon Kepala Daerah dari orang luar partai tersebut ternyata semata-mata hanya untuk dimintai uangnya guna membiayai

mekanisme organisasional partai. Bila demikian, ada kecenderungan membiayai partai dari uang hasil “*pemerasan*”, terutama dari para calon Kepala Daerah yang mengikuti pendaftaran.

Selain mengusung calon dari luar, dengan pertimbangan kepemilikan modal, sering terjadi partai mencalonkan anggota legislatif dari kalangan non kader, padahal militansinya terhadap partai diragukan, kasus dua orang anggota DPRD Kota Manado yang masih menjabat, kemudian dicalonkan partai lain (Golkar) untuk pemilihan periode berikutnya menunjukkan tingkat militansi yang rendah terhadap partai PDI-P. Dengan keadaan seperti ini kaderisasi di tubuh PDI-P menjadi tidak begitu penting lagi, sebagian anggota menyebutkan bahwa PDI-P bukan lagi merupakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun dipelesetkan menjadi “Partai Demokrasi Indonesia Perdagangan”.

Menurut keterangan dalam wawancara mendalam, salah seorang kader muda PDI-P yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saat ini PDI-P memiliki empat penyakit yang akut, sebagai berikut: *pertama*, PDI-P mengalami distorsi dan disorientasi. Hal ini terjadi karena perilaku elit partai baik yang menjadi anggota DPRD, maupun yang ada di eksekutif telah jauh dari ideologi “*wong cilik*” atau ideologi kelompok “*sandal jepit*”. Kondisi ini terlihat karena para elite partai tidak pernah mengangkat isu kerakyatan di parlemen, di samping itu mereka memiliki kecenderungan berperilaku elitis, misalnya rapat di hotel berbintang. *Kedua*, elite partai lebih berorientasi pada kekuasaan ketimbang pada pelayanan publik. Hal ini terlihat dari ambisi pengurus untuk menjadi anggota DPRD, seolah-olah bila jadi pengurus partai, maka mutlak harus jadi anggota DPRD. Implikasi lebih luas dari orientasi terhadap kekuasaan ini kemudian banyak keputusan partai yang bersifat pragmatis, jauh dari kontitusi partai.

Ketiga, terjadi pragmatisme demokrasi transaksional. Kondisi ini pada mulanya muncul mungkin karena tuntutan budaya politik yang ada, namun pada akhirnya melembaga pada tubuh partai

sehingga semua prosesi demokrasi internal partai dilakukan secara transaksional dan dikalkulasi secara material. Dalam perkembangan lebih lanjut, kepemilikan modal mutlak diperlukan. Untuk menjadi Ketua Anak Cabang saja diperlukan biaya yang relatif besar. Biaya tersebut selain diperlukan untuk membeli suara pada saat pemilihan, diperlukan juga untuk memberi upeti ke Pengurus lebih tinggi guna mendapat “restu” politik. Hal yang sama juga terjadi, bila anggota mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. *Empat*, kuatnya oligarki modal dalam partai. Dengan kuatnya oligarki modal dalam partai menyebabkan kepemilikan modal selalu menjadi pertimbangan utama, sehingga melupakan ukuran-ukuran objektif lainnya seperti kapasitas dan kapabilitas dalam menilai prestasi kader partai.

Dalam rangka menghilangkan keempat penyakit tersebut, kemudian ada sekitar 40 orang kader muda bergabung untuk melakukan “autokritik” terhadap partai, namun demikian tidak mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, sehingga gerakan ini berada di luar struktur partai. Setelah berjalan 4 bulan, gerakan ini baru mendapat tanggapan dari para mantan pengurus yang masih menjadi anggota partai. Para pengurus partai, baik pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang maupun Dewan Pimpinan Daerah tidak merespon, karena dalam internal partai tidak ada budaya autokritik, jangankan autokritik, beda pendapat saja tidak berani. Bila dianalisis secara cermat, keadaan ini mengindikasikan betapa kuatnya *status quo* yang ada dalam tubuh PDI-P, dengan kondisi seperti ini betapa sulitnya kelompok muda untuk melakukan perbaikan dalam tubuh partai. Jika demikian keadaannya, tampaknya relatif sulit kelompok muda untuk meraih kepemimpinan puncak dalam tubuh partai, jangankan suksesi kepemimpinan, melakukan autokritik saja sebagai wujud demokrasi internal partai tidak dapat diterima oleh elit partai yang ada, nilai feodalisme dalam tubuh partai tampaknya relatif kuat.

Bertolak dari deskripsi di atas, secara singkat dapat dinyatakan bahwa primordialisme yang melingkupi nilai nepotisme dan patronase dalam struktur sosial setempat bertemu dengan oligarki modal sebagai tuntutan budaya politik yang berkembang tampaknya

tidak memberikan ruang yang luas bagi alih kepemimpinan generasi muda atau kelompok muda dalam tubuh partai politik lokal, baik PDI-P maupun Golkar di Manado, bahkan Sulawesi Utara pada umumnya. Peralihan kepemimpinan kepada generasi muda di tubuh kedua partai politik tersebut hanya berlangsung pada *layer* ke dua, bukan pada puncak pimpinan yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa demokrasi internal partai terhambat oleh nilai budaya setempat yang telah terbentuk sejak lama.

Di tengah kondisi seperti ini, di Kota Manado, bahkan sebagian besar wilayah Sulawesi, fanatisme agama (kristen) dan nilai aristokrasi masih melekat kuat dalam masyarakat. Dengan keadaan ini legitimasi agama menjadi faktor penting dalam meraih kedudukan di partai politik maupun birokrasi. Oleh karena itu, ketika seseorang ditetapkan menjadi anggota DPR/DPRD secara otomatis dia akan direkrut menjadi pimpinan jemaat gereja, biasanya menjadi pimpinan jemaat kaum bapa ataupun kaum pemuda dan remaja. Bagi gereja, keuntungannya adalah fasilitas, sementara bagi anggota parpol adalah jaminan kekuasaan yang didukung oleh basis massa gereja yang solid. Sementara itu, hubungan simbolik mutualistis antara gereja dan politik itu tidak terjadi di kalangan parpol yang berbasis orang Islam. Justru, di parpol yang berbasis orang Islam kepentingan individual lebih menonjol dari pada kepentingan kolektif, dan institusi keagamaan seperti halnya gereja pada kelompok Kristen kurang dimanfaatkan dengan baik.

3.7 Penutup

Secara sosiologis primordialisme sangat kental di lingkungan masyarakat Manado, bahkan masyarakat Minahasa pada umumnya. Sejak dahulu telah dibentuk kerukunan-kerukunan keluarga berbasis etnik, agama dan kedaerahan, baik yang berskala kecil maupun keluarga yang berskala besar dan semuanya terhimpun dalam suatu masyarakat. Terlepas dari nilai positif yang terkandung didalamnya, namun dalam proses demokratisasi internal partai politik,

primordialisme ini cenderung menumbuhkan nepotisme. Anak, istri dan kerabat dekat menjadi prioritas utama dalam pengisian jabatan baik pada partai politik maupun jabatan politik lainnya seperti Kepala Daerah atau Anggota Legislatif pada berbagai tingkatan.

Ikatan primordial yang kuat, selain menumbuhkan nepotisme juga membawa dampak ikutan berupa paternalistik, bila melihat jejak rekam para kandidat yang muncul baik pada pilkada gubernur, maupun pilkada di daerah menunjukkan pola patronase yang kuat dalam percaturan politik di wilayah Sulawesi Utara. Terpilihnya Danny Sondakh sebagai Ketua Golkar Kota Manado merupakan salah satu contoh pola patronase yang terjadi. Primordialisme yang melingkupi nilai nepotisme dan patronase dalam struktur sosial setempat bertemu dengan oligarki modal sebagai tuntutan budaya politik yang berkembang tampaknya tidak memberikan ruang yang luas bagi alih kepemimpinan kepada generasi muda dalam tubuh partai politik lokal, baik PDI-P maupun Golkar di Manado, bahkan Sulawesi Utara pada umumnya. Peralihan kepemimpinan kepada generasi muda di tubuh kedua partai politik tersebut hanya berlangsung pada *layer* kedua, bukan pada puncak pimpinan yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa demokrasi internal partai terhambat oleh nilai budaya setempat yang telah terbentuk sejak lama.

Alih kepemimpinan di tubuh partai politik Golkar dan PDI-P di Kota Manado, didominasi oleh kekuatan uang, sehingga hampir mengalahkan ideologi nasionalisme yang seharusnya tetap menjadi dasar bagi partai politik. Selain itu, regenerasi di tubuh partai politik bisa tumbuh kuat jika didukung oleh fanatisme agama (kristen) melalui organisasi gereja hingga ke paling bawah “kolong” dan latar belakang aristokrasi. Gejala ini muncul karena hampir semua pimpinan parpol dan birokrat merangkap menjadi pimpinan agama, sebagai pimpinan majelis jemaat kristen “GMIM” di tingkat desa/kelurahan. Pada posisi demikian, legitimasi agama menjadi faktor penting dalam meraih kedudukan di partai politik dan birokrasi. Maka ketika seseorang ditetapkan menjadi anggota

DPR/DPRD secara otomatis dia akan direkrut menjadi pimpinan jemaat gereja. Sementara itu, keuntungan bagi gereja disediakannya fasilitas kebutuhan gereja, dan bagi anggota parpol adalah jaminan kekuasaan yang didukung oleh basis massa gereja yang solid. Sementara itu, hubungan simbolik mutualistis antara gereja dan politik itu tidak terjadi di kalangan parpol atau orang Islam. Justru, di parpol Islam kepentingan individual lebih menonjol dari pada kepentingan kolektif, dan basis institusi keagamaan seperti halnya gereja pada kelompok Kristen kurang dimanfaatkan dengan baik.

Alih kepemimpinan di tubuh parpol dari generasi tua ke generasi muda mulai berlangsung, walau generasi muda tidak dapat menduduki jabatan paling tinggi, mereka hanya akan berhasil naik hingga pada level kedua dalam suatu kepemimpinan. Peralihan kepemimpinan itupun bisa terjadi dikarenakan kekuatan kapital yang dimiliki generasi muda. Dan bukan menjadi rahasia umum, jika suatu jabatan baik dalam birokrasi pemerintahan, parpol maupun legislatif bisa dibeli oleh kekuatan kapital uang.

Gejala kapitalisasi politik ini yang akhirnya melahirkan fenomena “politik keluarga” atau “politik primordialisme” dan “politik patronase” hingga ke level yang paling bawah. Ini akan membahayakan wajah politik dan birokrasi di Kota Manado, karena siapapun yang memiliki kapital uang dapat membeli jabatan itu dan akan membawa gerbong keluarga, famili serta kelompok etnis untuk menduduki jabatan di bawahnya. Maka, tidaklah mengherankan jika di daerah tercipta dinasti baru yang berpikir untuk kepentingan kelompoknya bukan untuk kepentingan yang lebih luas, yakni membangun dan mensejahterakan masyarakat daerah.

Daftar Pustaka

- Almond Gabriel dan Powell Bingham, 1966. *Comparative Politics: Developmental Approach*. Boston Little Brown.
- Azra, Azyumardi, 2000. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.

- Buku Penyempurnaan Pola Dasar Pembinaan Generasi Muda di Jawa Barat, 2005.
- Coleman James S., 1968. "Modernization: Political Aspect". Dalam: David L. Shills (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 10. New York: The Macmillan Co., and the Free Press.
- Daljoeni N., 1976. *Konsep Generasi Muda*.
- Hagopian, Mark N, 1978, *Regime, Movement and Ideology*. New York and London: Logman.
- Huntington Samuel, 1971. "The Change to Change: Modernization, Development and Politics." *Comparative Politics*, No. 3, 1971.
- Keating, Charles J. *Kepemimpinan, Teori dan Pengembangannya*. Jogjakarta. Penerbit Kanisius.
- Mills, Wright, 1956, *The Power Elite*. New York: Oxfrud University Press.
- Pye Lucian, 1966. *Aspects of Political Development*. Boston: Publisher Little Boston.
- Pareto, Vilfredo, 1966, *Scritti Sociologici, Turin U.T.E.T.* Dalam Hasyim, PRISMA. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Pangemanan Sfia E., 2004. *Eksistensi generasi Muda dalam Implementasi pembangunan Politik di Kota Manado*. Dalam *Jurnal Res & Dev*. No. 28 (2) juni 2004.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Welch, Claude E., 1998. "Studi Perbandingan Modernisasi Politik." Dalam Yahya Muhaimin and Colin MacAndrews (Eds.), *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: UGM Press.

BAB IV

ALIH KEPEMIMPINAN DALAM TUBUH ORGANISASI KEPEMUDAAN DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

4.1 Pengantar

Bagian ini menguraikan terjadinya alih kepemimpinan kepada generasi muda di tubuh organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Palembang Sumatera Selatan. Kasus Palembang, Sumsel berbicara tentang kepemimpinan muda pada level regional dan lokal. Bagian ini ditulis oleh Katubi dan Azis Suganda.

4.2 Pemuda dan Kepemimpinan: Temuan dari Palembang

4.2.1 Pendahuluan

"Barang siapa menguasai pemuda, ia menguasai masa depan." Peribahasa itu menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda dalam tiap zaman dan sejarah Indonesia telah mencatat hal tersebut.

Muhammad Hatta sebagaimana dikutip Yudi Latif (2007) mengajukan pertanyaan retorik, "apa sebabnya pemuda, mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik?" Lantas ia jawab sendiri, "Kalau mahasiswa Belanda, Prancis, dan Inggris menikmati sepenuhnya masa muda yang serba menggembirakan, pemuda Indonesia harus mempersiapkan diri untuk suatu tugas yang menuntut syarat lain. Tidak ada jalan lain yang sudah siap dirintis baginya; tidak ada lowongan pekerjaan yang disaipkan baginya. Sebaliknya, mereka harus membangun dari bawah, di tengah-tengah suasana yang seba sukar, di tengah-tengah pertarungan yang penuh dendam dan kebencian. Perjuangan kemerdekaan yang berat membayang di

depannya, membuat mereka menjadi orang yang cepat tua dan serius untuk usianya.”

Bung Hatta menyodorkan alasan lain yang menggelitik. Fakta bahwa sebagian besar pemimpin pemuda ini berasal dari kalangan pegawai tinggi dan kelas berada tidak menyurutkan mereka untuk berjuang. Sebaliknya, sikap orang tua mereka yang terpaksa oleh sistem kepegawaian kolonial untuk berdiam diri, berbohong, dan berbicara yang enak saja tentang masalah politik dan kolonial, memperlihatkan betapa bapak mereka merupakan lambang ketidakjujuran dan ketidakberdayaan abadi. Akibatnya, tidak segan mereka memberontak dan menyempal, ”dari kumpulannya terbuang.” Pemuda pun harus menjadi kaum intelektual yang memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam melakukan perubahan sosial.

Akbar Tanjung (dalam Budiyanto dan Noer Eddy Budiono, 2008:98) menyatakan bahwa secara umum terdapat dua sudut pandang yang membuat posisi pemuda strategis dan istimewa, ditinjau dari sisi kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, pemuda memiliki idealisme yang murni, dinamis, kreatif, inovatif, dan memiliki energi yang besar bagi perubahan sosial. Idealisme yang dimaksud ialah hal-hal yang secara ideal mesti diperjuangkan oleh para pemuda, bukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan luas demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara kuantitatif, terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 210 juta jiwa. Populasi pemuda sebanyak 27-40% dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut (BPS 2005). Lebih lanjut, Akbar Tanjung menyatakan bahwa pemuda memiliki kelebihan yang secara substansial terkait dengan idealismenya yang masih murni dan sepanjang sejarahnya terbukti telah memiliki posisi dan peran yang strategis dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam bidang politik, pemuda telah menunjukkan sumbangannya untuk turut serta mendorong proses demokratisasi bangsa.

Menurut Pandu Dewanata dan Syaifullah (2008:208), tantangan mereka yang sesungguhnya ialah mempertahankan

eksistensi kemerdekaan bangsa dan menjauhkannya dari penjajahan masa kini dalam bentuk ekonomi, politik, dan budaya. Perjuangan atas keutuhan dan kedaulatan eksistensi bangsa dari "penjajahan modern" merupakan salah satu bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Tantangan lain pemuda Indonesia kini dan esok secara fenomenologis ialah memecah eksistensi gerakan organisasi kepemudaan yang menunjukkan gejala adanya perpecahan, pengentalan identitas kelompok masing-masing dan bersifat primordial. Hal itu terjadi karena dua penyebab. *Pertama*, adanya kecenderungan bahwa bangunan interaksi sosial-politik terpola berdasar pada momen, bukan karena perjumpaan dan persamaan visi yang lebih mendasar. Kondisi ini akan menyeret pada fenomena gerakan yang bersifat sesaat dan terpecah-pecah. *Kedua*, adanya kecenderungan pragmatis dalam merumuskan visi dan orientasi gerakan di kalangan aktivis organisasi kepemudaan. Kecenderungan ini menyebabkan terkikisnya sikap independen dan terkuburnya konsistensi sikap serta keringnya komitmen sehingga tidak dapat membaca realitas objektif secara kritis. Kenyataan itu menyebabkan lahirnya kondisi gerakan kepemudaan yang terasing dari nilai-nilai luhur sejarah.

Berkaitan dengan kepemimpinan, Pandu Dewanata dan Chavchay Syaifullah (2008: 233–134) menyatakan bahwa kebijakan kepemudaan, terutama untuk mahasiswa di kampus, pada masa Orde Baru, terutama dengan diberlakukannya NKK/BKK melahirkan dua sisi nilai. *Pertama*, nilai positif bagi mereka yang makin berani mengobarkan api perlawanan terhadap otoritarian. Semangat perlawanan terus dikobarkan karena mereka mengerti akan kebutuhan bangsanya. *Kedua*, nilai negatif yang justru sebenarnya mendominasi pemuda-pemuda Indonesia kala itu. Mereka takut dan bersembunyi di lorong-lorong kehidupan yang paling gelap karena ketakutan mereka untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsanya. Dominasi ketakutan inilah yang justru memperburuk keadaan dan melemahkan jiwa kepemimpinan pemuda. Tidak ada masa proses regenerasi yang pada akhirnya hanya akan melahirkan calon-calon pemimpin yang

bermental lemah dan bahkan tidak mengerti cara menghadapi tantangan. Di sini ada kesalahan historis tentang regenerasi dan kepemimpinan di Indonesia.

Menurut Budiyanto dan Noer Eddy Budiono (2008:99–100), partisipasi pemuda dalam tenaga kepemimpinan tidak memperlihatkan adanya pola tertentu antarprovinsi. Kemungkinan adanya pengaruh karakter sosial budaya masyarakat setempat ikut berperan dalam menentukan pemimpin. Rata-rata tingkat partisipasi pemuda dalam tenaga kepemimpinan pada tingkat provinsi sebesar 30,48%.⁴⁷ Persentase pemuda belum menunjukkan proporsi yang ideal antara proporsi pemuda dan proporsi keterwakilan pemuda di DPR-RI. Pemuda hanya mempunyai 6% wakilnya di DPR RI. Padahal, proporsi pemuda dalam struktur pemuda Indonesia mencapai 37%. Dari 550 anggota DPR RI, jumlah pemuda hanya 33 orang saja. Kita tidak boleh memakai ukuran yang sama dalam membandingkan pemuda zaman dulu dan sekarang karena kondisi yang berbeda memunculkan masalah yang berbeda dan mengharuskan pemuda melakukan tindakan yang berbeda pula.

4.2.2 Masalah Penelitian

Makin maju suatu masyarakat, proses pergantian generasi muda dengan lapisan atasnya akan semakin lancar sehingga tidak sempat memunculkan gayanya sendiri yang khas. Ini menunjukkan bahwa di beberapa masyarakat lapisan generasi muda mengalami kesukaran dalam menggantikan generasi tua (Daldjoeni 1974:35). Hal itu memunculkan sikap curiga-mencurigai yang dibawa oleh anak-anak muda dan generasi tua. Mula-mula dapat berkisar di kalangan

⁴⁷ Pemuda yang dimaksudkan oleh Budiyanto dan Noer Eddy Budiono dalam tulisan ini adalah penduduk yang berusia antara 18-35 tahun. Jika pemuda seperti didefinisikan dalam Undang Undang tentang Kepemudaan (2009, rata-rata tingkat partisipasi pemuda dalam tenaga kepemimpinan pada tingkat provinsi tidak akan mencapai 30,48% seperti yang dikemukakan Budiyanto dan Noer Eddy Budiono ini.

mahasiswa untuk kemudian, kalau berlarut-larut, akan menjalar ke masyarakat luas.

Selain itu, menurut Marim Purba (dalam *Creative Writers Club*, 1993: 67) pembangunan mentalitas-infrastruktur di tingkat kaum muda sangat tertinggal. Dengan kata lain, depolitisasi berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang panjang. Akibatnya, terlihat hampir selama satu dekade lebih, secara sadar hampir seluruh kebijakan pengembangan sumber daya pemuda justru memperlemah elemen-elemen dinamika kepemudaan. Pemuda hanya dilihat sebagai angka-angka, berhenti pada simbol-simbol, dan trauma pada ketakutan ekstremitas dinamika pemuda menyebabkan kita kehilangan kesempatan mengembangkan jutaan sumber daya pemuda dalam satu fase generasi.

4.2.3 Menelusuri Konsep Pemuda

Siapakah yang dianggap pemuda? Bagaimana seharusnya pemuda dipandang dan diperlakukan dalam kehidupan masyarakat? Jawaban atas dua pertanyaan itu bukanlah hal mudah karena ada perbedaan pendefinisian pemuda yang berimplikasi terhadap cara pandang kepada pemuda.

H.A.R. Tilaar (1974:23) menyadari sulitnya memperoleh suatu definisi mengenai pemuda. Dalam hal ini dia akhirnya mempergunakan patokan pemikiran yang dipergunakan UNESCO: "*Young people are those persons society deems young*", dalam *In Partnership with Youth* (1969:10). Menurut dia, dalam pandangan pedagogis klasik, hakekat kepemudaan dapat dicari atau ditinjau dari dua asumsi pokok. *Pertama*, penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai kontinum yang sambung-mbersambung, tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai arti sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen perkembangan itu mewakili nilai sendiri. Oleh sebab itu, arti dari setiap masa perkembangan hanya dapat dimengerti dan dinilai dari masa itu sendiri. Masa kanak-

kanak hanya dapat diresapi karena keanakannya, masa pemuda hanya dapat dimengerti karena sifat yang khas pemuda, dan masa orang tua diidentikkan dengan stabilitas hidup dan kehidupan bersama. Dalam pengertian ini, dinamika pemuda tidak lebih dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola kelakuan yang sudah tersedia, suatu "peralihan kejiwaan," (*internal transformation*) yang sebenarnya hanyalah sekadar suatu proses mikroskopis yang terpisah dan tidak mempunyai arti yang fundamental. Setiap bentuk kelakuan pemuda yang sedikit luar biasa akan dicap sebagai pernyataan yang anomalis, yang tidak sewajarnya. Seyogyanyalah penilaian bertolak dari asumsi kehidupan yang kontinum, pemuda dan kepemudaan merupakan suatu tonggak dari "wawasan kehidupan," yang dengan sendirinya mempunyai potensi dan romantisme sendiri dalam keseluruhan pengarahan untuk mengisi hidup ini.

Kedua, asumsi yang merupakan tambahan atas asumsi wawasan kehidupan, yaitu posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Tafsiran-tafsiran klasik didasari atas tanggapan bahwa kehidupan mempunyai pola yang banyak sedikitnya sudah tertentu dan ditentukan oleh suatu pemikiran yang diwakili oleh generasi tua yang bersembunyi di balik tradisi. Dinamika pemuda tidak dilihat sebagai bagian dari dinamika kehidupan atau lebih tepat sebagian dari dinamika wawasan kehidupan. Pengertian ini disebabkan oleh suatu anggapan bahwa pemuda tidak mempunyai andil yang berarti dalam mendukung proses kehidupan bersama dalam masyarakat. Pemuda dianggap sebagai objek dari penerapan pola-pola kehidupan yang sedikit banyak telah ditentukan dan bukan sebagai subjek yang mempunyai nilai sendiri. Ironi yang terdapat dalam pemikiran ini ialah asumsi adanya suatu tata kehidupan yang didukung oleh subjek-subjek (orang tua) yang telah menghidupi sendi-sendi tata kehidupan itu.

Pandangan dari pedagogis klasik itu tidak akan banyak menolong dalam menjelaskan aspek kepemudaan. Oleh karena itu, Tilaar (1974:25) mengemukakan perlunya pendekatan *ecology* dan *sphere*. Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsur pokok,

yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan unsur tujuan yang mengarah menjadi pengaruh dinamika dalam lingkungan itu. Lingkungan dalam konsep ini mencakup seluruh aspek dari totalitas lingkungan yang dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur lingkungan fisik, sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai kehidupan. Berbeda dari pandangan pedagogis klasik, pendekatan ekologi dan lingkungan melihat pemuda dari potensi manusiawinya sebagai bagian dari keseluruhan potensi manusia yang mendukung ekologi tertentu. Kepemudaan merupakan wawasan kehidupan yang sebagai keseluruhan memberikan dan mendapatkan arti dari konfigurasi potensi lingkungan.

Daldjoeni (1974:34) dalam "Sosiologi Pemuda Indonesia" menyatakan bahwa masa muda dapat dibedakan atas gejala-gejala biologis dengan keanekaan struktur dan dapat dirumuskan ke dalam gejala kultural. Pemuda (youth) dalam tulisan ini meliputi putra dan putri berusia 12–25 tahun, sesuai dengan penetapan Inter-Regional Seminar on The Training of Professional Voluntary Youth Leaders (Denmark 1969). Menurut dia, pengertian generasi dapat dibedakan atas empat aspek, yaitu biologis-psikologis, historis-kultural, sosial, serta psikologis. Berdasar aspek-aspek ini kemudian disusun titik tolak yang tepat untuk generasi, misalnya keseluruhan individu dalam masyarakat yang sebaya-sebagai akibat pengalaman yang mirip dan keterikatan yang sama-bersikap kritis terhadap generasi di atasnya. Dalam istilah generasi terkandung tiga arti, yaitu letak, pertalian, dan kesatuan generasi. Letak generasi menunjukkan tempat mereka bersama sebagai kelompok dalam jenjang usia. Pertalian generasi menunjukkan adanya proses pembentukan generasi yang sebenarnya. Di situ para anggotanya meletakkan diri dan mulai merasa senasib dengan latar belakang problematik saat itu. Bagi generasi muda, rasa senasib ini didorong oleh persamaan rasa curiga dan ragu-ragu terhadap sikap dan tindakan dari pihak generasi tua. Kesatuan generasi baru terbentuk setelah terjadi pembentukan kelompok. Kelompok memiliki ciri batiniah yang sama dalam memandang

sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Dapat saja dalam satu pertalian generasi terdapat beberapa kesatuan generasi.

Dalam kajian budaya, umur merupakan salah satu penanda klasifikasi dan stratifikasi sosial budaya. Menurut Barker (2000:364), deskriptor anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, dan sebagainya adalah kategori identitas yang memikul konotasi yang terkait dengan kemampuan dan tanggung jawab. Pemuda adalah klasifikasi budaya dan usia elastis yang telah dikodekan secara mendua oleh orang tua dalam bentuk indikasi "pembawa masalah" dan "senang-senang". Pemuda membawa harapan bagi orang dewasa pada masa depan, tetapi seringkali juga memunculkan rasa takut dan keprihatinan. Pengkategorian pemuda seringkali hanya dikaitkan dengan usia. Menurut Talcott Parsons (dalam Barker 2000: 334), pemuda bukan satu kategori universal biologi, melainkan satu konstruksi sosial yang tengah berubah yang muncul pada kurun waktu tertentu dan pada kondisi definitif.

Konsep pemuda tidak memiliki makna universal. Namun, "usia biologis" yang dikemukakan Parsons dengan sendirinya merupakan bagian dari sistem klasifikasi budaya dan bukan satu titik pasti tempat harapan sosial digantungkan. Pemuda sebagai suatu usia tidak memiliki karakteristik terpadu dan dia pun bukan merupakan satu tahap peralihan yang aman. Ini akan sangat kentara kalau kita bertanya: (1) Kapan pemuda mulai dan berakhir secara biologis?; (2) Apakah semua orang berusia 16 tahun sama secara biologis dan secara kultural? (3) Apa kesamaan semua orang yang berusia 25 tahun?; (4) mengapa orang-orang muda tampak berbeda di New York, Bombay, dan Rio de Janeiro? (5) Bagaimana sampai terjadi sebagian penduduk dewasa di atas 40 tahun berjuang untuk menjadi muda? (6) Bagaimana mungkin periode "pemuda" tampak lebih lama di negara-negara Barat?

Pemuda sama sekali bukan kategori biologis yang dibalut oleh berbagai konsekuensi sosial sebagai satu serangkaian perubahan klasifikasi budaya yang ditandai oleh perbedaan dan keragaman.

Sebagai satu konstruk budaya, makna pemuda bergeser menurut ruang dan waktu berdasar atas siapa disebut siapa. Pemuda adalah satu konstruksi diskursif. Dia dibentuk oleh cara terorganisir dan terstruktur kita berbicara dan bagaimana mewujudkan pemuda sebagai kategori orang. Oleh karena itu, bagaimana pun cara kita mendefinisikannya, pemuda tetap merupakan satu konsep ambigu. Namun, bagi Grossberg dalam Barker (2000:336), yang menjadi persoalan adalah bagaimana kategori pemuda yang ambigu itu diartikulasikan dengan wacana lain, misalnya kekuasaan, tanggung jawab, harapan, masa depan, keamerikaan, gaya, dan sebagainya. Pemuda adalah bagian dari konteks tempat mereka diorganisasikan oleh masyarakat.

Syamsuddin (2008) mendefinisikan pemuda sebagai generasi yang berusia 20 hingga 40 tahun. Namun, juga disebutkan bahwa konsep tentang pemuda itu bukanlah sebuah gugus gagasan yang hanya dibatasi oleh persoalan umur, melainkan ada dimensi politisnya pula. Oleh karena itu, mengharapkan pemuda yang tampil dalam arena politik hanya mendasarkan segi usia muda adalah kesia-siaan. Track record apa yang kemudian perlu diperhatikan? Ada tiga hal yang penting dijadikan tolok ukur dalam memilih kaum muda, yaitu kaum muda yang memiliki keteladanan moral, intelektual, dan politik (Ari Sujito, 2008). Pertama, pemuda yang secara moral bersih: tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak korupsi, dan tidak pernah melakukan tindakan moral tercela lainnya. Kedua, memiliki visi yang secara intelektual bisa dipertanggungjawabkan berbasis pada kondisi sosial politik masyarakat Indonesia. Pemuda yang bisa menunjukkan arah sekaligus menjelaskan secara gamblang jalan keluar mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemuda yang bisa menginspirasi perubahan dan melakukan transformasi bagi masyarakat. Ketiga, pemuda yang mau berkeringat dan berdarah-darah bersama rakyat. Artinya, kehadirannya dalam politik bukan sesuatu yang instan, tetapi dilalui dengan proses panjang.

Menurut Saifudin (2009:48), istilah orang muda dan generasi muda merujuk pada landasan biologis daripada pemuda yang merujuk

pada sosial budaya. Orang muda biasanya diposisikan dalam suatu rentang usia biologis, yang di luar usia itu orang yang bersangkutan tidak lagi dapat disebut orang muda. Misalnya, orang yang berusia antara 18–40 tahun. Pembagian fase dalam siklus hidup biologis menentukan posisi sekarang. Generasi muda adalah suatu kategori rata-rata usia biologis sejumlah orang, misalnya rentang 18–40 tahun, yang dianggap mampu untuk meneruskan kelangsungan bangsa atau negara yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Peralihan generasi dalam konteks ini tampaknya analog dengan konsep transmisi kebudayaan dalam definisi kebudayaan klasik. Konsep pemuda tidak begitu terikat dengan persyaratan biologis di atas. Yang menjadi titik berat di sini adalah terpeliharanya semangat kolektif tertentu meskipun usia sudah menanjak jauh di atas batas rentang biologis. Sebagai semangat yang menjauh dari kriteria biologis yang ketat itu, konsep pemuda dan kepemudaan lebih mendekati konteks sosial budaya, identitas, dan politik identitas. Konsep pemuda menjadi lebih longgar, fleksibel, dan kontekstual, bergantung pada kondisi-kondisi lokal, nasional, hingga global. tampaknya yang menjadi tumpuan pembicaraan kita dalam konteks seminar ini adalah konsep yang terakhir.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dinyatakan dalam Bab 1 Pasal 1 bahwa "Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun." Berkaitan dengan kepemimpinan pemuda, dinyatakan dalam Bab 1 Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda." Substansi materi UU Kepemudaan ini diarahkan pada tiga aspek utama, yakni aspek perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Dengan demikian, pemuda diharapkan dapat lebih bersikap proaktif sebagai subjek pembangunan, selain untuk memajukan diri dan komunitas kepemudaan, juga mampu mengakselerasi kemajuan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Materi UU

Kepemudaan justru hendak memosisikan pemuda sebagai potensi bangsa yang mesti mendapat porsi perhatian negara secara memadai, dengan tetap menghormati independensi pemuda sebagai kekuatan intelektual. Reformasi memang mengandaikan bahwa negara mesti mengambil posisi sebagai pihak yang memotivasi, memediasi, dan memfasilitasi eksistensi dan kemajuan pemuda, tanpa pendekatan mobilisasi seperti pada masa-masa yang lalu.

Menurut Dachroni (2010) patokan umur kategori pemuda dalam UU Kepemudaan Tahun 2009 itu tentunya ditentukan dengan mengacu pada perbandingan definisi pemuda versi PBB dan beberapa negara ASEAN. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan pemuda sebagai periode transisi antara anak-anak dan dewasa. Oleh karenanya, PBB telah merekomendasikan rentang usia 15–24 tahun sajalah yang masuk dalam kategori pemuda. Hanya beberapa negara ASEAN yang menetapkan usia 30 tahun sebagai batas akhir seseorang dimasukkan dalam kelompok pemuda. Sebut saja, misalnya, negara Bangladesh (15–30 tahun) dan Filipina (15–30 tahun). Kebanyakan negara di PBB justru memasukkan kategori pemuda adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Misalnya, Australia (15–25 tahun), Brunei Darussalam (15–25 tahun), China (14–28 tahun), New Zealand (15–24 tahun), Singapura (15–29 tahun), Sri Lanka (15–24 tahun) dan Thailand (12–25 tahun).

Berbagai pertemuan di tingkat regional maupun internasional yang membahas masalah kepemudaan pun memberikan batasan umur pemuda yang boleh ikut dalam kegiatan yang diadakan, yaitu usia di atas 18 tahun dan di bawah 30 tahun. Definisi pemuda dari aspek umur ini sangatlah penting dalam rangka proses pengkaderan kepemimpinan Indonesia. Akibatnya, saat ini masih cukup banyak kita temukan organisasi kepemudaan yang dipimpin oleh orang-orang yang berusia lebih dari 30 tahun. Hal serupa juga terjadi di organisasi eksternal kemahasiswaan, cukup banyak organisasi kemahasiswaan yang notabeneanya adalah pemuda dipimpin oleh orang-orang yang sudah tidak berusia muda seperti yang digariskan undang-undang.

UU No. 40 Tahun 2009 ini memang masih baru, tetapi pada tahun 2010 ini sudah saatnya seluruh elemen yang berkaitan dengan kepemudaan menerapkan aturan main yang tercantum dalam UU Kepemudaan yang ada karena harus disadari pemuda sebagai *iron stock* kader pemimpin bangsa masa depan. Ada kondisi yang tidak sehat saat ini, yakni organisasi pemuda kerap dijadikan tameng oleh seseorang yang tidak memiliki niat untuk memajukan pemuda, melainkan kepentingan individual saja atau terkadang menjadi agenda politik oleh politisi-politisi atau sayap-sayap partai politik tertentu.

Ini pekerjaan rumah besar bagi organisasi kepemudaan bahwa mereka harus siap melakukan proses pengkaderan dan menyiapkan kader muda untuk memimpin organisasi. Yang senior lalu bagaimana? Harus legowo menerima kenyataan ini. Jangan pernah bermimpi dan berharap kepemimpinan muda akan ada jika organisasi pemuda dipimpin oleh orang-orang yang berusia di atas 30-an tahun ke atas. Inilah salah satu disparitas yang harus dituntaskan. Berdasar paparan di atas, pendefinisian pemuda dapat dilakukan berdasar kriteria tertentu, seperti yang disarankan Taufik Abdullah (1974:1) bahwa pendefinisian pemuda dapat memperhitungkan dua patokan, yaitu aspek objektif-patokan riil yang bisa diperhitungkan seperti kesamaan umur-dan aspek subjektif-perumusan berdasar pada arti yang diberikan masyarakat. Dari segi kependudukan, lebih ditekankan pada pembagian umur, sedangkan sosiologi dan sejarah lebih menekankan pada nilai subjektifnya, yakni kepemudaan dirumuskan berdasar tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historis. Namun, kehadiran generasi dalam masyarakat bukan semata-mata gejala kependudukan, tetapi juga gejala sosiologis dan historis.

Tulisan ini menggunakan konsep "pemuda" berdasar kriteria objektif, yakni berdasar kesamaan umur seperti yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

4.2.4 Pemuda dalam Angka

Menurut Badan Pusat Statistik 2008 (BPS 2008: iv), secara kuantitas dapat dilihat bahwa jumlah pemuda pada tahun 2008 sebesar 78,72 juta jiwa atau 34,52% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 228,02 juta jiwa. Keadaan ini menjadi aset potensial karena sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda (penduduk usia 15–35 tahun). Persentase penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 29,13% dan penduduk yang berumur lebih dari 35 tahun sebesar 36,35%. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, 50,76% dari komposisi pemuda adalah perempuan dan sisanya sebesar 49,24% adalah pemuda laki-laki. Berdasar tipe daerah, sebanyak 51,08% pemuda perempuan dan 48,92% pemuda laki-laki tinggal di perkotaan, sedangkan 50,42% pemuda perempuan dan sebanyak 49,58% pemuda laki-laki tinggal di perdesaan.

Struktur umur pemuda pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pemuda pada kelompok umur 30–35 tahun merupakan komponen terbesar pemuda dengan persentase mencapai sekitar 27,88%. Kelompok umur terbesar berikutnya adalah kelompok umur 15–19 tahun sebesar 25,67%, kemudian diikuti pemuda kelompok umur 25–29 tahun sebesar 24,10%, yang terkecil adalah pemuda kelompok umur 20–24 tahun dengan persentase sebesar 22,35%.

Di daerah perdesaan, pemuda pada kelompok umur 30–35 tahun jumlahnya sebesar 28,52% diikuti pemuda pada kelompok umur 15–19 tahun dengan jumlah 26,52%, kelompok umur 25–29 tahun sebesar 23,74%, dan kelompok umur 20–24 tahun sebagai komponen terkecil sebesar 21,21%. Sementara itu, di daerah perkotaan, komponen terbesar pemuda pada kelompok umur 30–35 tahun sebesar 27,26%, diikuti pemuda pada kelompok umur 15–19 tahun sebesar 24,86%, kemudian kelompok umur 25–29 tahun sebesar 24,45%, dan kelompok umur 20–24 tahun sebesar 23,42%.

Pendidikan tertinggi yang dicapai oleh sebagian besar pemuda secara umum hanya sampai pada tingkat SD dan

SMP. Persentase pemuda yang pendidikan tertingginya sampai SD sebesar 29,04%, sedangkan tingkat SMP sebesar 29,13%. Pemuda yang telah berhasil menamatkan pendidikannya hingga perguruan tinggi persentasenya masih kurang dari 6%. Persentase pemuda yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 1,48% dan pemuda yang tidak tamat SD persentasenya sebesar 5,57%. Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, persentase pemuda menurut kelompok umur di daerah perkotaan dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2 Persentase Pemuda di Sumatera Selatan menurut Kelompok Umur di Perkotaan

Kelompok Umur	Persentase
15 – 19 tahun	26,69%
20 – 24 tahun	25,91%
25 – 29 tahun	21,52%
30 – 35 tahun	25,88%
Jumlah	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2009. Sumatera Selatan Dalam Angka. Palembang: BPS.

Tabel 3 Persentase Pemuda di Sumatera Selatan menurut Kelompok Umur di Perdesaan

Kelompok Umur	Persentase
15 – 19 tahun	25,55%
20 – 24 tahun	23,30%
25 – 29 tahun	23,93%
30 – 35 tahun	27,22%
Jumlah	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2009. Sumatera Selatan Dalam Angka. Palembang: BPS.

Tabel 4 Persentase Pemuda di Sumatera Selatan menurut Kelompok Umur di Perdesaan dan Perkotaan

Kelompok Umur	Persentase
15 – 19 tahun	25,99%
20 – 24 tahun	24,31%
25 – 29 tahun	22,99%
30 – 35 tahun	26,70%
Jumlah	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2009. Sumatera Selatan Dalam Angka. Palembang: BPS.

Ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa pemuda di Sumatera Selatan menurut kelompok umur tidak ada yang terlalu dominan. Artinya, persentase tiap kelompok umur sebanding antara satu dengan yang lain. Sementara itu, di antara keseluruhan jumlah penduduk di Sumatera Selatan, berdasar Hasil Susenas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan 2007–2008 menunjukkan bahwa jumlah pemuda dengan rentang usia 15–34 tahun menduduki persentase terbanyak, yaitu 38,56%. Persentase ini seharusnya juga tercermin dalam perolehan kursi pemuda di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata tidak demikian yang terjadi. Paparan tentang hal tersebut ada di bawah.

4.2.5 Organisasi Kepemudaan di Sumsel dan Pengaruhnya terhadap Kaderisasi Kepemimpinan

Berdasar data Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009, di Provinsi Sumatera Selatan ada 20 Organisasi Pemuda, yaitu (1) Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Sumsel, (2) Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Sumsel, (3) Komando Resimen Mahawijaya Sumsel, (4) Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Sumsel, (5) Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Sumsel, (6)

Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Provinsi Sumsel, (7) Pengurus Daerah Ikatan Putra Putri Indonesia Provinsi Sumsel, (8) Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrat Indonesia Sumsel, (9) Pemuda Kesultanan Palembang Darussalam Provinsi Sumsel, (10) Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) Sumsel, (11) Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Sumsel, (12) Aliansi Mahasiswa Independen (AMI) Sumsel, (13) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Daerah (Gapura) Provinsi Sumsel, (14) Perkumpulan Young Men's Christian Association Indonesia (YMCA Indonesia), (15) Forum Pemberdayaan Pemuda (FPP) Provinsi Sumsel, (16) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumsel, (17) Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Demokrat Provinsi Sumsel, (18) Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu Sumsel, (19) Pengurus Pusat Komunitas Intelektual Muda Sriwijaya (KIMS), dan (20) DPP Pandu Pemimpin Indonesia.

Di antara berbagai organisasi kepemudaan itu, pada masa lalu KNPI pernah menjadi organisasi kepemudaan yang berjaya karena kaderisasinya dalam kepemimpinan dan keberhasilannya dalam melahirkan para pemimpin struktural di pemerintahan. Menurut M. Firman Ridho, seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrat yang termuda, mengatakan:

Ya, kalau untuk di Sumsel ini animo kaum muda itu memang dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi persentasenya lebih kecil daripada Pulau Jawa. Tetapi, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang masuk ke desa, seperti televisi dan jaringan radio, internet, *handphone*, hal itu menumbuh kembangkan minat dan motivasi generasi muda untuk masuk organisasi. Sekarang ini sudah mulai tumbuh organisasi seperti KNPI, yang kegiatannya setiap tahun menjadikan motivasi bagi adik-adik yang masih sekolah, khususnya yang masih SMA. Mereka bertanya-tanya kenapa ya KNPI ini masuk koran terus? Kenapa ya kok KNPI ini mengadakan kegiatan terus? Nah ini juga menjadi salah satu alat promosi bagi

pengembangan organisasi kepemudaan. Beberapa kepala daerah yang ada di wilayah Sumsel ini rata-rata mantan Ketua KNPI, misalnya Wali Kota Palembang dan Bupati Lahat itu adalah mantan ketua KNPI, Wakil Bupati Lubuk Linggau adalah mantan Ketua KNPI, Bupati Empat Lawang yang masih menjabat sebagai bupati sekarang ini juga masih menjadi Ketua KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, memang sudah menjadi semacam *trademark* bahwa jejak langkah orang menjadi kepala daerah karena dulunya memiliki *background* di KNPI.

M. Firman Ridho, M.T., adalah orang yang pernah berkecimpung di KNPI dan kini berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrat. Menurut M. Firman Ridho, banyak pengalaman yang dia peroleh ketika bergabung di organisasi kepemudaan KNPI.

Ya, kita kan memperoleh pengalaman seperti bisa mengenal berbagai tipe manusia; paling tidak bisa menambah jaringan karena nama besar KNPI. Kalau kita bisa berada di dalamnya kita juga bisa *kecipratan* nama besarnya. Iya, kan? Artinya, di dalam KNPI banyak yang kritis-kritis. Dinamikanya sangat tinggi. Karena itu, wajar saja jika KNPI disebut sebagai wadahnya kepemudaan, tempat terakumulasinya berbagai dinamika kepemudaan sesuai dengan *background*-nya masing-masing organisasi kepartaian dan kepemudaan. HIPMI itu kan anggota KNPI juga. Padahal, HIPMI kan tempat berhimpunnya para pengusaha muda. KNPI ini memang wadah berhimpunnya seluruh organisasi kepemudaan, LSM-LSM kepemudaan di pemerintahan. Karena itu, sekarang KNPI menghimpun banyak kader partai karena KNPI sekarang ini memang memiliki keanggotaan multipartai. Artinya, KNPI bukan hanya menjadi wadah tempat berhimpunnya kader Partai Golkar seperti pada zaman Orde Baru dulu.

Sehubungan dengan adanya perubahan usia golongan pemuda dalam Undang-Undang Kepemudaan yang membatasinya sampai pada usia 30 tahun, sebenarnya KNPI harus berpikir ulang dalam

menempatkan orang yang duduk dalam kepengurusan. Hal itu disebabkan oleh masih dominannya orang yang berumur 40 tahun sebagai pengurus KNPI. Jika itu dibiarkan berlanjut, kaderisasi kepemudaan tidak akan berjalan. Menanggapi hal itu, Firman Ridho menyatakan bahwa:

KNPI bisa jadi mengubah AD/ART. Tetapi, itu menunggu kongres KNPI untuk menambah, mengurangi atau merevisi AD/ART agar dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang tentang Kepemudaan Tahun 2009. Artinya, syarat untuk menjadi Ketua Umum KNPI usianya maksimal adalah 30 tahun seperti yang tercantum dalam kategori pemuda versi UU Kepemudaan tahun 2009. Tetapi, untuk mencari sosok pemuda andal yang mampu memimpin yang berusia 30 tahun itu hanya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Itu pun untuk tingkat provinsi. Adapun untuk tingkat kabupaten/kota sampai tingkat pengurus kecamatan sulit mencari yang berumur 30 tahun. Artinya, mencari orang yang maksimal berusia 29 tahun, tetapi mempunyai orientasi berorganisasi itu bukan perkara mudah. Tujuannya memang bagus, yaitu mungkin mau digiring ke depannya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin agar tidak yang tua-tua melulu. Tetapi, sulit di kita ini mencari yang umurnya 29–30th yang sudah mengerti berpolitik. Itu sulit sekali. Saat ini kan rata-rata baru selesai pendidikan, kita bisa berpolitik dan berorganisasi dan bersosialisasi dengan masyarakat dan kita tampil di masyarakat yang bisa berumur 28 itu rata-rata anak-anak konglomerat itu

Namun, di antara sejumlah organisasi kepemudaan itu, KNPI pula yang menjadi sorotan di Palembang karena adanya dualisme kepemimpinan sehingga banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan tidak bisa dilaksanakan. Pada saat ini di KNPI Sumsel terdapat dua kepengurusan, yaitu versi Gedung Pemuda di bawah ketua Husni Chandra (yang sekarang kepemimpinannya diserahkan kepada Yuda Mahrom) dan versi Hotel Novotel dengan ketua Budi Antoni Aljufri, yang kini juga menjadi Bupati Empat

Lawang. Dualisme kepemimpinan KNPI terjadi usai musyawarah provinsi (Musprov) DPD KNPI Sumsel pada 30 Januari 2009.

Dalam musyawarah provinsi (Musprov) KNPI Sumsel di Hotel Novotel Palembang terpilih H. Budi Antoni Al Jufri (HBA) sebagai ketua DPD KNPI Sumsel periode 2009–2012. Pria yang kini menjabat Bupati Empat Lawang ini terpilih secara aklamasi oleh 32 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan DPD KNPI 14 kabupaten/kota. Sebelum peristiwa pemilihan, Ketua DPD KNPI Lubuk Linggau yang juga Wakil Wali Kota Lubuk Linggau SN Prana Putra Sohe yang dicalonkan sejumlah peserta, mengundurkan diri. Dengan terpilihnya Budi sebagai ketua DPD KNPI Sumsel Musprov yang dipimpin M. Firman Ridho (yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009–2014) dan Tajeri S.R. tersebut, mengamanatkan Budi selaku Ketua Formatur untuk segera mungkin membentuk kepengurusan secara lengkap. Jadi, saat ini H. Budi Antoni Al Jufri (HBA) memegang tiga jabatan puncak sekaligus, yaitu sebagai Ketua DPD Partai Golkar Empat Lawang, sebagai Bupati Empat Lawang, dan sebagai Ketua DPP KNPI Provinsi Sumatera Selatan.

Di tempat terpisah, pada saat yang sama (30 Januari 2009) di gedung Sekretariat KNPI Sumsel juga dilakukan Musprov KNPI serupa. Dalam Musprov yang dihadiri 35 OKP dan DPD KNPI kabupaten/ kota tersebut, terpilih Husni Chandra sebagai ketua DPD KNPI Sumsel periode 2009–2012. Dia terpilih dengan perolehan 21 suara menyisihkan pesaingnya, Yudha Mahrom yang hanya mendapatkan 10 suara, sementara sisanya menyatakan abstain. Dalam beberapa waktu kemudian, Husni Chandra menyerahkan kepemimpinan DPP KNPI versi Musprov di Gedung Sekretariat KNPI kepada Yudha Mahrom.

Dalam wawancara pribadi, Yudha Mahrom menyatakan bahwa kepengurusan DPP KNPI yang dipimpinnya sudah mendapatkan dua surat keputusan resmi pengesahan kepengurusan

dari DPP KNPI Pusat.⁴⁸ Namun, entah bagaimana pula akhirnya DPP KNPI Provinsi Sumatera Selatan versi HBA yang digelar di Hotel Novotel akhirnya juga mendapatkan surat pengesahan kepengurusan dari salah satu versi DPP KNPI Pusat, yang ditandatangani Dr. Aziz Syamsuddin.

Pecahnya kepengurusan KNPI di Provinsi Sumatera Selatan yang berlarut-larut ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kaderisasi pemuda dalam kepemimpinan di tingkat daerah. Pasalnya, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang biasanya dapat dilakukan. Pecahnya kepengurusan itu benar-benar melumpuhkan berjalannya keseluruhan program sehingga KNPI kini tidak lagi diminati masyarakat. Padahal, alumni pengurus KNPI sudah menunjukkan potensi kepemimpinannya di masyarakat. Misalnya, Edi Sentana yang pernah menjadi pengurus KNPI kini menjadi Wali Kota Palembang.

Meskipun begitu, Yuda Mahrom menyatakan bahwa memang ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh DPP KNPI versi kepengurusannya. Namun, sangat tidak maksimal karena anggaran dari Pemerintah Daerah tidak dapat dikucurkan kepada DPP KNPI Sumsel yang dipimpinnya. Dia menyadari hal itu karena dia kini tidak memiliki akses untuk menembus birokrasi di Pemda. Mungkin saja anggaran itu dikucurkan kepada DPP KNPI Sumsel versi hotel Novotel yang dipimpin HBA karena dia lebih banyak memiliki peluang menembus birokrasi di Pemda Sumsel.

⁴⁸ Harus diketahui bahwa pada saat ini juga ada dualisme kepengurusan DPP KNPI Pusat. Tetapi, salah satu versi dari Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Aziz Syamsudin menegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan di tingkat pusat. Kemenegpora telah menetapkan DPP KNPI yang dipimpinnya yang legal, jika ada yang lain berarti ilegal. Aziz mengatakan hal itu menjawab situs hukum usai acara pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov I) DPD KNPI Sumsel di Hotel Jayakarta Daira Palembang, Jumat (14/5) malam (Situs Warta Hukum Indonesia 16 Mei 2010).

Kemunculan generasi muda dalam kancah politik memang sebaiknya ditunjang oleh latar belakang pengalaman berorganisasi dan pendidikan yang memadai. Dengan begitu, anak-anak muda itu akan benar-benar mampu mewakili masyarakat karena pemikirannya. Menurut M. Firman Ridho, seorang Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Demokrat yang termuda:

Kaum muda yang berminat terjun ke dunia politik sebaiknya memiliki pengalaman berorganisasi. Itu akan lebih baik. Lebih baik lagi kalau kita berpolitik ditunjang dengan latar belakang pendidikan yang baik karena banyak juga yang terjebak dalam organisasi ini orang-orangnya rusak. Memang tidak ada jaminan bahwa orang yang berhasil dalam berpolitik karena pengalaman dalam berorganisasi karena berorganisasi itu bukan jaminan untuk keberhasilan orang. Semua itu bergantung pada moral masing-masing individu. Malahan ada juga yang rusak karena berorganisasi. Kenapa? Karena dia sudah tahu jalan pintas untuk menggapai sesuatu yang di sebut unsur-unsur politis yang tidak sehat. Di KNPI juga tidak semuanya memiliki pekerjaan yang jelas, tetapi dia masih bisa hidup.

4.2.6. Pemuda Sumsel dalam Keanggotaan DPRD periode 2009–2014

Jumlah pemuda yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan tergolong sedikit. Hal itu dapat dibuktikan melalui perolehan kursi dari lima partai politik besar di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasar kelompok umur, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai berikut.

Tabel 5 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 dari Partai Golkar menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Perolehan Kursi	Persentase
20 – 24	–	–
25 – 29	1	6,25%
30 – 34	1	6,25%
35 – 39	1	6,25%
40 – 44	2	12,50%
45 – 49	1	6,25%
50 – 54	–	–
55 – 59	7	43,75%
60 – 64	3	18,75%
65 – 69	–	–
Jumlah	16	100%

Sumber: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 yang diolah oleh peneliti sendiri.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dominasi kaum tua, terutama kelompok umur 55–59 tahun, tampak sekali di tubuh Partai Golkar. Pemuda dengan kelompok umur sampai 30 tahun hanya mendapatkan 6,25% saja.

Tabel 6 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 dari Partai Demokrat Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Perolehan Kursi	Persentase
20 – 24	–	–
25 – 29	–	–
30 – 34	–	–
35 – 39	3	23,08%
40 – 44	2	15,38%
45 – 49	3	23,08%
50 – 54	1	7,69%
55 – 59	4	30,76%
60 – 64	–	–
65 – 69	–	–
Jumlah	13	100%

Sumber: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 yang diolah oleh peneliti sendiri.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dominasi kaum tua, terutama kelompok umur 55–59 tahun dan 45–49 tahun, tampak sekali di tubuh Partai Demokrat. Pemuda dengan kelompok umur sampai 30 tidak ada yang mendapatkan kursi karena partai ini adalah partai baru sehingga kaderisasi belum dapat dilihat secara jelas.

Tabel 7 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 dari PDI-P menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Perolehan Kursi	Persentase
20 – 24	–	–
25 – 29	–	–
30 – 34	1	9,09%
35 – 39	1	9,09%
40 – 44	2	18,18%
45 – 49	5	45,45%
50 – 54	1	9,09%
55 – 59	1	9,09%
60 – 64	–	–
65 – 69	–	–
Jumlah	11	100%

Sumber: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 yang diolah oleh peneliti sendiri.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dominasi kaum tua, terutama kelompok umur 45–49 tahun, tampak sekali di tubuh PDI-P. Pemuda dengan kelompok umur sampai 30 tahun hanya mendapatkan 6,25% saja. Seorang kader PDI-P yang berusia 30 tahun dan mampu menembus kompetisi ini kebetulan adalah seorang kerabat dekat dari salah satu Ketua DPP PDI-P Pusat. Artinya, hal ini dapat dibahas berkaitan dengan sosialisasi keluarga terhadap dunia politik kepada anak, yang memungkinkan percepatan kematangan pada diri anak untuk terjun ke dunia politik.

Tabel 8 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 dari PKS menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Perolehan Kursi	Persentase
20 – 24	–	–
25 – 29	–	–
30 – 34	–	–
35 – 39	1	14,29%
40 – 44	4	57,14%
45 – 49	–	–
50 – 54	1	14,29%
55 – 59	–	–
60 – 64	1	14,29%
65 – 69	–	–
Jumlah	7	100%

Sumber: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 yang diolah oleh peneliti sendiri

Perolehan kursi di DPRD Sumsel dari PKS menunjukkan bahwa kelompok umur 40–44 meraih kursi terbanyak. Dibanding partai lain, yaitu Partai Golkar, Demokrat, dan PDI-P, kelompok umur yang memperoleh kursi terbanyak dari PKS ini masih jauh lebih muda. Masalah kaderisasi dari partai ini juga belum dapat dilihat dengan jelas karena partai ini dapat dianggap sebagai partai baru.

Perolehan kursi terbanyak Partai Gerindra ada pada kelompok umur 35–39 tahun. Dibanding empat partai di atas, kelompok umur ini tentu masih jauh lebih muda. Meskipun begitu, sebagai partai baru, kaderisasi kepemimpinan pada Partai Gerindra belum dapat dilihat saat ini.

Tabel 9 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 dari Partai Gerindra menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Perolehan Kursi	Persentase
20 – 24	–	–
25 – 29	–	–
30 – 34	–	–
35 – 39	3	50%
40 – 44	–	–
45 – 49	1	16,67%
50 – 54	1	16,67%
55 – 59	1	16,67%
60 – 64	–	–
65 – 69	–	–
Jumlah	6	100%

Sumber: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 yang diolah oleh peneliti sendiri.

Tabel 10 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 dari Lima Partai Besar Pemenang Pemilu Sumsel di menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Perolehan Kursi	Persentase
20 – 24	–	–
25 – 29	1	1,88%
30 – 34	2	3,78%
35 – 39	9	16,98%
40 – 44	10	18,88%
45 – 49	10	18,88%
50 – 54	4	7,55%
55 – 59	13	24,50%
60 – 64	4	7,55%
Jumlah	53	100%

Sumber: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009–2014 yang diolah oleh peneliti sendiri.

Tabel tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah pemuda yang mampu meraih kursi di DPRD Sumatera Selatan sangat sedikit. Apalagi jika kategori pemuda mengikuti UU Kepemudaan tahun 2009 yang mensyaratkan sampai batas umur 30 tahun.

Menanggapi sedikitnya kaum muda yang bisa menembus atau duduk di parlemen daerah, menurut Firman Ridho karena:

Banyak yang tidak terpilih itu karena pengeluarannya begitu banyak. Jadi, dengan pemilihan rakyat saat ini memang pemilihan yang menghabiskan banyak uang. Karena itu, kita calon legislatif ini hampir sama perilakunya dengan calon kepala daerah. Karena dipilih langsung oleh masyarakat dan kalau pemimpin kepala daerah itu calonnya ada 4 orang dalam satu kabupaten kalau ini kan 2 kabupaten, dan jumlah kursi yang di perebutkan jumlah 16 orang, tetapi jumlah caleg yang di pilih katakanlah jumlahnya 10 orang. Nah, kali berapa partai, yaitu sekitar 300 orang. Dari 300 orang ini yang bisa bekerja katakanlah 150 orang dan segala macam cara upaya semuanya mengeluarkan uang. Besar kecil uang itu tidak menjadi patokan apakah orang itu berhasil atau tidaknya menjadi anggota legislatif. Memang lebih enak kalau uangnya lebih, tetapi kalau cara pembelanjanya salah, sebanyak-banyak uang juga bisa habis dan belum tentu bisa lolos ke DPRD. Banyak yang habis miliaran rupiah, tetapi kalah. Tetapi, ada juga yang habis miliaran dia berhasil karena dia membelanjakan uangnya dengan tepat. Saya kira nilai minusnya pemilihan langsung oleh rakyat itu beginilah. Peredaran uang yang di masyarakat itu lebih tinggi. Saya juga jujur ratusan juta uang saya keluar. Alhamdulillah, yang saya banggakan adalah uang itu bukan untuk membeli suara rakyat, tetapi saya mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi rakyat. Misalnya, mereka minta difasilitasi untuk olah raga bola volley, mereka membuat proposal dan saya penuhi. Alhamdulillah, saya bisa menunjukkan kepada semuanya bahwa saya tidak membeli suara mereka.

Banyak kader Partai Demokrat yang muda-muda gagal juga untuk duduk di kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menurut M. Firman Ridho, hal itu berkaitan dengan kekurangan kemampuan dalam memobilisasi massa, kekurangan dana, dan juga fasilitas lain yang tidak memadai.

Ya hal itu disebabkan oleh kurangnya tingkat kemampuan untuk memobilisasi massa dan jaringan-jaringan juga di tunjang finansial juga. Kalau pemilihan langsung begini jujur susah bergerak kalau kita tidak ditunjang fasilitas yang memadai dari semua sisi. Hasilnya pasti tidak akan optimal. Selain itu, kurangnya keyakinan dan tidak percaya diri. Kedua, minimal untuk menjadi seorang pimpinan daerah, harus memiliki kekuatan finansial dan popularitas. Ketiga, semua itu bergantung pada proses yang mereka bentuk di sini.

Berkaitan dengan modal popularitas, Ridho menanggapi sebagai berikut.

Sekarang masyarakat lebih pintar. Mereka melihat popularitas itu bukan dia seorang artis untuk katakanlah pemilihan kepala daerah, tetapi melihat *background* dia dan *history*-nya selama ini sebagai apa, terus dia dari mana, kerja apa, dan perhatian dia ke masyarakat. Jadi, katakanlah ukuran-ukuran yang menjadi patokan popularitas ialah paling tidak kiprah dia itu sudah dirasakan masyarakat selama ini. Kalau suatu saat nanti, mungkin lima tahun nanti, maju menjadi salah satu calon legislatif, barang kali orang banyak akan mengenalnya. Kalau selama ini kita tidak tahu juntrungannya dari mana itu karena adanya faktor uang ya, itu bisa saja diterima masyarakat, tetapi ya barangkali uangnya saja yang mau di ambil. Masyarakat sekarang sudah pintar dalam menghadapi masalah seperti ini, bukan berarti itu di tolak mentah-mentah kedatangannya uang itu. Uangnya tetap diambil dan masyarakat belum tentu memilih dia.

Sehubungan dengan rendahnya perolehan kursi pemuda di DPRD Sumatera Selatan, salah satu anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI-P, yaitu Susanto Adjis, SH., yang masih berusia 37 tahun menyatakan bahwa salah satu faktor penyebabnya ialah adanya kemandegan regenerasi di tubuh PDI-P pada tahun-tahun sebelumnya sehingga terlambat mengorbitkan anak-anak muda dalam kancah politik, baik di tingkat nasional maupun regional. Untuk saat ini, menurut dia, di Sumatera Selatan, jumlah anggota DPRD yang "berusia muda" jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Barangkali itu pengaruh dari sistem pemilihan langsung, yang memungkinkan anak-anak muda berjuang meraih suara terbanyak. Hal itu berbeda dengan pemilu legislatif sebelumnya yang berdasarkan nomor urut. Jika pemilu legislatif dilakukan berdasar nomor urut, kesempatan anak-anak muda pada umumnya menjadi hilang karena "kalah tua" dan juga "kalah modal."

Menurut Ardian, seorang pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, ada perbedaan umur biologis dengan umur subjektivitas. Perbedaan itu kian tampak karena adanya perbedaan umur harapan hidup pada zaman dulu dan sekarang. Oleh karena itu, kini dunia perpolitikan di Sumatera Selatan didominasi oleh kelompok umur 50 tahunan yang masih merasa muda dan juga masih dianggap muda oleh beberapa kalangan. Generasi muda itu kan disebut sebagai masa transisi, antara anak muda dan orang tua. Persoalannya, orang tua zaman sekarang itu tidak bisa dianalisis dengan menggunakan satu faktor saja karena orang tua zaman sekarang ini tidak bisa dikatakan seperti orang tua dulu. Contohnya ialah orang tua yang berusia 56 tahun dan sudah menjalani masa pensiun itu badannya masih segar dibanding dengan orang seusia mereka pada zaman dulu. Jadi, sekarang ini usia harapan hidup itu jauh lebih tinggi dibanding pada masa lalu. Artinya, pada usia seperti itu, mungkin mereka masih merasa muda. Ini menjadi persoalan dilematis karena usia 50-an dalam kancah politik masih dianggap muda. Padahal, dari sisi usia biologis sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, masih ada saja orang

yang berebut jabatan sebagai pemimpin organisasi pemuda, padahal usianya sudah di atas 40 tahunan.

Lebih lanjut Ardian menyatakan bahwa ketidakhadiran pemimpin muda dalam kancah perpolitikan di Sumatera Selatan karena tidak jelasnya aturan main dalam kenaikan jabatan dalam hierarki di kepartaian. Akibatnya, kini banyak sekali anak-anak muda yang lari dari satu partai tertentu karena merasa tidak diberi tempat di partai tersebut. Selain itu, karena ketidakjelasan aturan main, ada pula anak muda yang matang di luar sistem tiba-tiba bisa menjadi Ketua DPP salah satu partai. Padahal, posisi Ketua DPP Partai itu mungkin saja pelarian belaka. Sekarang ini kenapa pemimpin itu tidak muncul dari suatu Kader politik? Di dalam organisasi tersebut perkara suatu kenaikan jabatan itu bisa berubah. Jadi, tidak ada persyaratan yang pasti. Akibatnya, banyak anak-anak muda yang lari dari partai. Contohnya ialah Partai Golkar. Partai Golkar merupakan salah satu partai yang mapan, kader sosialnya bagus. Akan tetapi, di tubuh partai itu banyak sekali orang tua yang masih bersemangat untuk bernaung di bawah Partai Golkar. Akibatnya sempit kesempatan bagi anak muda untuk berkiprah di dalamnya. Apalagi akan menjadi preseden buruk jika hierarki usia menjadi patokan bisa tidaknya seseorang maju sebagai calon dalam kepemimpinan. Akibat lanjutnya ialah anak muda "lari" dari Partai Golkar. Sekarang bisa kita lihat pada beberapa partai baru yang pemimpinnya adalah keluaran dari Partai Golkar. Misalnya, yang memimpin PDI-P dan sekarang menjadi Wali Kota Palembang dulunya adalah kader Golkar, sedangkan wakil Wali Kota Palembang yang sekarang menjadi Ketua PDI-P Kota Palembang adalah keluaran dari Partai Golkar. Ini membuktikan bahwa ada semacam kemacetan kaderisasi di tubuh Partai Golkar. Padahal, Partai Golkar itu bagus. Contoh itu membuktikan bahwa baik di Partai Golkar maupun di partai besar lain tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk latihan sehingga mereka tidak bisa muncul ke permukaan atau bahkan terpendam oleh hiruk-pikuknya generasi tua yang berebut kekuasaan. Jika ada anak muda

muncul dari partai besar seperti Golkar, barangkali itu hanyalah karena bernasib baik.

Kita jangan membuat situasi seperti pepatah ”orang-orang muda yang bernasib tidak bisa di lawan sama orang yang pintar.” Maksudnya, kemunculan anak-anak muda itu hanya karena nasib baik dan bukan karena kepandaianya, baik kepandaian dalam berorganisasi maupun kepandaian dalam bidang lain. Meskipun demikian, situasi seperti dalam pepatah itulah yang diciptakan dalam sistem kaderisasi di banyak partai di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Akibat lanjutannya ialah banyaknya anak-anak muda yang matang di luar sistem. Itu berbahaya. Kalau kita balik ke belakang, sejarah banyak menunjukkan kepada kita bahwa begitu orang tua yang dominan dalam pemerintahan turun, ternyata tidak ada penggantinya yang matang. Akibatnya, muncul orang yang matang tapi dari luar sistem. Jadi, kalau kita lihat sekarang ini memang kaderisasi itu agak liar karena peluang itu tidak di berikan oleh sistem dan penyeleksian di tingkat organisasi. Akhirnya, ketidakjelasan kemunculan kader tadi memunculkan birokrasi yang cenderung menuju ke manajemen konflik. Kita bisa lihat dari fenomena Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng di Partai Demokrat, yang sebetulnya belum waktunya memegang kendali. Anas ini kan pelarian dari KPU. Pada waktu KPU diserang orang dan Anas selamat karena dia menyelamatkan diri ke Partai Demokrat. Padahal, keputusan KPU kan keputusan politik. Jadi, kalau sudah di ketok palu dalam sidang, semua ketua terikat dengan keputusan itu. Tapi kenapa Anas Urbaningrum bisa selamat sendiri dari sekian banyak ketua KPU?

Jadi, kalau kita lihat sistem kaderisasi, perlu ada semacam pembenahan sistem di dalam tubuh partai dan birokrasi. Misalnya, dalam sistem birokrasi kita, harusnya kenaikan pangkat itu perlu kita tinjau kembali. Artinya, kalau kita menghargai orang-orang *pinter* pada generasi muda, harus jelas antara fungsional dan kepangkatan. Jadi, tidak menahan kenaikan fungsional anak-anak muda untuk menjadi seorang profesor, misalnya. Itu harus dibedakan dengan kepangkatan. Kemudian, penjenjangan kaderisasi di partai politik

juga harus jelas. Contohnya, kalau menjadi pengurus DPP Provinsi, misalnya harus mempunyai pengalaman apa? Pernah menjadi apa? Lulusan apa? Sekarang ini di kepartaian tampaknya kan tidak ada seperti itu. Coba lihat, tiba-tiba Andy A. Malarangeng melesat masuk ke Pengurus DPP Partai Demokrat. Ini sebenarnya merusak sistem. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kaderisasi sekarang ini sangat memprihatinkan sekali sehingga munculah sekarang ini generasi muda dan kaderisasi yang liar.

Selain itu, ketidakhadiran anak-anak muda Sumatera Selatan di DPRD dan juga kepengurusan partai bisa jadi disebabkan oleh faktor budaya orang Palembang, yaitu lebih suka menekuni bidang perdagangan. Hal itu terjadi akibat pengaruh ajaran agama Islam yang memberikan anjuran untuk bekerja di sektor perdagangan. Menurut Ardian, Karena ada pengaruh budaya juga. Kalau orang Palembang di sini kekuasaan itu tidak terlalu menarik. Dia lebih suka ke pasar. Saya pernah mengadakan penelitian tentang Etos Kerja Kelompok Etnis Palembang. Orang Palembang itu meskipun pendidikannya tinggi, dia larinya ke pasar. Jadi, mereka tidak begitu tertarik dengan pegawai negeri. Tentu saja ada satu dua orang yang masuk sebagai pegawai negeri, tetapi dia lebih tertarik pergi ke pasar. pengaruh budaya. *Pertama*, orang Palembang budayanya adalah dagang. Pedagang kerjanya sedikit, tetapi hasilnya banyak. *Kedua*, ada pengaruh Islam. Dalam Islam diajarkan bahwa salah satu pekerjaan yang dimungkinkan ialah berdagang. Dengan berdagang masyarakat dapat mengatur orang melalui perdagangan itu. Ini bisa menjelaskan bahwa tidak begitu banyaknya anak muda yang terjun ke dunia politik karena ada unsur pengaruh budaya.

Hasil diskusi peneliti dengan Bapak Dr. Adjis Saip, SH., mantan Ketua DPRD Sumsel periode 1999–2004 dapat mengungkap berbagai masalah yang dihadapi PDI-P dalam hal regenerasi. Dia sampai pada titik simpulan bahwa regenerasi di tubuh PDI-P terlambat. Informan juga mengemukakan pentingnya kembali ke ideologi PDI-P yang tidak banyak diketahui oleh pengurus PDI-P. Persoalan itu rupanya berpengaruh besar terhadap pemilihan sosok

yang dicalonkan dalam pilkada. Dia berharap anak-anak muda usia 30-an tahun harus mulai diorbitkan dalam kancah politik untuk mengalami langsung pertarungan di lapangan secara sehat. Tanpa diterjunkan langsung dalam pertarungan, mustahil kader-kader politik akan matang seperti yang diharapkan.

Hasil diskusi dengan Ibu Anisah, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa ada perubahan struktur anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berdasar usia anggota. Kini mereka jauh lebih muda-muda dibanding sebelumnya. Pengertian muda dalam konteks ini adalah orang yang berusia di atas 40 tahun. DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada periode sebelumnya didominasi oleh kelompok umur 50-an tahun. Bahkan, dua dari tiga anggota DPRD dari Sumsel masih berusia dua puluh tahunan. Namun, kita memang harus melihat kinerja mereka sehingga bisa mengatakan berkualitas tidaknya anggota legislatif dan DPRD yang masih berusia muda karena dua dari anggota DPRD dari Sumsel ini adalah anak pejabat di Sumsel.

4.3 Peran KNPI dalam Mempersiapkan Regenerasi Kepemimpinan Daerah

4.3.1 KNPI Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Orde Baru

Persoalan kepemimpinan bukanlah suatu persoalan yang terlepas dari persoalan masyarakat pada umumnya. Karena dia berada dalam suatu seting masyarakat dan menjadi bagian dari dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, berbagai variabel yang terdapat dalam masyarakat, dapat memiliki pengaruh terhadap persoalan kepemimpinan. Demikian juga sebaliknya, kepemimpinan juga akan memberi pengaruh terhadap kondisi masyarakat dan sistem perpolitikan nasional. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara kepemimpinan dengan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Persoalan kepemimpinan di daerah juga mendapat pengaruh dari kondisi kepemimpinan dan sistem perpolitikan nasional, dan tentu saja kondisi masyarakat daerah yang bersangkutan. Demikian halnya

dengan regenerasi kepemimpinan yang akan melahirkan pemimpin baru. Kondisi masyarakat di tingkat nasional dan di tingkat daerah akan mempengaruhi sistem dan proses terjadinya regenerasi kepemimpinan.

Dalam pendahuluan telah dinyatakan bahwa pada tahun 2010, penelitian tentang Generasi Muda dan Perubahan Kepemimpinan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara (Manado) dan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang). Pada masing-masing daerah, diteliti partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau kepemudaan. Di Palembang, setelah dilakukan identifikasi awal, ditentukan bahwa ormas yang diteliti adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Keberadaan Organisasi pemuda ini secara nasional dicetuskan pertama kali oleh kelompok Cipayung pada tanggal 23 Juli 1973. Undang-undang Keormasan pada waktu itu memposisikan KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda. Ide dasar utama pendirian Komite Nasional Pemuda Indonesia di tingkat nasional adalah membentuk kesamaan visi di kalangan pemuda dalam menatap masa depan bangsa. Ide tersebut dielaborasi menjadi 3 (tiga) tujuan organisasi KNPI, yakni:

- (1) Wadah Kaderisasi pemimpin bangsa di masa depan.
- (2) Media Komunikasi antar generasi muda.
- (3) Wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Organisasi KNPI lebih berorientasi untuk melakukan pembentukan wawasan daripada melaksanakan persoalan-persoalan teknis. Pada setiap tingkatan, di pemerintahan Pusat dan di daerah, nampak orientasi pembentukan wawasan lebih tinggi daripada kegiatan teknis. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11 Porsi Aktivitas KNPI Menurut Kategorisasi Kegiatan Pada Masing-masing Tingkatan Daerah

Orientasi	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Wawasan	80%	70%	60%
Teknis	20%	30%	40%

Pada awal berdirinya KNPI memperoleh fasilitas yang sangat besar dari Pemerintah Orde Baru dengan memanfaatkan Undang-undang Keormasan yang berlaku saat itu. Oleh sebab itu, tidak heran jika Ormas Komite Nasional Pemuda Indonesia oleh sebagian generasi muda dianggap sebagai “Organisasi Plat Merah”, dianggap sebagai “boneka pemerintah”, dan di cap sebagai Ormas yang tidak independen. Akibatnya, bermunculan berbagai resistensi dari berbagai organisasi pemuda lainnya, terutama organisasi mahasiswa yang sudah sejak lama eksis. Organisasi mahasiswa menganggap bahwa organisasi pemuda sebaiknya memiliki independensi dalam mengartikulasikan aspirasi dan melaksanakan aktivitasnya. Independensi ini dianggap tidak dimiliki KNPI yang merupakan satu-satunya organisasi pemuda di zaman Orde Baru yang pembiayaan aktivitasnya dianggarkan di dalam APBN.

Dengan berbagai kemudahan fasilitas yang diterima KNPI, yakni fasilitas dari pemerintah untuk membiayai aktivitasnya, ormas KNPI dapat merealisasikan berbagai gagasan dan menjalankan berbagai aktivitas baik yang berupa diskusi rutin, peringatan-peringatan dalam rangka hari kepemudaan dan hari besar nasional, penggalangan organisasi-organisasi pemuda yang diklaim berada di bawah KNPI, maupun berbagai aktivitas pembangunan yang memerlukan dukungan ormas ini.

4.3.2 Aktivitas Organisasi KNPI

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi pemuda yang

memegang peranan kunci dalam mempersiapkan generasi muda menyongsong regenerasi kepemimpinan daerah.

Sejak awal berdirinya, KNPI Sumatera Selatan telah memposisikan diri sebagai sentral kegiatan pemuda. Rentang kendali yang dirancang dan diklaim oleh KNPI secara territorial meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota, sedangkan secara substansial, meliputi berbagai bidang kegiatan, terutama bidang pembinaan pemuda. Dukungan pemerintah yang bersifat material dan non material terhadap pelaksanaan berbagai program-program KNPI, membuat seluruh program dapat terlaksana dengan lancar. Begitupun berbagai ide yang muncul dari kalangan aktivis KNPI dapat terealisasikan dengan baik. Kondisi ini membuat semangat menggali ide dan melaksanakan aktivitas di kalangan KNPI menjadi semakin tinggi. Setiap ide yang muncul, didiskusikan bersama, diseleksi secara organisatoris, dan diajukan menjadi program yang dilaksanakan KNPI, termasuk program pembinaan terhadap organisasi-organisasi pemuda lain yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan.

Dari segi hubungan antara KNPI Pusat, KNPI Provinsi dan KNPI Kabupaten/Kota, terjalin hubungan yang saling mendukung dan saling membesarkan. Kedatangan pengurus KNPI Pusat ke daerah selalu disambut secara besar-besaran, begitu juga sebaliknya. Ketika KNPI Kabupaten/Kota menghadapi persoalan di wilayahnya, KNPI Provinsi memberikan dukungan penuh kepada KNPI Kabupaten/Kota untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi KNPI Kabupaten/Kota. Pendek kata, hubungan harmonis dan saling mendukung antara KNPI Pusat, KNPI Provinsi dan KNPI Kabupaten Kota, telah mendatangkan sinergi yang berperan membesarkan KNPI di Sumatera Selatan. Salah seorang Ketua KNPI Provinsi Sumatera Selatan dalam wawancara dengan penulis ketika itu dihadapan pengurus KNPI Kabupaten/Kota sebagai berikut.

'Kalau kalian membesarkan kami, maka kalian juga akan menjadi besar. Oleh karena itu, besarkan kami.'

Aktivitas KNPI berjalan cukup intens yang didasarkan pada program-program yang dicetuskan dan kemudian dirumuskan untuk ditidakklanjuti. Perumusan program itu, diawali oleh munculnya pertanyaan besar di kalangan pengurus:

“Bagaimana KNPI di Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi bermakna?”

Maka, pertanyaan besar itu dirumuskan ke dalam berbagai ide dan kemudian dituangkan dalam berbagai kegiatan yang dapat direalisasikan, antara lain:

- (1) Melakukan sosialisasi KNPI di Televisi Lokal
- (2) Melakukan penghijauan untuk mencegah banjir dan tanah longsor.
- (3) Melakukan seminar nasional tentang HIV AIDS.
- (4) Bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk melatih Pemuda, kemudian dikirim bekerja di Timur Tengah.
- (5) Membentuk Desa Pemuda di Daerah Lubuk Linggau.
- (6) Berbagai kegiatan di bidang pertanian
- (7) Berbagai aktivitas peringatan yang bersifat keagamaan
- (8) Menyediakan tanah untuk gedung KNPI (yang sekarang telah menjadi Gedung Pemuda) dengan mengumpulkan 30 orang pemegang Hak Pengelola Hutan (HPH) di wilayah Sumatera Selatan.
- (9) Pembangunan Gedung Pemuda sebagai gedung KNPI pada tahun 1988-1989.

Di samping program-program pembangunan tersebut yang dalam pelaksanaannya hampir selalu melibatkan Organisasi Pemuda yang terdapat di lingkungan Sumatera Selatan, Pengurus KNPI Sumatera Selatan juga melaksanakan aktivitas rutin seperti kunjungan pembinaan ke pengurus-pengurus daerah kabupaten/kota, dan ke KNPI Pusat. Aktivitas rutin lainnya adalah diskusi berkala yang selalu dilakukan di Gedung Pemuda. Topik diskusi terdiri dari berbagai persoalan yang aktual dihadapi daerah-daerah, dan tingkat nasional. Kadang kala diskusi ini dilakukan dengan mengundang

narasumber dalam suatu bidang persoalan, tetapi sering juga tanpa kehadiran narasumber dari luar. Pada umumnya, para aktivis pemuda membahas persoalan yang sedang hangat diberitakan di media massa.

Padatnya acara ormas KNPI ini, menyebabkan Gedung Pemuda sebagai “markas”, relatif tidak pernah sepi sepanjang hari. Kalaupun tidak ada kegiatan formal, para aktivis hampir selalu menyempatkan diri datang bergabung. Frekuensi pertemuan antara para aktivis sangat tinggi. Oleh karena itu, kedekatan hubungan antar para aktivis pada masa itu sangat erat dan rasa persaudaraan di antara anggota KNPI sangat kental. Masing-masing anggota diikat oleh perasaan seperjuangan pada diri masing-masing aktivis terhadap aktivis lainnya. Beberapa mantan aktivis menyatakan bahwa pada masa itu telah dapat terbentuk suatu kesadaran bersama (*collective consciences*) di antara sesama pengurus KNPI.

Selain terbentuknya kesadaran kolektif (*collective consciences*) sebagai warga KNPI, di kalangan para pengurus juga terjadi penularan wawasan kebangsaan antara sesama pengurus. Penularan sangat dimungkinkan terjadi karena kerapnya terjadi pertemuan fisik dan gagasan atau ide melalui pertemuan-pertemuan dan diskusi rutin antar sesama aktivis.

4.3.3 Sistem Rekrumen Kepengurusan di Tubuh KNPI

Sistem penentuan kepemimpinan di Ormas kepemudaan KNPI pada masa Orde Baru selalu harus mendapat restu dari pihak penguasa yang berkuasa. Di tingkat Pusat, harus mendapat restu Presiden, sedangkan di tingkat provinsi harus mendapat restu gubernur. Kondisi ini dimungkinkan karena KNPI adalah pelaksana program pemerintah di bidang kepemudaan. Walaupun terdapat proses rekrumen yang dirancang mulai dari bawah, tetapi pada akhirnya, calon yang disetujui penguasalah yang diputuskan menjadi Ketua KNPI. Konsekuensi dari sistem rekrumen seperti ini, relatif tidak pernah terjadi perbedaan pendapat yang berseberangan antara Ketua KNPI dengan pihak pemerintah.

Seluruh aspek pembiayaan aktivitas KNPI dibiayai pemerintah, kondisi ini menjadikan setiap pelaksanaan program KNPI hampir tidak pernah mengalami kesulitan. Akibatnya, dapat dimengerti juga jika program KNPI tersebut tidak pernah bertabrakan dengan kebijakan pemerintah karena hampir semua aktivitas KNPI kala itu dibiayai dengan dana APBN (di tingkat pusat) atau APBD (di tingkat Daerah). Artinya, sesuai dengan sistem pemerintahan saat itu yang bersifat sentralistis, berimplikasi terhadap penentuan kepengurusan KNPI yang terpusat juga dan ditentukan oleh penguasa maka program-program KNPI juga merupakan bagian dari program penguasa.

Walaupun demikian, proses yang mengawali pemilihan calon-calon ketua yang dilanjutkan dengan pemilihan calon-calon ketua, tetap merupakan tahap penyaringan organisasi terhadap para calon ketua. Sementara itu, syarat untuk menjadi calon ketua KNPI antara lain adalah:

- (1) Pernah menjadi pengurus KNPI Provinsi Sumatera Utara, atau Pengurus salah satu OKP di Sumatera Utara atau Ketua KNPI tingkat kabupaten/kota.
- (2) Berdomisili di Kota Palembang.
- (3) Mengikuti proses pencalonan sejak awal sesuai petunjuk operasional AD/ART KNPI Sumatera Selatan.

Penyaringan dari bawah ini untuk memilih calon-calon yang akan diajukan sebagai ketua KNPI kepada penguasa daerah. Dua (2) tahap proses pemilihan ketua yang bersifat *top down* dan *bottom up* ini ditempuh sebagai cara untuk mendapatkan Ketua yang selain dianggap memiliki kemampuan dalam memajukan organisasi dan sekaligus juga memperoleh restu dari pihak penguasa.

Pada masa Orde Baru, proses regenerasi dan berbagai aktivitas KNPI Sumatera Selatan nampaknya berjalan lancar, tidak ada hambatan berarti. Meskipun tetap terjadi dinamika internal yang terjadi pada masa itu, tetapi tidak mendatangkan persoalan berarti bagi kelancaran aktivitas organisasional. Harmoni di kalangan aktivis

dapat menekan konflik yang muncul antar aktivis. Lagipula, campur tangan pihak penguasa dalam menciptakan harmoni ketika terjadi konflik internal dianggap sebagai perintah yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan, mengingat kondisi ketergantungan organisasi yang sangat besar terhadap penguasa, terutama dalam hal pembiayaan operasional kegiatan organisasi. Penguasa yang sering dipersonifikasikan sebagai Muspida, adalah titik akhir kebijakan rekrumen pengurus organisasi.

4.3.4 KNPI Sumatera Selatan Setelah Masa Reformasi

4.3.4.1 Kiprah KNPI Pasca Reformasi

Peristiwa reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rejim Orde Baru, menjadikan lingkungan organisasi KNPI berubah. Status “anak emas” pada masa Orde Baru dengan sendirinya juga berubah secara drastis. Pada masa reformasi, KNPI tidak lagi menjadi “anak emas” pemerintah. Dengan adanya perubahan besar dalam dunia politik di Indonesia, dimana berimplikasi terhadap pengambilan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masa awal reformasi yang cenderung bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil pada zaman Orde Baru.

Perubahan lingkungan bukan hanya pada tingkat supra struktur, tetapi juga pada tingkat infrastruktur. Bukan hanya pada level Pemerintah Pusat, tetapi juga merambat ke seantero negeri, termasuk lingkup wilayah daerah. Kampanye tentang demokratisasi yang sangat gencar di dalam masyarakat, menyebabkan pandangan masyarakat terhadap KNPI juga berubah. Perubahan-perubahan ini menjadikan KNPI bukan saja kehilangan induk semang, tetapi juga mengalami kemerosotan pamor secara drastis, karena sebagian masyarakat menganggap KNPI sebagai kroni Orde Baru.

Perubahan lingkungan bagi organisasi KNPI menjadi “tidak semudah dulu” dalam persoalan pendanaan dan fasilitas, banyak berpengaruh terhadap kehidupan organisasi KNPI. Tetapi karena mereka telah mendapat dukungan dana dan fasilitas selama lebih dari

dua puluh tahun di zaman Orde Baru sehingga dukungan dana tersebut berperan besar bagi penguatan organisasi dan pembinaan sumber daya manusia. Alumni aktivis organisasi KNPI pada umumnya relatif terampil dalam berorganisasi, terutama dalam organisasi politik. Walaupun saat itu KNPI bagaikan mengalami “benturan besar”, dan sempat “tiarap” dalam beberapa waktu, peristiwa itu tidak menyebabkan KNPI mati. KNPI tetap eksis dengan berusaha memulihkan keterkejutan menghadapi perubahan besar dalam situasi politik nasional.

Lingkungan yang berubah memacu KNPI beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Dengan tetap berusaha mempertahankan harmoni dengan penguasa setempat, dan tetap memposisikan KNPI sebagai sentral organisasi pemuda di Sumatera Selatan, KNPI Sumatera Selatan berusaha *survive* dalam kondisi lingkungan yang baru.

Begitu juga dengan personalia aktivis KNPI. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat tuntutan reformasi, berimplikasi terhadap organisasi KNPI yang secara individual mereka juga melakukan adaptasi. Perubahan sistem 3 (tiga) partai pada masa Orde Baru yang terbuka menjadi sistem banyak partai, membuka banyak peluang lowongan formasi di dunia politik nasional dan lokal. Lahirnya partai-partai baru dalam jumlah besar, diiringi dengan kebutuhan untuk merekrut banyak kader partai. Padahal perbendaharaan sumber daya manusia di bidang politik saat itu sangat terbatas, karena sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu yang panjang selama masa Orde Baru telah merasa alergi untuk memasuki karier sebagai politisi.

Artinya, kondisi yang terjadi akibat perubahan ini sangat menguntungkan aktivis KNPI yang relatif memiliki bekal keterampilan berorganisasi dalam memasuki dunia politik. Tidak mengherankan jika pada masa pasca reformasi, para aktivis KNPI yang pada masa lalu biasanya berafiliasi ke Partai Golkar, pada masa reformasi ini menyebar masuk ke berbagai partai politik yang

dianggap menjanjikan karier politik mereka. Walaupun demikian, di tengah-tengah peluang luas yang tersedia pada partai-partai politik lain yang baru muncul pada era reformasi, sebagian aktivis KNPI tetap memperkuat formasi sumberdaya Partai Golongan Karya.

Salah seorang alumni aktivis KNPI, menyatakan bahwa dari seluruh anggota DPRD di Provinsi Sumatera Selatan, kira-kira sebesar 40% berasal dari aktivis KNPI. Adapun di Partai Golkar sendiri, delapan (8) orang anggota dari keseluruhan empat belas (14) anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Golkar, adalah alumni aktivis KNPI. Di samping para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Edi Santana yang sekarang menjadi Wali Kota Palembang, juga mantan Ketua KNPI Sumatera Selatan.

Adanya kesamaan almamater KNPI, menurut salah seorang informan memudahkan dan melancarkan banyak lobi politik yang harus dilakukan para anggota dan fraksi di DPRD. Konon, walaupun sudah berbeda partai, hubungan kedekatan antara sesama para alumni KNPI masih tetap terpelihara. Perasaan seperjuangan yang dulu mereka rasakan, belum luntur karena adanya perbedaan partai.

Peristiwa reformasi yang meruntuhkan rejim Orde Baru, sepintas nampak sebagai pil pahit yang harus ditelan KNPI. Akan tetapi bagi KNPI Sumatera Selatan, pil pahit tersebut ternyata menyehatkan. Seperti telah diuraikan di atas, dengan berkembangnya banyak partai-partai baru yang sebenarnya relatif tidak memiliki kader yang mapan, para aktivis KNPI ternyata memperoleh peluang besar untuk terjun ke dunia politik melalui partai baru itu. Artinya, secara individual, para aktivis KNPI, memperoleh banyak kebaikan dengan adanya reformasi.

Dari sudut organisasi, yang terjadi juga kurang lebih sama. Putusnya aliran fasilitas dari pemerintah ditambah dengan merosotnya pamor di mata masyarakat, pada mulanya memang cukup menjadikan organisasi KNPI berjalan terseok-seok. Tetapi selanjutnya, KNPI sebagai organisasi massa juga memperoleh banyak keuntungan dari terjadinya reformasi, terlebih lagi ketika ditentukan Pemilihan Kepala

Daerah Secara Langsung sebagai konsekuensi dari pemilihan Presiden secara langsung, akibat dari penerapan sistem presidensial secara lebih konsekuen. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KNPI Sumatera Selatan sampai saat ini tetap mengklaim diri sebagai pusat organisasi pemuda di wilayah Sumatera Selatan, yang juga mengklaim seluruh pemuda di wilayah Sumatera Selatan sebagai anggotanya.

Posisi strategisnya KNPI saat ini justru sangat dilirik oleh para politisi yang berkepentingan untuk mengikuti pemilihan umum baik untuk jabatan legislatif, apalagi bagi calon yang ingin maju bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah. Hal ini menyebabkan terputusnya aliran dana dari pemerintah, tidak menjadikan KNPI vakum dalam berbagai aktivitasnya karena pasokan dana dari luar justru mengalir deras. Di lain pihak, para alumni KNPI juga berkepentingan untuk mendukung langgengnya kehidupan KNPI di dalam masyarakat. Perbedaan situasi yang telah terjadi ternyata sangat menguntungkan KNPI. Sebab, dahulu jika suntikan dana dari pemerintah membelenggu independensi KNPI, sekarang, aliran dana yang masuk dari pihak yang berkepentingan dengan KNPI, secara umum tidak dapat membatasi independensi KNPI.

4.3.4.2 Kemelut dalam Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan, masa transisi demokrasi yang mengantarkan KNPI pada posisi strategis telah menyebabkan banyak tokoh politik masyarakat yang berkeinginan “memiliki” organisasi KNPI. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian proses pertarungan antara para pihak yang berkepentingan itu terjadi, di tengah-tengah kegalauan dan keinginan KNPI untuk menjadi organisasi yang independen. Akibatnya, pada musyawarah provinsi KNPI yang ke-11 tahun 2009, terjadi kemelut dalam organisasi KNPI Sumatera Selatan. Kronologis kisahnya dapat dilihat di bawah ini.

Pada musyawarah provinsi XI tahun 2009 yang lalu, tidak kurang dari 72 (tujuh puluh dua) organisasi pemuda yang diundang untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Setiap organisasi, diwakili oleh 2 (dua) orang wakil yang mendapat mandat dari organisasi yang bersangkutan. Konsekuensi dari rancangan tersebut, sistem rekrumem pengurus juga berusaha mengakomodasikan aspirasi.

Pada saat dibukanya Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 1 Agustus 2008 ditetapkan 8 (delapan) orang bakal calon ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Pengundian Nomor Urut Calon, yaitu:

- (1) Prana Poetra Sohe, SH
- (2) Alfiantoni, S.Ag
- (3) Husni Chandra, SH. M.Hum
- (4) Yudha Mahrom Darma Saputra, SE
- (5) Dr. Ir. Mustopa Marli Batubara, MP
- (6) Husyam, ST, S.Sos
- (7) Azim Baidillah, SH
- (8) H. Ikrar, S.Ag

Pada saat akan dilaksanakan musyawarah provinsi di Kabupaten Musi Rawas yang bertempat di Hotel Royal Kota Lubuk Linggau, ada salah satu calon yang mengundurkan diri yaitu Sdr. Dr. Ir. Mustopa Marli Batubara, MP, jadi tinggal 7 calon ketua. Setelah dilakukan pembukaan Musyawarah Provinsi XI diadakanlah Sidang-sidang Pleno, sampai dengan Sidang Pleno IV ada salah satu kandidat calon ketua (Prana Poetra Sohe, SH) beserta timnya meminta musyawarah provinsi untuk ditunda dan dilaksanakan di Palembang dengan alasan teknis bahwa di DPP terjadi dualisme kepengurusan. Empat (4) kandidat calon ketua yang Kuat dukungannya menyetujui penundaan pemilihan ketua, 3 kandidat tidak menghendaki ditunda dan satu kandidat yang dapat memaklumi keinginan Bung Prana Poetra Sohe, SH beserta timnya dengan alasan politis yang juga berjanji

tidak akan maju lagi jika musyawarah provinsi dilanjutkan di Palembang.

Pada akhirnya musyawarah provinsi ditunda, kemudian dilanjutkan di Palembang pada saat akan dilaksanakannya lanjutan Musyawarah Provinsi XI DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan Kepanitiaan didampingi Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004–2007 (tidak ada Periode 2006–2009) menghadap gubernur (H. Alex Noerdin) di Griya Agung dimana gubernur berpesan bahwa biarpun di DPP KNPI terjadi dualisme kepengurusan tapi untuk Sumatera Selatan tetap satu Kepengurusan yang diproses melalui Kepengurusan dan Kepanitiaan. Meskipun juga sempat mengalami penundaan selama 2 bulan.

Ketika musyawarah provinsi dilanjutkan di Palembang pada tanggal 29 dan 30 Desember 2008 yang diadakan di Gedung Pemuda (Sekretariat DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan) sesuai dengan undangan timbul persoalan yaitu masih adanya keinginan dari salah satu kandidat calon ketua yang berjanji tidak akan maju lagi di Palembang, untuk tetap maju. Oleh karena yang bersangkutan tidak menyampaikan surat pengunduran secara tertulis, maka panitia tetap mempersilahkan yang bersangkutan untuk maju dan sesuai dengan azas demokrasi.

Selama proses musyawarah provinsi berjalan timbul gejala baru yang persoalannya tidak jauh berbeda dengan kejadian di Lubuk Linggau yaitu karena salah satu kandidat tidak memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO), sehubungan dengan usianya yang telah melebihi usia 40 tahun (dia berumur 42 tahun) dan masalah domisili, tidak bisa diloloskan maka ada beberapa OKP dan DPD KNPI Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan di Hotel Novotel, dan secara langsung menunjuk H. Budi Antoni Aljufri, SH menjadi Ketua KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Padahal saat itu, peserta musyawarah di Gedung Pemuda mulai dari pagi sampai dengan maghrib menunggu para peserta yang berada di Hotel Novotel

untuk meneruskan Musyawarah Provinsi XI DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan di gedung Pemuda sesuai undangan. Melihat perkembangan kondisi demikian akhirnya para peserta yang ada di gedung Pemuda setelah maghrib melanjutkan Musyawarah Provinsi XI dengan agenda pleno pemilihan, setelah melalui beberapa kali Skorsing akhirnya pleno pemilihan tetap dilaksanakan.

Dari 7 (tujuh) orang kandidat ketua, ada 3 (tiga) orang kandidat ketua yang hadir, yaitu (Husni Chandra, SH, M.Hum, Yudha Mahrom Darma Saputra, SE, Azim Baidillah, SH) sementara Alfiantoni, S.Ag sebelum dilaksanakan kembali musyawarah provinsi secara lisan telah menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Dari ketiga calon tersebut Husni Chandra, SH, M.Hum mendapatkan suara terbanyak dengan dukungan 25 suara, sementara Yudha Mahrom DS, SE memperoleh 10 suara dan Azim Baidillah, SH mengundurkan diri dari pencalonan dan 2 suara abstain.

Hasil Musyawarah Provinsi XI DPD KNPI Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda ditindaklanjuti dengan mengajukan Surat Keputusan kepada kedua DPP KNPI yang ada di Jakarta. Hal ini untuk menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Pada awalnya ketua terpilih mendapatkan SK dari kedua DPP KNPI, namun berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP KNPI versi Bali jabatan ketua KNPI Sumsel yang dipegang oleh Azis Syamsuddin dicabut, sehingga menimbulkan persoalan baru di KNPI Sumatera Selatan.

Berkaitan dengan adanya dualisme kepemimpinan KNPI di Provinsi Sumatera Selatan, para alumni juga secara otomatis menjadi terbagi dua, walaupun perbedaan keberpihakan di antara mereka tidak sampai menjadi konflik. Alumni yang berpihak kepada DPD KNPI versi Gedung Pemuda pada umumnya merasa prihatin terhadap beberapa indikasi kejanggalan yang terjadi saat ini. Misalnya, dulu KNPI adalah wadah membina pemuda untuk menjadi pemimpin, tetapi sekarang para pemimpin elite birokrasi daerah seperti bupati

yang bukan kader KNPI justru bersikeras ingin menjadi Ketua KNPI. Tetapi para alumni yang pro DPD versi Gedung Pemuda sangat berhati-hati bersikap, karena DPD KNPI versi Novotel lah yang didukung oleh penguasa daerah. Tradisi yang telah hidup sejak awal berdirinya KNPI yang selalu akomodatif dan patuh kepada penguasa, nampaknya telah mendarah daging dalam diri alumni KNPI. Sehingga walaupun beberapa anggota mengakui ada indikasi gejala nepotisme dalam kepengurusan KNPI versi Novotel, para alumni tersebut berusaha untuk tidak menunjukkan sikap radikal terhadap penguasa. Selain itu, ada pandangan yang menyatakan biarlah para aktivis masa kini berusaha dan belajar mengatasi masalah mereka sendiri secara organisasional, agar mereka memperoleh pengalaman yang berharga untuk masa depan.

Tatkala ditanya kenapa dualisme kepengurusan yang terjadi tidak dimediasi, pada umumnya alumni ini menyatakan bahwa persoalan yang ada cukup rumit, tidak mudah dan cukup memakan waktu untuk mengupayakan konsolidasi KNPI. Jika langkah yang diambil salah, maka bukan tidak mungkin keadaan akan menjadi bertambah parah. Ada juga yang mengatakan bahwa dualisme kepengurusan yang terjadi di KNPI Sumatera Selatan ada kaitannya dengan dualisme pengurus KNPI yang juga terjadi di tingkat pusat. Seandainya di pusat tidak terjadi dualisme, kemungkinan besar di daerah juga tidak terjadi dualisme kepengurusan tersebut.

Sedangkan alumni yang berpihak kepada DPD KNPI versi Novotel, beranggapan pengurus KNPI versi Gedung Pemuda terlalu berkeras terhadap penguasa. Bertabrakan dengan penguasa bukanlah tradisi KNPI. Sejak awal kelahirannya, KNPI selalu menjalin hubungan baik dengan penguasa. Harus ada pihak yang mengalah dan menurunkan tuntutan supaya terjadi persatuan kembali. Perpecahan di tubuh KNPI hanya akan merugikan KNPI sendiri.

Peta dukungan terhadap masing-masing pengurus dari pihak eksekutif juga cukup menarik. KNPI versi Novotel memperoleh dukungan dari gubernur, dan dengan demikian subsidi biaya dan

fasilitas dari Pemerintah Provinsi mengalir ke pengurus KNPI versi Novotel. Sedangkan KNPI versi Gedung Pemuda memperoleh dukungan dari Wali Kota Palembang. Pihak Pemerintah Daerah Kota Palembang memberikan dan menawarkan bantuan ke pengurus DPD KNPI Sumatera Selatan versi Gedung Pemuda. Di kalangan alumni KNPI yang menjadi Anggota Legislatif, pada umumnya mendukung DPD KNPI versi Gedung Pemuda yang dianggap lebih memenuhi tata prosedur pemilihan Ketua. Namun demikian, ada juga anggota legislatif alumni KNPI yang berpihak kepada DPD KNPI versi Novotel.

Ditinjau dari aspek dinamika organisasi, keadaan yang sedang terjadi di tubuh DPD KNPI Sumatera Selatan bukanlah suatu keadaan yang luar biasa. Di dalam organisasi selalu ada berbagai kepentingan, dan kepentingan-kepentingan tersebut tidak akan selalu berjalan searah. Kadang dia bisa bersimpangan, kadang dapat juga bertabrakan. Tetapi pada umumnya, setiap kepentingan yang muncul selalu memiliki sandaran atau landasan yang dapat melegitimasi kepentingan tersebut. Kepentingan yang dipertahankan DPD KNPI versi Gedung Pemuda berlandaskan tata prosedural pemilihan Ketua, sedangkan kepentingan DPD KNPI versi Novotel bersandar pada tradisi KNPI yang ketuanya hampir selalu diresdusi penguasa. Jika pada masa lalu kedua aspek tersebut selalu dapat dikompromikan dan berjalan sejajar, persoalan yang muncul sekarang adalah karena Ketua yang dipilih secara prosedural tidak sama dengan Ketua yang memperoleh restu dari penguasa, dan belum ditemukan titik kompromi yang mempertemukan dualisme yang terjadi. Kedua belah pihak dengan sama-sama memiliki dukungan, tetap berusaha bertahan pada garis prinsip yang dianutnya.

4.3.4.3 Upaya-upaya Mengatasi Konflik di Tubuh KNPI

Pada bulan Ramadhan 1429 H diadakanlah pertemuan antara Budi Antoni Aljufri, SH dan beberapa rekannya dengan Husni Chandra, SH, M.Hum dan beberapa rekannya pula untuk membahas persoalan DPD KNPI Sumatera Selatan. Hasilnya, dilakukan *Win-win*

Solution dengan membentuk Tim 3 dari masing-masing kelompok. Tetapi pada akhirnya di pertemuan tim tiga tidak mencapai kata sepakat yang dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua kelompok.

Menurut salah seorang informan, sebetulnya juga salah jika dilakukan serah terima dari DPD KNPI versi Gedung Pemuda kepada DPD KNPI versi Novotel, karena DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan bukan milik perseorangan apalagi pribadi (bukan perusahaan perorangan) yang dapat seenaknya diserahterimakan tanpa melalui proses yang konstitusional sebagaimana sebuah organisasi yang merupakan wadah berhimpunnya OKP (Pemuda). Salah satu solusi yang pernah juga ditawarkan yaitu mengadakan musyawarah provinsi ulang. Solusi lainnya yang juga ditawarkan adalah, mekanisme organisasi yang ada di Konstitusi KNPI tetap dijalankan. Saran ini tidak ditanggapi oleh Kelompok Budi Antoni Aljufri, SH walau solusi tersebut dianggap baik untuk keutuhan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Jika ditelaah ke belakang, Budi Antoni Aljufri, SH tidak memenuhi syarat menjadi Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan karena:

- (1) Tidak ikut proses pencalonan dari awal sebagaimana diatur dalam AD/ART dan PO KNPI, karena musyawarah provinsi. ini adalah musyawarah provinsi lanjutan.
- (2) Tidak pernah duduk sebagai Pengurus KNPI Provinsi Sumatera Selatan (Wakil Ketua), atau Ketua OKP tingkat provinsi, atau Ketua KNPI Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam AD/ART dan PO KNPI.
- (3) Tidak berdomisili di ibukota provinsi karena menjadi bupati di Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana diatur dalam AD/ART dan PO KNPI.

Berpijak dari hal tersebut di atas DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan hasil Musyawarah Provinsi XI Gedung Pemuda telah mencoba melakukan pendekatan kepada gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pembina Politik dan Pembina Generasi Muda di Provinsi Sumatera Selatan. Cara yang diambil dengan

melayangkan (menyampaikan) Surat permohonan audiensi kepada gubernur, untuk mencoba mencari solusi terbaik terhadap persoalan di internal DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Pada masa Kepemimpinan Ketua Husni Chandra, SH, M.Hum dan Sekretaris Hasanuddin, S.Pd (Hasil Musyawarah Provinsi XI di gedung Pemuda) telah 3 (tiga) kali melayangkan surat permohonan audiensi tapi tidak ditanggapi sampai dengan hampir satu tahun. Akhirnya berbuntut dengan pengunduran diri Husni Chandra, SH. M.Hum dari Jabatan Ketua pada Pleno III DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan dengan mengundang Seluruh OKP yang pada Pleno tersebut juga secara aklamasi menunjuk Yudha Mahrom Darma Saputra, SE sebagai Ketua sesuai dengan AD/ART dan PO KNPI.

Di masa kepemimpinan Ketua Yudha Mahrom Darma Saputra, SE dan Sekretaris Hasanuddin, S.Pd (Hasil Pleno III diperluas DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan) sudah ada 2 (dua) kali melayangkan Surat Permohonan Audiensi tapi sampai saat penelitian dilakukan belum ada tanggapan, bahkan setelah menyampaikan surat yang pertama DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan justru mendapatkan surat balasan untuk segera mengosongkan Gedung (Sekretariat) KNPI Provinsi Sumatera Selatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui beberapa kali telepon dari Badan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Namun demikian Surat Permohonan Audiensi yang juga disampaikan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan kepada unsur Muspida Sumatera Selatan mendapat perhatian dan apresiasi yang beragam. *Pertama* oleh Pangdam II Sriwijaya meskipun baru sebatas ASTER Kodam II Sriwijaya disarankan untuk klarifikasi persoalan dualisme kepengurusan DPD KNPI Sumatera Selatan, tapi paling tidak ini sudah mencoba memberikan solusi terbaik untuk penyelesaian persoalan internal DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan,

Kedua, diterima oleh Kapolda Sumatera Selatan secara langsung dan inipun sudah memberikan sebuah wacana baru dalam

penyelesaian konflik tersebut. *Ketiga*, hampir diterima oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan meskipun akhirnya dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Padahal di dalam surat tersebut ada Kontak Person (nomor HP) yang dapat dihubungi. Para pengurus KNPI sudah hadir sesuai waktu yang tertera dalam surat balasan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan belum ada jawaban.

Di tengah terdapatnya dualisme kepengurusan DPD Provinsi Sumatera Selatan, datang surat perintah pengosongan Gedung Pemuda yang menjadi markas KNPI versi Gedung Pemuda dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Alasannya adalah akan direnovasi. Tetapi pihak pengurus dan pendukung KNPI versi Gedung Pemuda tidak mematuhinya dan tidak beranjak dari Gedung Pemuda, dikatakan oleh pengurus, bahwa sebenarnya Gedung KNPI tersebut baru saja direhabilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Sumatera Selatan melalui Dinas PU Cipta Karya pada tahun 2005. Pada saat ini Gedung KNPI tersebut masih dalam kondisi yang baik hanya aliran listrik dan perusahaan daerah air minum (PDAM) yang terputus karena ada permasalahan tunggakan pembayaran. Renovasi yang akan dilakukan sekarang belum dibutuhkan.

Barang-barang inventaris yang lain juga tidak semua aset yang ada di Sekretariat DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan adalah milik Pemerintah Provinsi, seperti AC yang terpasang di gedung tersebut adalah merupakan bantuan dari beberapa donatur, meja kantor adalah bantuan dari PT. PLN Persero, almari bantuan dari PT. Pertamina UP III Persero begitu juga kursi dan sebagainya.

Pada saat ditempati setelah dilakukan Rehabilitasi/Perbaikan gedung KNPI tersebut tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkantoran, hanya saja ada 3 (tiga) kendaraan roda 4 (mobil) bantuan dalam bentuk pinjaman dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini 2 (dua) dalam keadaan rusak dan yang satunya berada di rumah Iskandar Badaruddin (Bendahara DPD KNPI Provinsi

Sumatera Selatan Periode 2004-2007) yang sampai hari ini belum dikembalikan.

Mulai dari berdirinya Gedung Sekretariat DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan di masa kepengurusan Ir. Noviarman Kailani, kemudian Nasrun Madang, SH dan seterusnya sampai kepengurusan Andi Wijaya Busroh, SH, M.Hum, belum pernah ada surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempersoalkan Gedung Sekretariat DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan termasuk inventarisnya. Demikian pula untuk mengosongkan gedung. Ada kecurigaan yang timbul bahwa perintah pengosongan gedung merupakan rekayasa saja yang berkaitan dengan terjadinya dualisme kepengurusan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan. Padahal DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan yang mendiami Gedung Sekretariat DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan versi Gedung Pemuda tidak pernah mempersoalkan Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan versi Novotel untuk berkantor di gedung tersebut, bahkan sudah ditawarkan karena gedung tersebut berlantai 2.

Dengan terjadinya dualisme ini, tercapainya tujuan organisasi secara ideal sebagai wadah komunikasi, penyatuan gagasan dan wadah bagi para pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan memperoleh hambatan yang berarti. Bagaimana KNPI dapat menjadi wadah komunikasi para pemuda, jika komunikasi organisasi tidak berjalan. Bagaimana KNPI dapat memfasilitasi penyatuan gagasan bagi kalangan pemuda jika tidak memiliki persatuan dalam dirinya. Bagaimana KNPI bisa menjadi wadah bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan jika mereka sendiri sibuk berebut posisi dalam organisasi.

Dari segi pembelajaran, situasi yang sedang dialami DPD KNPI Sumatra Selatan barangkali juga fungsional bagi para aktivis. Jika pada masa lalu di era Pemerintahan Orde Baru dinamika organisasi di tubuh KNPI Sumatra Selatan hampir seluruhnya dipenuhi situasi harmoni, tetapi pada saat sekarang sedang sarat dengan nuansa konfliknya. Dalam suatu organisasi, kedua nuansa

tersebut memang relatif selalu ada bagai dua sisi mata uang. Namun kadang salah satu nuansa mendominasi nuansa lain. Para aktivis KNPI yang sudah banyak belajar persoalan dinamika organisasi, sedang bergelut dalam wadah penuh nuansa konflik.

Jika situasi sekarang dapat dilihat dan disikapi secara tepat, akan sangat berguna untuk memperkaya wawasan para aktivis. Paling tidak, para aktivis mampu menangkap pelajaran bahwa ada kepentingan individual dan kelompok kecil, di samping adanya tujuan bersama yang harus dicapai organisasi. Jika salah satu kepentingan perlu ditekan untuk eksisnya kepentingan yang lain, tentu saja yang ditekan adalah kepentingan individu atau kelompok kecil, dan semua pihak perlu belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama. Bukan sikap bijak jika dalam berorganisasi, kepentingan bersama dikalahkan atau direduksi untuk eksisnya kepentingan individu atau kelompok kecil. Jika ini yang terjadi, dapat diperkirakan organisasi akan semakin melemah, dan bukan tidak mungkin akan sekarat.

Namun demikian, selama ini DPD KNPI Sumatera Selatan nampaknya relatif sudah berhasil menjadikan dirinya sebagai kader pemimpin di daerahnya yang memiliki keterampilan berorganisasi yang relatif tinggi. Hal ini terbukti dengan sekian banyaknya kader aktivis yang berhasil mencapai karier politik di legislatif dan eksekutif. Prestasi ini tidak nampak pada organisasi kepemudaan lain yang berada di Sumatera Selatan.

4.3.5 Penutup

Persentase pemuda yang berhasil meraih kursi di DPRD Sumatera Selatan sangat kecil. Perolehan kursi di DPRD Sumatera Selatan masih didominasi oleh anggota dewan pada kelompok umur 40-55 tahun. Ada beberapa penyebab atas hal itu, yaitu lemahnya kaderisasi di tubuh masing-masing partai, tidak berfungsinya organisasi kepemudaan seperti KNPI hanya karena adanya dualisme kepemimpinan, lemahnya jaringan yang terbangun oleh pemuda yang terjun ke dunia politik padahal untuk mendapatkan suara yang banyak

mengandalkan jaringan sampai ke akar rumput, dan juga kurang kuatnya modal keuangan karena pemilihan langsung membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit dan hal itu tidak dimiliki pemuda yang baru terjun ke dunia politik kecuali dia memang anak orang yang memadai di bidang keuangan.

Jika ada satu atau dua orang pemuda sampai batas usia 30 tahun mampu meraih kursi di DPRD Sumatera Selatan, itu disebabkan oleh kuatnya sosialisasi keluarga di bidang politik kepada pemuda tersebut. Keterpajanan mereka pada dunia politik sejak masa pertumbuhan membuat mereka menjadi lebih cepat matang dibanding pemuda lain yang sama-sama terjun ke dunia politik. Memang sempat ada kekhawatiran tumbuhnya politik dinasti di Sumatera Selatan ini dengan keberhasilan pemuda di bawah usia 30 tahun yang melaju menjadi anggota DPD Pusat di Senayan, Jakarta. Dia adalah anak salah seorang bupati di Provinsi Sumatera Selatan. Kultur perpolitikan seperti itu membawa dampak buruk karena adanya ketidakpercayaan antara yang diwakili dengan yang mewakili. Fenomena "anak-anakan," yaitu anak gubernur, anak bupati, anak wali kota, anak pimpinan parpol sebagai faktor penentu keberhasilan menjadi anggota legislatif ini sangat mengkhawatirkan dalam konteks pembangunan karakter bangsa. Apalagi, jika fenomena itu ditambah dengan fenomena *money politic* karena disinyalir gagalnya para pemuda dalam memperebutkan kursi di DPRD Sumatera Selatan karena lemahnya modal material.

Memang sampai sekarang belum ada satu pun pemuda berusia maksimal 30 tahun yang menjadi bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sangat wajar terjadi karena adanya "diskriminasi" atas diri pemuda. Dalam pemilihan kepala daerah ada aturan main yang masih membatasi umur 30 tahun ke atas. Padahal, seluruh anak bangsa diwajibkan untuk memilih pada usia 17 tahun ke atas dan hampir 50% pemilih itu berusia muda. Artinya, struktur memang membuat pemuda dalam posisi tidak memiliki kesempatan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

4.3.5.1 Kesimpulan

- (1) DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan pada zaman pemerintahan Orde Baru menjadi wadah sentral pemuda Sumatera Selatan untuk membentuk kader pemimpin daerah yang memiliki wawasan nasional, dan keterampilan berorganisasi.
- (2) Pada masa itu, KNPI menjadi “anak emas” pemerintah yang memperoleh dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.
- (3) Pengkaderan yang berjalan di DPD KNPI Sumatera Selatan pada masa lalu, menunjukkan keberhasilan dengan indikasi banyaknya jumlah alumni yang mampu berkiprah sebagai pemimpin eksekutif dan anggota badan legislatif pada saat ini.
- (4) Peristiwa reformasi yang merombak secara drastis tatanan masyarakat baik pada tingkat suprastruktur maupun pada tingkat infrastruktur dirasakan sebagai benturan keras yang mulanya tidak menguntungkan bagi KNPI.
- (5) Pada tahap selanjutnya, DPD KNPI memperoleh keuntungan dari perubahan sistem kepartaian menjadi multi partai. Banyak partai baru yang membutuhkan kader, tetapi tidak memiliki kader di daerah. Bagi para aktivis yang memiliki keterampilan berorganisasi di bidang politik, terbuka peluang besar untuk dapat berkiprah dalam dunia politik.
- (6) Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, juga membawa hikmah tersendiri bagi KNPI sebagai organisasi massa. Para tokoh yang ingin maju menjadi kandidat calon Kepala Daerah, sangat berminat “memiliki” KNPI.
- (7) Kepentingan individual yang berusaha mendesak masuk ke dalam tubuh organisasi KNPI, berbenturan dengan aturan main yang terdapat di dalam KNPI.
- (8) Tradisi KNPI yang akomodatif dan patuh kepada penguasa mulai bergeser, sejalan dengan terjadi perubahan kondisi sosial-politik dalam masyarakat. Kepatuhan yang terjadi sekarang, bukan kepatuhan tanpa pamrih seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru.

- (9) Dinamika organisasi yang pada masa lalu penuh dengan nuansa harmoni, bergeser menjadi sarat dengan konflik.
- (10) Telah dilakukan upaya-upaya untuk meredam konflik dan melakukan konsolidasi dalam tubuh KNPI, namun masih menemukan jalan keluarnya. Walaupun sudah ada keinginan untuk islah, kedua belah pihak tetap berpegang pada landasan yang berbeda.

4.3.5.2 Rekomendasi

- (1) Sesuai dengan harapan yang diutarakan oleh sebagian besar aktivis dan alumni DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan, perlu ada itikad kuat dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan yang terjadi pada DPD KNPI Sumatera Selatan.
- (2) Resolusi konflik hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak menurunkan tuntutan dan memahami serta mengakomodasikan tuntutan pihak lain. Oleh karena itu, supaya tercapai suatu titik kesepakatan, perlu dilakukan pertemuan dengan frekuensi yang cukup tinggi untuk saling memaparkan aspirasi agar masing-masing dapat dipahami pihak lain untuk membentuk saling pengertian.
- (3) Dengan latar belakang masyarakat yang berbeda, DPD KNPI Sumatera Selatan hendaknya berusaha mencapai prestasi yang tidak lebih rendah dari yang telah dicapai KNPI pada masa lalu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (Ed.). 1974. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Budiyanto dan Noer Eddy Budiono. 2008. *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer*. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga RI.
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. 2009. "Data Base Parpol, Ormas, dan LSM Tahunan 2009." Tidak diterbitkan.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Pemuda Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2009. *Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang: BPS.
- Creative Writers Club (CWC). 1993. *Suara Generasi Muda: Dialog Politik dengan Dua Belas Tokoh Pemuda*. Jakarta: Yayasan Bina Kreativitas Insani (YKBI).
- Dachroni, R. 2010. "Disparitas UU Kepemudaan." Catatan Lepas.
- Daldjoeni, N. 1974. "Sosiologi Pemuda Indonesia: Masalah dan Pemecahannya." Dalam Taufik Abdullah (Ed.). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Latif, Yudi. 2007. "Pergerakan Indonesia Muda." Dalam *Harian Kompas* 26 Oktober.
- Ridwan, Malik. 2007. "Demokrasi Indonesia Diskriminasi Pemuda." <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil>. 30 Desember.
- Samsuddin, Aziz. 2008. *Kaum Muda Menatap Masa Depan Indonesia*. Jakarta: RMBooks.
- Saifudin, Achmad Fedyani. 2009. "Menjaga Kesatuan dan Persatuan: Pemuda Kita dalam Dunia yang semakin Contested". Dalam Zulkifi Akbar, Karosno, Budiyanto (Eds.). *Dialog Pemuda*

dalam Membangun Bangsa. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 2009. *Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014.* Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

"Sumut Dukung Deklarasi Pemuda Politik." <http://www.pempropsu.go.id/lengkap.php?id=2538>. Diakses Sabtu, 2 Oktober 2010.

Tamzirien. 2009. "RUU Kepemudaan: Reposisi Pemuda sebagai Kategori Sosial."

Tilaar, H.A.R. 1974. "Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosferis." Dalam Taufik Abdullah (Ed.). *Pemuda dan Perubahan Sosial.* Jakarta: LP3ES.